MENUJU KAPITALISME RELIGIUS ?

Iggi Haruman Achsien *)

I. Pendahuluan

Sistem ekonomi adalah persoalan besar dalam ilmu ekonomi. Dan, sistem ekonomi adalah konsep besar yang menjadi fundamen, sebagai salah satu variabel sangat penting yang menentukan kinerja perekonomian.

Ketika suatu negara dihadapkan pada pilihan untuk menentukan suatu bentuk sistem perekonomiannya, tawarannya ada dua. Memilih yang sudah ada atau memajukan alternatif yang baru. Sistem besar yang sudah ada adalah kapitalisme dan sosialisme. Sudah banyak uraian yang mencoba mengkritisi kedua sistem tersebut. Bahkan jalan keluar sebagai alternatif perimbangan dari dua sistem tersebut juga ditawarkan. *Market Socialism*, sebagai *mixed system*, adalah contohnya. Indonesia juga mengajukan sistem yang berusaha menjadi jalan tengah di antara kedua sistem tersebut. Sebutannya sistem ekonomi Pancasila.

Sistem ekonomi Pancasila diajukan untuk menggantikan ekonomi terpimpin yang cenderung lebih sosialis. Sistem ekonomi terpimpin yang lebih sosialis tersebut dinilai gagal memberi momentum dan laju pembangunan yang diharapkan dan diperlukan. Bahkan menciptakan inflasi yang dahsyat, hingga 600%. Karenanya sistem ekonomi Pancasila diajukan sebagai jalan keluar. Sistem yang juga pada akhirnya kembali dipertanyakan. Momentum mempertanyakan kembali tersebut adalah krisis ekonomi yang terjadi belakangan. Sistem ekonomi Pancasila juga dinilai tidak tahan banting, malah pelaksanaan pembangunannya yang ikut memperparah krisis yang terjadi. Kritik yang bisa diajukan pada sistem ekonomi Pancasila adalah konsepnya yang kurang jelas. Lebih cenderung sebagai "sistem ekonomi bukan-bukan", karena memberikan pengertian bukan kapitalisme bukan etatisme. Tidak ini, tidak itu.

Apa yang berkembang di Asia Tenggara selama ini, termasuk Indonesia, bisa dituding sebagai kapitalisme malu-malu. Atau *ersatz capitalism*, kalau menggunakan istilahnya Yoshihara Kanio. Mengatakan bukan kapitalisme, tapi kepemilikan pribadi sangat diagung-agungkan, persaingan bebas pada akhirnya dibiarkan karena tuntutan liberalisasi, juga dibiarkannya korporasi yang main meraksasa dari penumpukan modal yang dilakukan tidak peduli secara bersih maupun rente. Dikatakan malu-malu atau inferior karena campur tangan pemerintah masih terlalu besar dan perkembangan teknologi yang dipunyai tidak memadai.

---

*) Iggi Haruman Achsien : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Pada saat konsep baru hendak dilancarkan, seperti sistem ekonomi Pancasila tersebut, maka hendaknya mempunyai kejelasan dalam tataran konseptualnya. Karena kalau tidak, ia akan tenggelam dalam konsep yang telah ada. Nasib yang sama juga akan dialami oleh sistem ekonomi Kerakyatan yang didengungkan belakangan ini. Jika konsepnya juga tidak punya kejelasan, ia akan tenggelam - paling tidak – ke arah sosialisme. Adalah kemungkinan yang besar bahwa yang terjadi hanyalah perbedaan istilah, sementara substansinya sama saja. Arief Budiman menyebutkan faktor historis-aspiratif dan juga faktor filosofi dasar manusia yang dilupakan oleh konsep-konsep baru yang diajukan sebagai alternatif sistem ekonomi Indonesia tersebut.

Makalah ini dimaksudkan untuk menawarkan konsep alternatif bagi sistem perekonomian Indonesia. Tapi tidak lantas mengklaim sebagai sesuatu yang baru, atau lain sama sekali. Kecenderungan menawarkan "*old wine in new bottle*" berusaha untuk dihindari. Karena itu penulis justru menyatakan dari awal, bahwa makalah ini mencoba menggali kembali konsep-konsep klasik dari Saint Thomas Aquinas, Max Weber, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, dan beberapa pemikir lainnya tanpa meminggirkan pemikir kontemporer dan sekaligus para futuris. Seperti kata Schumpeter, pemahaman masa kini tidak dapat dilakukan tanpa memahami masa lalu.

Pembahasan dalam makalah ini diawali dengan pengertian dasar sistem ekonomi untuk memberi pemahaman yang lebih baik untuk pembahasan selanjutnya. Berikutnya adalah catatan tentang normativisme dalam sistem ekonomi yang menjadi penting karena terkait dengan kapitalisme religius yang diajukan. Kemudian, *towards understanding of religious capitalism*, menuju pemahaman kapitalisme religius, akan tersusun dari pemahaman faktor-faktor yang menyusunnya. Berturut-turut kemudian adalah argumentasi atas pertanyaan "mengapa kapitalisme religius?" dengan melihat faktor filosofis, faktor historis-aspiratif, dan juga faktor yang bisa disebut futuristik.

II. Sistem Ekonomi : Beberapa Pengertian

Catatan awal sudah diberikan Fredric Pryor. Katanya, *"The Concept of an economic system is almost impossible to define exactly*." Bisa jadi bahwa konsep sistem ekonomi bersifat dinamis, variabel yang dijelaskannya makin kompleks dan karenanya tidak dapat didefinisikan dengan tepat. Meski demikian beberapa pengertian mendasar sebagai ciri umum tetap diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang jelas. Pemahaman yang jelas berawal dari definisi.

Sistem ekonomi dapat dipandang sebagai mekanisme yang digunakan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dari mulai produksi, distribusi, dan konsumsi. Morris Bernstein menyatakannya sebagai berikut ; Sistem ekonomi adalah seperangkat kesepakatan

dimana masyarakat menentukan: (1) apa yang diproduksi ?, (2) bagaimana memproduksinya?, termasuk (i) institutsi-instrumen yang digunakan dan (ii) pola alokasi sumber daya, dan (3) bagaimana kepemilikan pribadi diberlakukan dan distribusi menyangkutnya (Bernstein, 1994).

Kurang lebih senada, Paul R. Gregory dan Robert C. Stuart, memberikan definisi sebagai berikut: *"Economic system is a set of mechanism and institutions for decision making and for the implementation of decisions concerning production, income, and consumption within a given geographic area."* (Stuart & Gregory, *"Comparative Economic System"*, hal 16)

Sistem ekonomi adalah multidimensional. Fungsi dari sejumlah variabel. Atau dinyatakan sebagai berikut:

$$ES = f(A1, A2, \ldots, An)$$

Berdasarkan definisi di atas, fungsi Es tersebut dapat difokuskan dengan empat variable saja, n = 4. Keempat variabel tersebut adalah;

(1) oranisasi pembuat keputusan,
(2) mekanisme untuk alokasi sumber daya,
(3) pengakuan hak milik *(property right)*, dan
(4) insentif yang mendorong tindakan.

Dua sistem besar, kapitalisme dan sosialisme, biasanya dikontradiksikan dengan merujuk pada variabel-variable di atas sebagai berikut :

(1) apakah desentralisasi atau sentralisasi,
(2) apakah *market* atau *planned,*
(3) apakah *private* atau *public*, dan
(4) apakah material atau moral.

Sementara *mixed system*, seperti telah diduga, berusaha menjembatani kedua kutub ekstrem tersebut.

Dengan demikian, dengan melihat pada variable-variabel model diatas, sistem ekonomi akan tampak ciri dan operasionalnya melalui institusi yaitu sebagai penyelenggara aktivitas ekonomi, instrumen yang digunakan yaitu fiskal, moneter, *exchange rate* untuk *social goods*, dan pola alokasi sumberdaya apakah melalui *command* atau pasar, tersentralisasi atau desentralisasi.

Setidaknya, ada empat pendekatan lain yang digunakan untuk memahami sistem ekonomi, yaitu (1) *DIM approach*, yang menggunakan *Decision making, Information*, dan *Motivation* sebagai penentu bagaimana keputusan dibuat, dikoordinasi, dan diimplementasikan, (2) *The ownership approach* sebagai kunci pemahaman sistem ekonomi, (3) *RCP approach*, yaitu *Rules, customs, dan Procedures* yang memfokuskan pada struktur institusional dari sistem, dan (4) *RDT approach*, yaitu *Rules, Decision Making, dan Transactions.*

Catatan yang penting diperhatikan adalah bahwa sistem ekonomi, meskipun fundamental adanya, juga tidak terlepas dari variabel lain sebagai penentu kinerja perekonomian. Bagaimanapun, jika sistem ekonomi merupakan landasan idealnya, ia perlu diinstitusionalisasikan dan diinstrumentasikan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkannya.

> "Saya juga tidak menyalahkan sistem-sistem itu sebab yang membuat sistem ekonomi atau tidak adalah faktor-faktor lain pula, seperti kualitas aparatnya, dedikasi serta mentalitas para pejabat dan pelaksana, stabilitas dan pimpinan politik, gangguan dan bantuan-bantuan dari luar, dan sebagainya" (M. Sadli, 19720.

Memang demikian adanya. Bahwa faktor-faktor yang menentukan kinerja perekonomian tidak hanya sistem ekonomi semata. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan Koopmans-montias framework, akan tampak bahwa *economic performance* setidaknya ditentukan juga oleh kebijakan pemerintah dan faktor lingkungannya, selain juga sistem ekonomi.

$$n(o) = n\,[f(e, s, ps)]$$

Dimana:

o = *economic outcomes*,

n = *weighted by norm*

e = *enviroment factor*,

ps = *government policies atau political economy*

Kurang lebih serupa dengan Koopmans-Montias framework di atas, Stuart & Gregory menyatakannya dengan persamaan berikut:

$$O = f(Es, Env, Pol)$$

Dimana

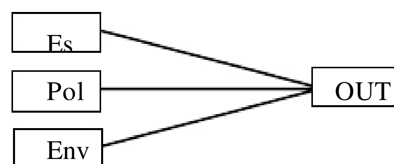
O = *output,*

Es = *Economic System*

Env = *Environemnt*

Pol = *Policies pursued by economic system*

Secara diagramis, model di atas digambarkan sebagai berikut:



Kalau dilihat lebih lanjut, setiap variabel sebenarnya dapat mempunyai korelasi satu sama lain. Sebab, dinyatakan pula bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi di antaranya adalah faktor tingkat pembangunan ekonomi yang dinyatakan dengan berbagai indikatornya, faktor sosial dan budaya seperti ideologi dan agama, dan juga faktor lingkungan macam populasi serta demografi (Bernstein, 1994). Sebagai contoh, tingkat pembangunan ekonomi sebagai *economic outcomes* akan mempengaruhi sistem ekonomi, pada saat sistem yang digunakan ditinjau kembali. Melalui berbagai indikator kinerja tersebut akan dievaluasi apakah sistem ekonomi yang digunakan dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Ketika China melihat bahwa sosialisme tidak efektif untuk perkembangan ekonomi yang diharapkan, maka negara ini pelan-pelan beralih ke kapitalisme. Hal yang sama juga terjadi di Rusia.

III. Normativisme Dalam Sistem Ekonomi

Jelas bahwa sistem ekonomi mempengaruhi kinerja perekonomian. *Economic outcomes* atau kinerja perekonomian dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Ilmu ekonomi cenderung menitikberatkan pada ukuran kualitatif, karena terpengaruh pandangan Newtonian-cartesian. Lihat saja, yang dipakai biasanya adalah ukuran-ukuran seperti pertumbuhan *(growth), level output*, effisiensi – statis maupun dinamis, stabilitas harga *(inflation)* dan seterusnya.

Padahal sistem ekonomi yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu sosial lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan pada sistem nilai tertentu pada pandangan tenang hakikat manusia tertentu, pada seperangkat asumsi yang disebut Schumacher sebagai meta-ekonomi karena tidak pernah dimasukkan secara eksplisit pada ekonomi kontemporer. Ekonomi kontemporer, dengan tujuan memberikan keketatan ilmiah pada disiplinnya, telah menghindari isu nilai tersebut. Berkecenderungan kuat untuk menjadi positivis, menjauhkan betul dari normativisme.

Penghindaran isu yang terkait dengan nilai itu telah menyebabkan ahli ekonomi mundur ke masalah-masalah yang lebih mudah tapi kurang relevan, dan menutupi pertentangan-pertentangan nilai yang terjadi dengan mengguankan bahasa teknis yang panjang lebar. Pilihan-pilihan sosial dan moral beralih menjadi sekedar pilihan yang bersifat pseudo-teknis yang diam-diam menyembunyikan konflik nilai tersebut.

Seperti telah disebut diatas, nilai yang muncul dalam model ekonomi belakangan ini hanyalah nilai kuantitatif yang cenderung mengabaikan faktor sosial psikologis, filosofis, dan juga budaya. Model kuantitatif abstrak yang pada akhirnya justru akan membuat kesenjangan antara teori dan realitas. Fukuyama, mengatakan – dengan menyebut

diantaranya Milton Friedman, Gary Becker, dan George Stigler – bahwa mereka, katakanlah, delapan puluh persen benar. *Eighty percent correct*. Telah membongkar "kebenaran" (atau kebetulan, betul=kebenaran?) penting tentang uang dan pasar karena model fundamental yang rasional, tingkah laku yang *self-interest* telah menyumbang delapan puluh persen sepanjang waktu. Tapi ada *"The Twenty Percent solution"* yang tertinggal, yang tidak diberikan *neoclassical economics*. Padahal Adam Smith pasti mengerti betul kalau ekonomi terkait dengan kehidupan sosial, tidak dapat dipahami jika terpisah dari kebiasaan, moral, dan tingkah laku masyarkat. Lihat saja *"The Theory of Moral Sentiments*" yang ditulis Adam Smith.

Karena itu, evaluasi kembali atas keseluruhan landasan konseptual dan melakukan perancangan ulang menjadi sangat penting. Pengujian kembali konsep dan model ekonomi yang perlu mengintegrasikan sistem nilai yang mendasari dan mengenali hubungannya dengan konteks budaya.

Sebagai contoh, Schumacher menggambarkan ketergantungan sistem ekonomi pada nilai dengan membandingkan dua sistem ekonomi yang mempunyai nilai dan tujuan yang berbeda sama sekali. Yang pertama, sistem materialis, dimana standar hidup diukur dengan jumlah konsumsi tahunan dengan tujuan konsumsi maksimum melalui pola optimalisasi produksi, yang kedua, disebutnya sistem ekonomi budha, yang didasarkan pada pengertian 'mata pencaharian yang benar" dan "jalan tengah" yang tujuannya kesejahteraan manusia yang maksimum dengan pola konsumsi optimal (Schumacher, 1975).

Dengan demikian, sistem ekonomi sebagai satu landasan penting dalam pembangunan ekonomi sudah seharusnya mengintegrasikan positivisme dan normativisme. Antara pertimbangan rasional dan nilai atau moral. Di samping juga tidak melepaskan dari kenyataan historis-aspiratif, filosofis, dan faktor manusianya. Malah, Soedjatmoko menekankan betul tentang faktor manusia dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Faktor agama dan dorongan pembanguanan ekonomi juga menjadi bahasannya.

IV. Menuju Pengertian Kapitalisme Religius

A. Kilas Balik : Pemikiran Thomas Aquinas, Ibn Taymiyya, Ibn Khaldun, dan Max Weber

Sistem ekonomi yang terkait dengan semangat religius, yang menghindarkan manusia dari keterasingan akibat sekularisme, dapat ditelusuri pada pemikiran Saint Thomas Aquinas (1225-1274) Max Weber (1905) untuk Kristen. Dan pada pemikir Islan terdapat di antaranya adalah Syed Nawab Haider Naqwi dan Masudul Alam Choudury. Secara ringkas akan diuraikan pemikiran-pemikiran Ibn Taymiyya, Ibn Khaldun, dan Max Weber yang terkait dengan sistem ekonomi.

Saint Thomas Aquinas. Seorang pendeta yang secara sistematis mempresentasikan teologi, moral, sosiologi, dan prinsip ekonomi yang dipengaruhi pendekatan Aristotelian. Pemikirannya yang komprehensif dengan struktur pemikiran yang merekonsiliasikan filsafat dan agama dituangkan dalam "*Summa teologica*". Di dalamnya terdapat doktrin pemikiran ekonomi yang menyangkut kepemilikan pribadi, *the just price*, tentang *distributive justice*, dan larangan *rente (usury)* atau *improper gains*.

Thomas Aquinas mendukung kepemilikan pribadi dengan dasar pemikiran bahwa hal tersebut sesuai dengan hukum alam menurut alasan kemanusiaan, untuk menfaat kehidupan manusia. Dikatakan pula bahwa *private production* akibat pengakuan *private property* memberikan stimulus yang lebih besar untuk aktivitas ekonomi dibandingkan dengan produksi bersama. Meski demikian, tidak lantas menjadi kepemilikan yang tidak terbatas seperti hukum Romawi. Aquinas merefleksikan ide *stewarship of wealth*. Bahwa yang lain memiliki hak untuk dibagi. Aquinas memperbolehkan pula pengaturan pemerintah untuk barang publik. Kemudian Aquinas mengakui pula pentingnya kegiatan komersial dan tindakan yang realistik dari adanya insentif. Yang dipermasalahkan Aquinas dalam "*Summa Teologica*" adalah tentang "*just price*", dengan pertanyaan, "*Whether a man may lawfully sell a thing for more than it is worth?*". Profit, dalam hal ini yang moderat, diperbolehkan jika pedagang mempunyai maksud terhormat, seperti *self support, charity*, dan *public service*. Karena Aquinas tidak memberikan spesifikasi nilai suatu barang yang katanya tidak bisa ditetapkan secara matematis, maka yang dimaksud dengan "*just price*" adalah harga berlaku yang terjadi di suatu tempat pada saat tertentu, yang ditentukan oleh perkiraan yang wajar *(fair-minded estimate*). Selanjutnya Aquinas melarang apa yang disebut *improper gains* yang dianggap sebagai rente.

Ibn Tamiyyah. Beliau merupakan seorang fuqaha, ahli hukum Islam, filosof, dan juga ekonom. Karya yang mempresentasikan pandangan-pandangan ekonominya adalah *"al-Hisha fi'l Islam"*. Karyanya ini kemudian banyak diulas oleh pemikir ekonomi Islam kontemporer. Sebut misalnya Sherwani (1956), Ilyas Ahmad (1961) Islahi (1980) dan Kahf (1982).

Dengan menggunakan Qur'an dan Sunnah sebagai sumber yurisprudensi utama, Ibn Taymiyyah mendiskusikan dan menganalisa peranan *al-hisba*, *market supervisor* (pengawas pasar) dan pengembangan serta ciri kewajiban pemerintah. Dalam hal ini pemerintah seharusnya berperan dalam mendorong dilaksanakannya aturan main *(code of conduct)* yang Islami sehingga produsen, pedagang, dan agen ekonomi yang lain berlaku jujur dan adil dalam melakukan transaksi. Harus dapat dipastikan bahwa di pasar terjadi kompetisi yang adil, *even playing field*, sehingga bebas dari manipulasi dan eksploitasi. Menjadi kewajiban pemerintah juga untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pada pasar yang demikian, Ibn Taymiyya mengajukan konsep "*price of eqivalent"* yang menjadi dasar "*reasonable profit* ". "*Price of equivalent"* adalah konsep pragmatis yang dapat

ditentukan dengan mempelajari kondisi pasar. Harga ditentukan *dalam a merket free of imperfection* (Kahf, 1982) melalui kekuatan *supply* dan *demand* (Siddiqi, 1982). Pandangannya tentang *market supervision* ini dilatari oleh kepeduliannya yang sangat besar pada keadilan dan *fair play*. Pandangannya tentang hak kepemilikan dapat dikatakan menggunakan pendekatan *individualism conscious of mutual responsibilities*. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, beberapa pengulasnya mengatakan bahwa pemikiran Ibn Tamiyya kurang lebih sejajar dengan konsep modern *welfare state*.

Ibn Khaldun. Sering dikatakan sebagai ekonom terbesar Islam, selain sebagai seorang sejarawan dan filosof. Karyanya yang monumental, *"Muqaddimah"*, atau *"The prologema"* atau *"The Introduction"* dikerjakan selama empat tahun (1375-1379). Analisisnya yang hati-hati memberi kontribusi atas study tentang penyebab *underdevelopment*. Ciri khas dalam melakukan pendekatan terhadap persoalan ekonomi adalah kesediannya untuk menggunakan pertimbangan berbagai faktor seperti geografis, etnik, politik, dan sosiologis dalam situasinya. Beliau tidak membatasi pada apa yang disebut faktor ekonomi saja. Dapat dikatakan sebagai peletak awal analisis yang holistik dan integratif.

Lingkup pemikirannya meliputi teori nilai, hukum *supply* dan *demand*, produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan, uang dan modal, *division of labor*, *capital formation* dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, *public finance*, dan tanggung jawab ekonomi pemerintah. Rekomendasi kebijakannya didasari oleh analisisnya atas apa yang terjadi dengan mendasarkan pada *"the dictates of reason as well as ethics"*, menunjukkan pertimbangan positif sekaligus normatif.

Yang diambil di sini adalah terkait dengan sistem ekonomi. Tentang mekanisme alokasi sumber daya, hak kepemilikan, dan institusi pengaturan. Ibn Khaldun menekankan pentingnya kepemilikan pribadi dan efisiensi ekonomis. Ibn Khaldun mendahului pemikiran Adam Smith dalam beberapa hal, yaitu *division of labour* dan *free market system*. Beliau menentang intervensi pemerintah dan mempercayai efisiensi pasar bebas. Berikut dikutip dari *Muqadimah*:

> *"Know then that the arbitrary appropriation by the government of men's property result in loss all incentives to gain, when man realize that what they have accumulated will be taken away from them. A loss of incentives will lead to slckening in enterprise, the slackening being proportional to the extent and degree of confiscation. Thus if there will be a general slackening owing to the feeling that no branch offers any longer hope of gain. If however confiscation be mild, there will only relatively slightly falling off in economic activity.*" (halaman 48).

Ibn Khaldun mengakui peningnya institusi pengaturan dalam hal pembuatan kebijakan, pembuatan keuangan publik dan penjaminan dipenuhinya kebutuhan masyaraka. Berarti tidak untuk intervensi pasar dalam hal penentuan harga yang ditentukan

supply dan *demand*. Karena, *"God is the controller of the price"*. Dalam hal dorongan atau insentif tindakan, seperti telah disebutkan diatas, tidak diragukan lagi bahwa Ibn Khaldun menekankan baik alasan rasional maupun moral.

Max Weber. Sangat jelas bahwa Weber, dalam *"The protestant Ethics and the Spirit of Capitalism"*, mendukung gagasan, semangat, dan mentalitas kapitalisme yang bersumber dari ajaran agama. Manusia ditunjukkan sebagai *homo economicus*, yaitu konsep yang dari dulu hingga sekarang dalam hal penugasan kehidupan ekonomi adalah sesuai. Bahwa tujuan hidup adalah mendapatkan kemakmuran dan kekayaan yang digunakan untuk tugas melayani Tuhan.

Weber mengambil ajaran Benyamin Franklin sebagai poros berkembangnya mentalitas kapitalis, yaitu sikap memperhatikan kehidupan dengan berlaku hati-hati, bijaksana, rajin, dan bersungguh-sungguh dalam mengelola bisnis. Segi utama dari kapitalisme modern adalah memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya dikombinasikan dengan menghindari secara ketat terhadap pemakaian untuk bermewah-mewah. Prinsip ini mengungkapakan suatu tipe perasaan yang erat hubungannya dengan pemikiran keagamaan. Selanjutnya Weber menunjukkan suatu masyarakat yang sudah diwarnai oleh sifat mental kapitalis akan nampak pada kehidupan yang diarahkan pada alat produksi pribadi, perusahaan-perusahaan bebas, penghematan uang, dan mekanisme persaingan dan rasionalisasi pengelolaan bisnis.

B. Pengertian Kapitalisme Relegius

Pengertian kapitalisme relegius dengan demikian berangkat dari dasar pemikiran yang sifatnya filosofis, moral, etis, sekaligus rasional. Definisi yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

> *Kapitalisme religius adalah sebuah free market enterprise system dimana aktivitas ekonomi parapelakunya – yang meliputi produksi, alokasi, konsumsi, dan distribusi kekayaan- dituntun oleh etika, moral, dan semangat keagamaan.*

Dapat dikatakan bahwa kapitalisme relegius adalah sistem ekonomi yang holistik yang dituntun oleh prinsip, nilai, dan norma etika agama yang dibangun atas dasar keadilan dan kebaikan *(al-adl wa'l ihsan)* bagi kemanusiaan. Tidak sekedar mekanisme aktivitas ekonomi yang mengatur alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan material dan fisik masyarakat, tapi juga untuk melengkapi kebutuhan spiritual dan intelektual.

Dengan demikian, dalam kapitalisme relegius pun diupayakan suatu optimisasi pengunaan sumber daya yang ramah lingkungan dengan memperhitungkan generasi mendatang, manajemen fiskal yang disiplin, dan adanya agenda kepedulian sosial yang melembaga.

Menjadi konsep yang berada pada jalur tengah adalah harapannya. Sesuai dengan pengertian *"awsatuhaa"* dalam Islam, atau *"chun yang"* dalam Confusius, atau *"golden mean"* yang dimaksudkan Aristoteles.

C. Prinsip dan Ciri Kapitalisme Religius

Prinsip yang kemudian terefleksi pada ciri dari kapitalisme religius yang akan diuraikan meliputi pandangan tentang manusia dan hubungannya dengan Tuhan sebagai dasar filosofis, pandangan atas kepemilikan pribadi, insentif yang mendorong tindakan, mekanisme alokasi, serta peran pemerintah dalam hal pemerataan keadilan (*distributive justice*).

Tentang Manusia dan Hubungannya dengan Tuhan. Sistem ekonomi tidak lepas dari filosofi kemanusiaan yang melatarinya. Adalah fakta bahwa sumber fenomena ekonomi dan sosial adalah manusia. Kondisi sosioekonomis dengan demikian diturunkan dari tindakan individu-individu dalam masyarakat. Maka, tindakan individu-masyarakat merupakan manifestasi dari moralitas, dan penampakan kasat mata tidak terpisahkan dengan kesadaran nilai dari dalam.

Kapitalisme religius memiliki filosofi pengembangan kemanusiaan yang sekaligus menjadi asumsi yang melatarinya. Manusia dalam sistem ini dalam bahasa confusianism adalah *chun tzu (perfect man)* atau *jen (superior man)* yang loyal terhadap moral dan memperlakukan yang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Dalam tradisi Islam dikenal konsep *insah salih* atau *insan kamil (the virtuous/perfect man*) sebagai wakil Tuhan di muka bumi, *khlaifa Allah Fil-ard (God vicegerent on earth).* Atau dalam konsep manusia Kristen adalah *Imago Dei* atau *Pontifex,* yang menjembatani dunia dan akhirat. Asumsi ini adalah cita-cita untuk mencapai kemuliaan kemanusiaan, *dignitiy of man*. Sebagai sebuah keindahan yang tidak terbandingkan. Seperti yang diekspresikan Shakespeare dalam *"Hamlet"*:

> *What piece of work is a man! How noble in reason! How infinite in faculty! In form, in moving, how express and admirable! In action how like an angel, in apprehension how like a god! The beauty of the worl! The paragon of animal!* (Act II, scene ii).

Aspek lain yang perlu dikemukakan adalah bahwa manusia memiliki pula etika kehendak bebas sebagai individu maupun secara kolektif. Untuk memilih berbuat baik atau buruk. Etika kehendak bebas ini diimbangi dengan pertanggungjawaban, *amanah* atau *accountability*.

Pandangan tentang Property Right. Tampaknya sistem ekonomi dibangun atas basis kepemilikan yang mengambil dua dimensi: (1) moral atau spiritual atau relegius, dan (2) material. Pada permukaannya tampaknya kedua dimensi ini berada dalam konflik tak terhindarkan, tapi akan tetap hadir bersamaan *(coexist)* selama kegiatan ekonomi dilakukan

dari produksi, alokasi, dan dan distribusi. Keseimbangannya bisa diwujudkan dengan filosofi realitas Tao, yaitu *yin* dan *yang*.

Dengan demikian, kapitalisme religius tidak menolak kepemilikan pribadi. Tapi kepemilikannya kemudian tidak lantas tidak terbatas, seperti pemikiran Aquinas dan Ibn Taymiyyah dan juga Ibn Khaldun. Dapat ditegaskan bahwa konsep kepemilikannya adalah terbatas dan relatif *(limited and relative ownership).* Bahwa pemilik dari segala pemilik adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Persoalan Insentif. Ilmu ekonomi dapat dirangkumkan dalam satu kalimat, *"people responds to incentives"*. Dalam kapitalisme religius, dari konsep kepemilikan yang telah dijelaskan di atas, telah jelas bahwa pertimbangan yang menjadi dorongan adalah *reason* sekaligus *ethics*. Rasional dan juga intuitif. Positif sekaligus normatif.

Pandangan tentang Mekanisme Alokasi. Market orientation sebagai penggerak kapitalisme didorong betul. Seagaimana pula yang dijelaskan Ibn Khaldun, peradaban Islam ditandai dengan kuatnya semangat komersial dengan dorongan pasar. Dengan demikian, telah pula terlihat dari pemikiran Aquinas maupun Ibn Taymiyyah, bahwa kegiatan komersil tidak dilarang. Kekuatan pasar, faktor *demand* dan *supply* yang akan efisien, *free of imperfection*, akan mendorong terbentuknya *"just price"* ataupun *"price equivalent"*. Ditemukan pula bahwa terdapat kesamaan adanya pelarangan kegiatan rente, *usury* atau riba. Pembuktian yang komprehensif secara teoritis atas rasionalisasi pelarangan usury atau riba, termasuk di dalamnya pelarangan *interest rate*, dibahas oleh Umer Capra dalam *"Towards Just Monetary System"* (1985), dan juga Masudul Alam choudhury, dalam *"Contributions to Islamic Economic Theory: study in Social Economics"* (1986).

Tentang Peran Pemerintah dan Distributive justice. Meski kapitalisme religius menekankan betul peran pasar, terdapat pula institusi pemerintah atau *hisba* untuk mengawasi terjadinya aktivitas ekonomi secara adil, dan mencegah terjadinya manipulasi, eksploitasi, dan monopoli. Campur tangan atas penentuan harga tidak diperlukan dengan asumsi efisiensi pasar, *free of imperfection* atau *competition on even playing field*. Pemerintah mengambil tindakan saat terjadinya *market failure* akibat dilanggarnya *code of conduct* yang bermuatan moral dan semangat religius. Yang sangat patut dicegah adalah terjadinya *government failure* yang akan membuat ketidakseimbangan makin parah. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan yang diambil tetap harus dikembalikan pada pertimbangan rasional dan etis.

Perintah agama untuk mencegah akumulasi kekayaan yang berputar hanya pada sebagian golongan saja memberikan konsepsi tentang *distributive justice.* Instrumen yang dapat digunakan dalam hal ini, sebagaimana yang telah dicontohkan, adalah pajak dan atau *zakat* (yang sifatnya wajib) dan *waqaf* (*charity*, yang sangat dianjurkan). Dengan demikian,

kapitalisme religius semestinya diinstrumentasikan dengan kebijakan publik yang hati-hati dan membawa manfaat bagi banyak pihak *(maslahah mursalah).*

V. Argumentasi-argumentasi Kapitalisme Religius

Pada bagian ini akan dibahas argumentasi-argumentasi atas pertanyaan mengapa kapitalisme religius?". Dengan mencoba melakukan kajian faktor filosofis, historis, dan juga yang bersifat futuristik.

A. Kajian Filosofis dan Peranan Semangat Religius dalam Ekonomi

Tampaknya, kapitalisme dan semangat religius dianggap sebagai pasangan yang ganjil. Sesuatu yang kontradiktif yang tidak mungkin disintesakan. Seperti halnya politik dan moral yang dikatakan Machiavelli. Kapitalisme telah menjadi kata yang berarti buruk, sebagaimana politik. Konotasi menghina ini tidak begitu jelas, tapi paling tidak serangan-serangan Marx terhadapnya merupakan penyebab penting. Sementara agama di sisi lain, dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan suci, sehingga tidak bisa dicapuradukkan dengan kehidupan duniayang penuh kekotoran.

Yang satu membawa ajaram materialistik,yang satu lagi mengajarkan spiritualitas yang berhubungan dengan Realitas Tertinggi. Yang pertama mengajarkan rasionalitas, yang kedua dianggap intuitif. Sejajar pula dengan ilmu positif dan ilmu normatif.

Tetapi dapat saja keduanya disintesakan. Dengan dialekstika tesis dan antitesis Hegelian. Dengan memandang kapitalisme sebagai tesis dan semangat religius sebagai antitesisnya, diharapkan menghasilkan kapitalisme religius yang diusulkan.

Filsafat I Ching tentang realitas Tao juga dapat dipakai sebagai pertimbangan. Tao sebagai suatu proses kosmik aliran dan perubahan yang terus-menerus. Dimana ada dua kutub yang membatasi perubahan tersebut, *yin* dan *yang*. Dua kutub atau kategori yang berlawanan yang merupakan satu kesatuan tunggal membentuk keseimbangan dinamis antara *yin* dan *yang*. Sesuatu yang baik bukanlah *yin* ataupun *yang*, tetapi keseimbangan dinamis antara keduanya. Sementara yang buruk atau yang mengganggu adalah ketidakseimbangan antara *yin* dan *yang*. Maka kapitalisme religius, semestinya adalah keseimbangan antara intuisi *(yin)* dan rasional *(yang),* antara normatif *(yin)* dan positif *(yang).*

Pada saat ketidakseimbangan yang terjadi, misalnya kapitalisme yang lebih dominan, maka yang timbul adalah kehidupan materialis dan kegersangan spiritualitas karena mengedepankan rasionalitas. Pada saat semangat religius yang lebih dominan sering kali ditudking terjadinya fatalisme, pasivisme, dan mistikisme serta kepercayaan buta tanpa dasar rasional.

Kalau kemudian muncul kritik bahwa sebenarnya kapitalisme dan sosialisme pun dapat melalui sintesa hegelian maupun realitas Tao, sehingga katakanlah menghasilkan *mixed system* atau *Market Socialism*, maka argumen balasan yang bisa dikedepankan adalah bahwa sintesa macam tersebut bukanlah bentuk ideal yang bisa dicapai. Alasannya adalah bahwa *under capitalism man exploits man, under socialims it's just the reverse*. Apa yang harus disintesakan dari hal yang tidak berbeda? Kemudian, keduanya masih mengedepankan rasionalitas karena yang melandasinya adalah sekulerisme. Sintesa tersebut masih belum bisa menghubungkan manusia kepada tujuan tertingginya, Realitas Tunggal.

Maka bila kita bicara tentang tujuan masyarakat yang lebih luas, kita benar-benar bicara tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menyangkut masalah-masalah manusia, masyarakat, dan arti kehidupan dalam hubungannya dengan agama. Kemampuan terbatas dari ideologi-ideologi keduniawian yang secara efektif digunakan untuk mengerahkan tenaga-tenaga pendorong di dalam bagian masyarakat tradisional kita ini, memiliki syarat yang berupa hubungan-hubungan tak terpisahkan dari nilai-nilai dan sikap budaya di dalam masyarakat kita dengan kepercayaan agama yang kompleks itu (Soedjatmoko, 1984).

Sehingga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang didasari oleh sistem ekonomi yang kokoh, diperlukan penggiatan dorongan-dorongan yang mendasar. Dorongan mendasar tersebut tertanam dalam acuan budaya agama. Lagi pula, agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia di dunia, baik dalam persoalan makro maupun mikro. Karena itu diperlukan "pembumian" ajaran langit. Dalam artian pengamalan agama dalam segenap aspek kehidupan manusia, termasuk persoalan ekonomi. Dengan demikian, sekulerisme sudah jelas ditolak karena hanya akan menimbulkan *alienasi* (keterasingan) secara individual maupun masyarakat.

Yang kemudian diperlukan adalah penafsiran ajaran agama secara teoritis faktual sebagai dasar pengamalan, untuk insitusionalisasi dan instrumentasi ajaran. Menurut Muhammad Iqbal, periode kehidupan religius melalui masa *faith* (kepercayaan), kemudian *thought* (pemikiran) dan lantas *discovery* (penemuan). Penemuan ini adalah sampainya manusia pada Realitas Tertinggi (M. Iqbal, 1984). Dengan demikian, pada saat ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris mulai menyeimbangkan diri norma, pada saat yang sama, ajaran agama pun diterjemahkan secara rasional. Catatannya adalah bahwa agama tetap mengakui baik pengalaman empirik dan spiritual sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Agama menekankan pengetahuan, bahkan melebihi modal. Sebagaimana dikutip Anwar Ibrahim (Asia Renaissance, 1997) adalah Ali Ibn Abi Tahlia yang berkata :

"Ya Kamil! Knowledge is better than wealth; for knowledge watches over you whilst you have

to watch over your wealth. And knowledge governs while wealth is governed. Wealth diminishes with spending but knowledge increases therewith"

Kalau diteliti, dapat ditafsirkan bahwa *knowledge-based* sebagai sumber utama kesejahteraan, sebagaimana masa modern belakangan (post-industrial), telah diisyaratkan sejak dulu. Dengan demikian, agama mendorong bangkitnya etik ekonomi.

Sebagaimana dahulu Weber menjelaskan etika Protestan dan semangat kapitalismenya. Bahwa semangat kapitalisme terdapat dalam ajaran Protestan. Dimana tujuan hidup adalah untuk mendapatkan kemakmuran dan kekayaan untuk melayani Tuhan. Dengan sikap sehari-hari yang bijaksana, rajin, dan bersungguh-sungguh dalam mengelola bisnis. Yang berarti pula sikap pencarian keuntungan yang rasional, efisien dan sistematis dengan penghitungan yang cermat dan berdasarkan situasi ekonomi yang diharapkan.

Dalam hal ini, Afzalur Rahman dalam "Muhammad sang Pedagang" juga mencoba menekankan bahwa Islam menekankan betul etos ekonomi untuk berusaha dan memperoleh keuntungan. Muslim didorong untuk memperoleh karunia Tuhan (rezeki dari hasil perniagaan) di muka bumi. Beberapa ayat Qur'an dan hadist menunjukkan hal tersebut. (liaht misalnya QS. 28:7). Kewajiban dalam Islam semacam *zakat, shadaqah, waqaf, qurban*, dan juga haji secara implisit menyuruh muslim untuk menjadi "orang kaya". Karena mereka yang mempunyai kelebihan kekayaan sajalah yang dapat menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut.

Bagian kajian hisotris akan juga menunjukkan bagaimana masuknya pengaruh Islam memberi dorongan terhadap etos ekonomi masyarakat Indonesia.

B. Kajian Historis atas Etos Ekonomi Masyarakat Indonesia

Kebudayaan Indonesia asli sebelum masuknya kebudayaan Hindu – India dalam hal ekonomi bersifat *bedarfsdeckung* seperti yang dikatakan Werner Sombart. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terbatas. Akumulasi modal melalui usaha yang efisien dan rasional tidak menjadi tujuan. Jika keperluan hidup telah didapat, biasanya orang lantas berhenti bekerja. Etos ekonomi yang demikian tidak dapat diharapkan untuk perkembangan pembangunaan ekonomi. Organisasi kebudayaan asli sebagai gotong-royong dan kekeluargaan, yang banyak dipuji-puji pemimpin ekonomi dan politik itu, hingga sekarang ternyata tidak berhasil mendorong bekerjanya ekonomi secara modern dan efisien. Bahkan kalau perlu, *crony capitlism* dapat dicurigai berawal dari sini.

Perkembangan kebudayaan Indonesia-Hindu setelah datangnya agama Hindu membawa suatu corak baru, yaitu kebudayaan feodal dengan staratifikasi masyarakat berdasarkan tingkatan nilai tertentu. Dalam hal ini adalah golongan yang berbeda

berdasarkan keturunan. Kekuasaan politik timbul dari tatanan hierarkis-feodal tersebut. Sementara kaum pengrajin, petani dan saudagar *(entrepreneur),* yaitu kaum yang produktif dalam ekonomi, menempati kedudukan yang rendah. Kasta ketiga atau keempat, *waisya* atau *sudera.* Etos ekonomi dari kebudayaan terbukti pula kurang dipentingkan. Suasana hierarkis-feodalistik lebih mementingkan kehalusan hidup budaya keraton dan istana, suasana seni dan pemikiran mistik, yang menjauhi kenyataan hidup dan memandang rendah pekerjaan kasar, yang bersifat ekonomis dan mengumpulkan kekayaan atau modal.

Kemudian datanglah Islam. Kebudayaan Islam – Arab yang datang dipengaruhi oleh budaya Semit dan juga budaya Yunani. Yang terakhir disebut ini diakui mementingkan makna hidup duniawi dan rasionalitas. Islam yang datang ke Indonesia melalui para saudagar atau pedagang menunjukkan bahwa etos ekonomi memperoleh penghargaan yang cukup layak. Clifford Geertz menunjukkan bahwa kehidupan santri sebagai salah satu golongan masyarakat Jawa dengan pengaruh Islam, berhubungan dengan perdagangan dan industri (The Religion of Java, 1960). Keuntungan ekonomi suatu etik agama yang mendorong kehematan, kerja keras, dan usaha perseorangan, yang ditambah pula dengan bentuk pendidikan yang cenderung mendidik untuk organisasi kerja yang lebih rasional dibandingkan tradisi kaum abangan. Bahkan golongan haji dipersamakan dengan orang kaya. Terbukti pula sampai sekarang, bahwa golongan haji atau santri masih mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan ekonomi, meskipun makin kalah oleh golongan keturunan Cina. Hal ini, bahwa Islam yang datang ke Indonesia dapat memberi semangat ekonomi, ditunjukkan pula oleh Sutan Takdir Alisyahbana dalam *working paper* tahun 1972 berjudul:"Pembangunan Ekonomi dan Etik Ekonomi Islam".

Sekali lagi, organisasi kebudayaan asli sebagai gotong-royong dan kekeluargaan, yang banyak dipuji-puji pemimpin ekonomi dan politik itu, hingga sekarang ternyata tidak berhasil mendorong bekerjanya ekonomi secara modern dan efisien. Bahkan kalau perlu, *crony capitalism* dapat dicurigai berawal dari sini. Atas dasar ini pula penulis menolak Sosialisme Religius yang dikatakan Sri Edi Swasono bisa diterima oleh kita semua (lihat: Sri Edi Swasono, "Ekonomi Indonesia: Soasialisme Religius", 1981).

Kalau kemudian dikatakan bahwa dengan mendasarkan pada penjelasan Bung Hatta, sosialisme timbul karena suruhan agama, maka sudah ditunjukkan pula bahwa beberapa prinsip kapitalisme pun merupakan suruhan agama. Dalam hal ini adalah perintah untuk mencari karunia (kekayaan) dan bekerja keras serta menjalankan usaha secara rasional. Bahwa sosialisme timbul dari sumber masyarakat kita sendiri yang bercorak kolektif, maka seperti yang disinyalir Kuntjaraningrat dan juga Sutan Takdir Aslisyahbana, ini malah menghambat kemajuan ekonomi. Karena *need of affiliation* yang lebih besar dibanding *need of achievement*. *Need of achievement* yang dijelaskan David Mc Clelland sebagai asal-usul tumbuhnya masyarakat dan ekonomi entrepreneur yang nota bene adalah ekonomi kapitalis

jadi kurang berkembang. Atau dapat saja kita buat tambahan kemungkinan bahwa *crony capitalism* adalah bentuk lain sosialisme yang beradaptasi dengan tekanan pasar.

C. Kajian Futuristik tentang Masa Depan Kapitalisme dan Semangat Relegius

Kapitalisme masih akan bertahan. Bahkan Pak Francis Fukuyama berani menyatakan sebagai *the end of history*. Secara konvergen dan virtual, setiap negara mengadopsi atau berusaha mengadopsi ekonomi yang *market-oriented* dan terintegrasi menuju kapitalisme global. Alasannya jelas, meningkatnya kompleksitas dan intensitas informasi kehidupan modern pada saat yang bersamaan membuat *centralized planning-economy* menjadi sangat sangat sulit, kalau tidak mau dikatakan tidak memungkinkan. Tulisan Leonard E. Read, *"I Pencils"* secara provokatif tapi mengasyikan, menunjukkan kesangatsulitan pengaturan tersebut. Sistem kapitalisme pasca perang dunia kedua juga telah menjadi *natural stopping point*, yang mendorong banyak negara agraris dan industri untuk mengejar ketertinggalannya dari Amerika. Alasan selanjutnya dalah kegagalan yang dialami komunisme. Sepertiga masyarakat dunia yang menggunakan ekonomi komunis telah memutuskan untuk bergabung dengan sistem kapitalisme.

Memang masih kapitalisme. Tapi kapitalisme pun mengalami perubahan. Kata Lester Thurow,

> *"It's still going to be capitalism, but it's going to be a very different capitalism. In oher words, we know the forces that are going to determine the future of capitalism. But we don't know is the exact shape of the future, because that's not determined by stars; it's determined by what we do". (Rethinking the future, hal 237).*

Sesunguhnya kapitalisme pun mengalami goncangan. Yang tampak dari manifestasi permukaannya sekaligus adanya perubahan fundamental yang mendalam sebagai struktur ekonomi global. Thurow merujuk pada lima kekuatan. Pertama, berakhirnya komunisme. Kedua, pergeseran dari industri yang *natural resource-based* ke industri yang *manmade brainpower* atau yang *knowledge-based*. Ketiga, faktor demografis; tumbuhnya populasi dunia yang sekaligus makin tua. Keempat, sampainya masa *genuinely global economy*. Terakhir, hilangnya dunia yang unipolar, tidak ada lagi kekuatan ekonomi dan politik yang dominan. Gesekan-gesekan kekuatan ini menimbulkan perubahan lingkungan industri, edologis, teknologis, sosiologis, psikologis, ekologis, dan seterusnya. Dalam hal ini, teknologi dan ideologi ditunjuk sebagai kekuatan utama yang besar.

Goncangan-goncangan yang demikian menimbulkan ketidakpastian yang makin besar, yang seringkali membuat masyarakat terkejut, gugup, kaget dan terbata-bata. Ujung-ujungnya krisis global. Krisis moneter global yang menyebabkan banyak negara yang juga menganut sistem kapitalisme mengalami kebangkrutan, terlepas apakah kapitalisme *erzats,*

crony, maupun tulen, Donella Meadows dalam *"Beyond the Limit : Global Collapse or Sustainable Future*", menyebut *overshooting* sebagai penyebab utama berbagai krisis yang terjadi. Dalam kapitalisme global belakangan ini, setiap sumber daya alam digerogoti, dan setiap industri berpacu dengan percepatan produksinya. Kata Meadows lagi, penyebab *overshooting* selalu sama. Adanya pergerakan dengan tempo tinggi, adanya batas dimana perubahan semestinya tidak melampauinya, dan adanya kesulitan dalam melakukan kontrol karena kelengahan, respon yang terlambat, dan momentum yang tidak tepat.

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai membuat pelaku ekonomi hanyut dalam keharusan pertumbuhan. Seolah tidak ada batas pertumbuhan, bagi pembangunan. Akibatnya adalah hilang kontrol, dan tidak dapat melihat titik-titik lemah pertumbuhan yang terlalu kuantitatif tersebut. Dalam paradigma lama ini, terdapat benih-benih krisis, yang potensial menciptakan *chaos* yang berulang-ulang di masa depan.

Paradigma ekonomi masa depan yang progresif sekaligus adil tentunya tidak dapat bertumpu pada satu model yang tidak mampu mengontrol kompleksitas yang telah diciptakannya sendiri. Dengan demikian, mengubah beberapa fondasi sistem ekonomi global diperlukan untuk membuatnya makin berbagai bantingan krisis.

Hazel Handerson mengusulkan paradigma *greenomics*, yang katanya berpandangan jauh ke depan, *beyond economics*. Beberapa ciri dari *greenomics* ini di antaranya adalah sifat yang holistik, integral, kualitatif, *win-win solution*, dengan indikator-indikator baru pembangunan yang menekankan pada tujuan sosial, investasi yang bertanggung jawab secara sosial, orientasi pada pengembangan diri ketimbang gaya hidup, produk dan konsumsi hijau dan seterusnya.

Lester Thurow dalam "The Future of Capitalism", mengatakan bahwa kapitalsime masih akan berlanjut meskipun mengalami beberapa perubahan. Ia memajukan eksperimen sosial dengan menciptakan prinsip, norma, dan aturan-aturan sosial baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi. Sehingga, semakin berkembang ekonomi dan teknologi, semakin berkembang pula komponen normatif masyarakatnya.

Usulan yang lain dimajukan Rich DeVos, yang menawarkan satu model kapitalisme yang berwajah lemah lembut dan penuh belas kasih. *Compassionate capitalism.* Kapitalisme dengan kepedulian sosial, sebagai masa depan perekonomian sekaligus relasi sosial dunia. Konsepnya digali dari pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Bahwa meskipun manusia diatur oleh nafsunya, namun ia juga memiliki kemampuan penalaran dan belas kasihan. Ia mampu mengontrol nafsu tersebut dengan penalarannya sendiri, dengan kekuatan moralnya sendiri. Tak mengapa *self-interest* dibebaskan, terutama *need of achievement* dan keinginan bersaing. *Laissez faire* tetap dikibarkan, biarkan orang bertindak sendiri. Tidak perlu ada campur tangan dalam perwujudan *self-interest* tersebut, termasuk kebaikan dan kemurahan

hati, soal kemasyarakatan dan kemanusiaan. Dengan sendirinya perbuatan mulia akan terdorong apabila orang melihat ada keuntungan di dalamnya. Nanti, hati nurani orang yang mengontrol tindakannya, karena asusmsi yang dipegang DeVos bahwa setiap orang menyimpan dorongan melakukan yang baik. Dengan demikian, kapitalisme dibangun di atas landasan hati nurani tersebut.

Landasan moral dari *compassionate capitalism* yang ditawarkan DeVos adalah perasaan simpati yang mendalam terhadap penderitaan orang lain, dan diiringi hasrat meringankan beban tersebut. Urusan bisnis dipandang sama penting dengan urusan kebajikan sosial. Kapitalis menghabiskan waktunya untuk meraup keuntungan besar, tapi pada saat yang sama menghabiskan waktu untuk melakukan kewajiban sosial.

Sebenarnya, Adam Smith pun telah menganjurkan keseimbangan antara *self-interest* (untuk persaingan, profit, dan akumulasi kekayaan) dengan pangilan hati nuraninya untuk kebaikan dan perbuatan mulia. Dengan tetap menganjurkan persaingan bebas, sebab persaingan bebaslah yang membuat kapitalisme berjalan. Juga motif memperoleh profit dan akumulasi kekayaan, karena kekayaan itu perlu untuk kesuksesan usaha dan kemakmuran bangsa.

Dengan demikian, kurang lebih juga sama dengan apa yang ditawarkan Fukuyama sebagai *the sipritualization of economic life*. Melengkapi rasionalisme neoklasik yang delapan puluh persen dengan *the twenty percent solution* yang memberi muatan semangat spiritual. Berarti proses historis manusia telah dipahami dengan keterkaitan dua kekuatan utama. Yang pertama, rasionalitas untk memenuhi kebutuhan material melalui akumulasi kekayaan. Dan kedua, keinginan untuk mencapai esensi sebagai *moral beings recognized by other human beings*.

Kalau diperhatikan, pandangan-pandangan di atas, baik dari Meadows, Handerson, Thurow, dan Fukuyama, masih terlihat sekularistik. Keterlibatan norma, nilai dan moral sekedar dihubungkan dengan keharmonisan diri manusia dan ekosistemnya. Tujuan yang lebih tinggi dapat dicapai dengan ikatan yang lebih kuat. Semangat religius yang menghubungkan manusia dengan Penciptanya, Tuhan yang Maha Esa. Tapi setidaknya, ada satu hal yang penting untuk dicatat, bahwa timbul dorongan untuk mencapai satu kesadaran yang lebih tinggi, yang mungkin selama ini cenderung dipinggirkan, dimarginalkan, dan dianggap tidak penting. Moral, etika, spiritualistas, dan semestinya: kesadaran agama!

Ini sejalan dengan salah satu tema besar yang digagas John Naisbit dalam Megatrend 2000 tentang kebangkitan agama milenium ketiga. Bahwa pada fajar milenium ketiga terdapat tanda-tanda jelas dari kebangkitan agama di seluruh dunia. Ketika orang terpukul oleh perubahan, kebutuhan akan kepercayaan spiritual yang kokoh makin kuat. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak memberi arti kehidupan. Arti hidup diperoleh melalui sastra, seni, dan spiritualitas.

Di atas telah diuraikan pula tentang peranan agama bagi pembangunan ekonomi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Namun penekanannya adalah bahwa agama menghindarkan dari sekularisme. Membuat tujuan lebih konsisten dan *sustainable.*

VI. Penutup

Masa depan tidak dapat diketahui pasti, walaupun paling tidak kita dapat melihat tanda-tandanya. Seperti kata Aristoteles, kita dapat mengubah masa depan karena kita tidak mengetahuinya: kalau masa depan sudah diketahui, maka kita tidak dapat mengubahnya. Masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini, dan semuanya dapat berharap bahwa kita dapat menjumpai hari esok yang lebih baik.

Sebagaimana ilmu ekonomi mengajarkan, kita senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan. Demikian juga dengan sistem ekonomi yang merupakan bagian dalam pembentukan hari depan yang lebih baik. Paling tidak keluar dari krisis yang sudah berkepanjangan ini. Dan berikut-berikutnya lebih siap dan lebih tahan uji dengan bermacam cobaan yang datang. Kita berurusan dengan persoalan besar, yang sangat menentukan kinerja perekonomian yang lebih sustainable tersebut. Sebagaiaman disebut didepan, pilihannya ada dua, menjalankan yang sudah ada atau menawarkan alternatif baru. Alternatif baru ini, bisa sama sekali baru, atau membuat yang sudah ada dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian yang - kalau memang perlu – sifatnya fundamental.

Yang ditawarkan disini adalah sebuah konsep yang disebut dengan kapitalisme religius yang melalui penggalian konsep-konsep klasik dari Thomas Aquina, Ibn Khaldun, Ibn Taymiyya, dan Max Weber. Yang juga disandingkan dengan kajian-kajian futuristik pemikir-pemikir kontemprer. Kejelasan konsep yang dituntut dimiliki oleh sebuah sistem ekonomi telah dicoba dijawab melalui pengkajian historis, sosiologis, dan juga filosofis. Hasilnya adalah tawaran prinsip dan ciri sebagai sesuatu yang bisa diwujudkan. Bisa jadi akan menjadi konsep yang utopis, tapi memang demikianlah nasib suatu sistem yang menurut Karl Menheim belum bisa diwujudkan. Sebagaimana dahulu kapitalisme dianggap utopis. Sebagaimana agama-agama harus menghadapi ujian untuk mencapai kejayaannya.

Pengertian dasar tentang sistem ekonomi dimanfaatkan untuk pemahaman pembahasan lanjutannya, juga untuk penyususnan konsep kapitalisme religius itu sendiri. Dari kajian historis diperoleh catatan bahwa kapitalisme ditonjolkan untuk membangkitkan daya cipta masyarakat, mendorong penguatan *need of achievement* dalam masyarakat sebagai basis pembangunan *entrepreneurial economy* yang lebih mantap. Untuk keluar dari krisis, dengan membangkitkan insentif ekonomis yang rasional yang tidak terlepas dari norma dan moralitas. Sekaligus untuk menjawab tantangan global yang ditandai persaingan yang makin tajam. Bagi bangsa Indonesia sudah sewajarnya semangat religius dibangkitkan

mengingat keanekaragaman agama yang ada dan pengaruh nilai agama yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan.

Kajian filosofis menunjukkan bahwa kapitalisme religius adalah proses dialektika dari sistem bumi dan sistem langit. Harmonisasi rasionalisme dan spiritualisme. Yang positif dengan *Yin* normatif. Pembahasan futuristik menunjukkan bahwa kapitalisme bisa jadi sebagai *end of history*. Tapi tidak lantas memberhentikan tantangan-tantangan sosial yang muncul. Kapitalisme yang mengalami perubahan, dan goncangan-goncangan. Semangat religius bisa jadi yang membuat perubahan-perubahan tersebut. Sejalan kebangkitannya di milenium ketiga ini.

Tawaran kapitalisme religius ini adalah untuk masyarakat Indonesia, meskipun tidak ada salahnya juga dimajukan sebagai salah satu kajian futuristik, sebagai sistem ekonomi global masa depan karena membawa nilai-nilai yang universal.

Sebenarnya, kita yang menentukan apa yang kita inginkan dapat diwujudkan atau tidak. Sistem apa pun itu kalau dinilai baik, perlu diupayakan untuk direalisasikan. Tentunya dengan memperhitungkan keterkaitannya dengan faktor-faktor lain yang juga signifikan dalam membawa transformasi sosial, yang dalam hal ini perkembangan ekonomi secara kualitatif maupun kuantitatif.

Atau kita menempatkan diri kita di dalam *le strategy de fatale* Baudrillard yang penuh paradoks: tidak menerima, tidak menolak, tidak mengkritik, tidak menyanjung situasi yang ada, tidak berbuat apa-apa! Peduli amat!

Kalau masih ada semangat, sperti kata Muhammad Iqbal, "mendatangkan kehidupan dari dunia sendiri, menyalakan api yang tersembunyi dalam dunia sendiri" kalau dunia yang sekarang tidak sesuai dengan keinginan kita. Entah mana yang *first best choice*, mana pula yang *second best choice*…

Daftar Pustaka

Alisyahbana, Sutan Takdir, Pemikiran Islam dalam Menghadapi Globalisasi dan Masa Depan Umat Manusia, Jakarta: Dian Rakyat, 1992.

Barney, jay B., and William Hesterly, "Organizational Economics: Understanding the Relationship between Organizations and Economic Analysis," in Handbook of Organizational Studies, by Stuart R. Clegg et al, London : Sage Pub, 1996

Iqbal, Muhammad., The Reconstruction of Religious thought in Islam, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1984.

Kunio, Yoshihara, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, Jakarta: LP3ES, 1990

Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1997.

McClelland, Daid, The Achieving Society, 1961.

Macro, Orra', et al., ed., The Economic Organization of East Asian Capitalism, California:Sage, 1997.

Naisbitt, John and Patricia Aburdene, Megatrend 2000, JakartaBinarupa Aksara, 1990

Naqvi, N. H, Ethics and Economics: an Islamic Synthesis, London, Islamic Foundation, 1981.

Okada, Konsuke, and Juro Teranishi ed., Markets and Government: In Search of Better Coordination, Tokyo: Maruzen, 1998.

Pilian, Yasraf Amir, Sebuah dunia yang Dilipat, Bandung: Mizan, 1998.

Rahardjo, Dawam, ed., Pembangunan Ekonomi Nasional, Jakarta:Intermasa, 1997.

Sadli, M. ed., Mencari Bentuk Perekonomian Indonesia Perkembangan Pemikiran 1965-1981, Jakarta, Gramedia, 1982.

Savage, Charles M. The 5th Generation Management: Integrating Enterprise Through Human networking, Digital Press, 1990.

Simon, Herbert, "Organizations and Markets:, Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 2, Spring 1991.

Soedjatmoko, Dimensi Manusia dalam Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1995.

——————————, Etika Pembebasan, Jakarta: LP3ES, 1984.

Speechler, Martin C., Perspectives in Economic Thought, Singapore: McGraw Hill, 1990.

Sudrajat, Ajat, Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Swasono, Sri Edi ed., Sistem Ekonomi dan Demokrasi ekonomi, Jakarta:UIP, 1987.

Thurow, Lester, The future of Capitalism, London; Nicholas Brealey Pub, 1996.

Zoreh, Ahghari, "The Origin and Evolution of Islamic Economic Thought", Dissertation, The Florida State University, 1991.

STUDI SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SISTEM EKONOMI ALTERNATIF

(Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru)

Nanang E. Ariadi dan Dwi Sugiarto)*

Krisis Ekonomi yang tejadi di Indonesia tidak terlepas dari pemilihan pola sistem dan strategi kebijakan ekonomi Orde Baru. Dibalik hasil-hasil spektakuler pembangunan ekonomi selama tiga dasawarsa, ternyata sistem ekonomi Orde Baru mewariskan banyak permasalahan dan kesenjangan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Terlepas dari siapa yang harus bertanggungjawab atas terjadinya krisis, yang pasti pelaksanaan proses agenda reformasi ekonomi tidak bisa tidak untuk ditunda kembali. Kebijakan ekonomi dimasa Orde Baru yang lebih mengagungkan tingkat pertumbuhan dan stabilitas daripada pemerataan ternyata telah melahirkan satu bentuk kesenjangan yang luar biasa di berbagai sektor kehidupan.

Proses pembangunan telah membawa bias keatas, hanya pada sekelompok orang yang mendapat jatah dari kue pembangunan. Akumulasi dari berbagai permasalahan dan kesenjangan yang ada ialah keterpurukan ekonomi Indonesia dalam menghadapi badai krisis yang melanda. Lemahnya fundamental perekonomian nasional dikarenakan keterpasungan kreativitas ekonomi rakyat dan ketidakpercayaan rakyat terhadap kekuatan ekonominya memberikan inspirasi tentang perlunya memikirkan kembali konsep pembangunan ekonomi yang telah ada.

Konsep Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah alternatif pemecahan dari permasalahan ekonomi yang melanda bangsa kita. Sebuah konsep sistem ekonomi yamg menawarkan prinsip-prinsip egalitarian, keterbukaan, keadilan, demokrasi dan keseimbangan yang berdasar pada hubungan Tuhan-manusia dan alam dalam menjawab problematika ekonomi umat.

---

*) Nanang E. Ariadi dan Dwi Sugiarso: Mahasiswa Program Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember.

I. Pendahuluan

Latar Belakang Penulisan

Hampir dua tahun berjalan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sejak pertengahan Juli 1997 hingga sekarang masih belum ada tanda krisis akan segera berakhir. Seperti telah diketahui umum bahwa krisis ini bermula dari krisis moneter regional kawasan Asia Tenggara, yakni saat pemerintah Thailand mendevaluasi mata uang Bath pada tanggal 2 Juli 1997 terhadap Dolar US. Akibatnya nilai tukar Rupiah merosot tajam hingga pernah mencapai Rp15.000,00 per US$ pada awal tahun 1998.

Terdepresiasinya nilai Rupiah kemudian menjalar dengan cepat menjadi krisis ekonomi secara keseluruhan di segala bidang, yang semula dirasakan terjadi pada sektor perbankan. Sehingga untuk menghadapi rentetan krisis ini pemerintah mencoba mengambil garis kebijakan mendasar yang terdiri atas empat tindakan, yakni stabilisasi moneter, pengetatan likuiditas, penghematan dan penyesuaian struktural melalui liberalisasi perdagangan dan intervensi (Saidi, 1998: 18).

Namun implikasi mendasar dari krisis ini terhadap perekonomian nasional adalah dipertanyakannya kembali thesis kebijakan perekonomian nasional yang selama ini dijalankan. Pandangan spekulatif internasional tentang Indonesia sebagai negara berkembang yang digadang-gadang sebagai *new emerging forces* dan anggota kelompok ekonomi Asia berkinerja tinggi (*high performing Asian economies*) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata di atas 6-7% per tahun selama 25 tahun terakhir menjadi runtuh oleh krisis karena lemahnya fundamental dasar perekonomian. Disamping itu, yang menyebabkan semakin parahnya tingkat krisis adalah masalah sosial lain, seperti ketimpangan atau kesenjangan yang tidak mengalami perbaikan berarti pada jaman Orde Baru kalau tidak hendak dikatakan semakin memburuk.

Lebih lanjut Faisal Basri (1995: 91) menyebutkan paling tidak ada tiga macam ketimpangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat atau bangsa dalam mencapai kesejahteraan yang bersendikan pada asas keadilan sosial. Yakni (1) kesenjangan antar daerah, (2) kesenjangan antar sektor, serta (3) kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat.

Kesenjangan pertama lebih bersifat struktural dimana penanganan dan pemecahan masalah daerah masih bersifat sentralistik. Sehingga daerah kurang memiliki keleluasaan dan kelurwesan dalam menangani serta merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam memecahkan permasalahannya sendiri. Sementara jenis kesenjangan yang disebutkan kedua lebih disebabkan oleh strategi pembangunan yang bias ke sektor perkotaan *(urban bias)* atau ke sektor moden sehingga sektor tradisional dan pembangunan daerah pedesaan relatif

tertinggal. Kesenjangan jenis yang ketiga, yakni kesenjangan distribusi pendapatan, dapat terlihat secara jelas meskipun data-data statistik yang ada menunjukkan perbaikan. Kesenjangan ini dapat dilihat dari semakin tingginya angka gini rasio sebagai tolok ukur distribusi pendapatan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Data BPS (1994) menunjukkan bahwa sampai tahun 1994 angka gini rasio perkotaan lebih tinggi dari pedesaan, artinya kesenjangan distribusi pendapatan lebih dirasakan di perkotaan dibanding pedesaan (Kuncoro, 1996: 14). Adalah benar adanya jika dikatakan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat secara agregatif (keseluruhan) mengalami peningkatan, namun ini tidak cukup menggembirakan jika diiringi oleh kesenjangan yang kian kentara, sebab hal tersebut merupakan benih-benih potensial bagi munculnya persoalan-persoalan sosial.

Dampak yang harus dibayar mahal oleh krisis ekonomi ini adalah runtuhnya kekuatan pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Bapak Soeharto sebagai Presiden Rl dan digantikan oleh Presiden Habibie yang prioritas tugasnya memulihkan kondisi perekonomian nasional menjadi lebih stabil. Berbagai kesenjangan yang ada harus menjadi agenda yang urgen dan signifikan untuk mendapat prioritas utama pemulihan stabilitas ekonomi nasional disamping agenda nasional lainnya, seperti politik.

Berkepanjangannya krisis ekonomi ini menunjukkan bahwa selama ini ada sesuatu yang salah *(there is something wrong)* dalam proses pembangunan nasional. Strategi dan sistem pembangunan nasional yang lebih rnengutamakan pertumbuhan tinggi dengan topangan luar negari ternyata tidak cukup efektif dan kuat menahan gelombang eksternal shock yang ada, Kebijakan *trickle down effect* tidak bisa membuktikan bahwa pemerataan itu berasal dari atas (top down), padahal pada hakekatnya pembangunan berarti pertumbuhan dan pemerataan adalah suatu proses perubahan dan, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri (Ismail Saleh, 1990: xxv). Reformasi ekonomi menjadi suatu keharusan dalam merokonstruksi infra dan supra struktur makro ekonomi sebagai upaya keluar dan kemelut krisis. Berdasar kondisi peperti ini perlu adanya suatu pemikiran dan telaah kritis tentang reformulasi sistem kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang komprehensif, demokratif dan bervisi kerakyatan yang tentunya harus ditunjang oleh *political will* dan kondisi pemerintahan yang bersih.

Perumusan Masalah

Secara makro, banyak keberhasilan yang mampu dicapai oleh pemerintahan Orde Baru di bidang perekonomian yang terkenal dengan konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Namnn, kebijakan pembangunan yang bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, dimana lebih mementingkan dan menerapkan stabilitas dan pertumbuhan daripada pemerataan, telah membawa bias ke atas. Maksudnya hanya sekelompok orang yang mendapat bagian terbesar

dari jatah kue pembangunan. Selama ini pemerataan kesejahteraan lebih dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya pragmatis, yakni sebagai pembagian hasil atau kelebihan (surplus) pembangunan. Sehingga yang menjadi orientasi utama adalah tingkat pertumbuhan dan surplus pembangunan yang tinggi.

Sebagai akibat dari kondisi tersebut, maka terjadilah kesenjangan yang sangat kentara yang dapat dilihat dan diukur dalam bidang ekonomi. Walaupun pembangunan terus dilakukan, namun jurang pemisah antara si miskin dan si kaya makin lebar saja. Lebih jauh lagi, data BPS (1992) menunjukkan bahwa usaha kecil di Indonesia berjumlah 33,4 juta yang tersebar di berbagai sektor. Jumlah yang terbanyak adalah sektor pertanian (63,8%), perdagangan (17,4%), industri pengolahan (7,5%), jasa (4,8%), angkutan (3,6%), bangunan kontruksi (2,6%) serta keuangan dan asuransi (0,6%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha kecil masih berada di sektor yang secara ekonomi termasuk sektor yang kurang menguntungkan, yaitu sektor pertanian.

Krisis ekonomi mengakibatkan sektor moneter mengalami keterpurukan hingga menimbulkan kemacetan luar biasa pada sektor riil atau produksi. Implikasi terberat secara logika tentunya dialami oleh pengusaha kecil yang bergerak dalam sektor tersebut. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat suku bunga pinjaman yang belum tentu bisa dicapai oleh pengusaha-pengusaha dengan omzet kecil sementara tanpa bantuan kredit sulit bagi mereka untuk dapat bergerak dan beroperasi secara leluasa. Dari realitas seperti ini sangat relevan apabila diambil satu pemasalahan mendasar tentang formulasi sistem ekonomi yang tepat dan sesuai untuk Indonesia dengan tetap memberdayakan potensi ekonomi rakyat dalam menguasai sumber daya?

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dengan melihat realita yang sekarang tengah terjadi, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pola kebijakan sistem ekonomi Orde Baru.
2. Memberikan deskripsi sistem ekonomi Islaim sebagai sistem ekonomi altematif.
3. Untuk mensosialisasikan sistem ekonomi Islam sebagai solusi altematif sistem ekonomi yang sesuai bagi Indonesia dengan tetap memberdayakan potensi ekononii rakyat sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Sementara manfaat yang diharapkan penulis dari karyatulis ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan dan kajian bagi pemerintah atau instansi yang berwenang untuk mengkaji atau memikirkan ulang konsep pembangunan ekonomi yang selama ini diterapkan.
2. Sebagai bahan infomiatif bagi penulis ataiu peneliti lain yang *concern* terhadap masalah yang sama dengan penulisan ini.

3. Sebagai wacana yang terbuka untuk di diskusikan dalam memformulasikan sistem ekonomi yang sesuai dengan struktur perekonomian masyarakat Indonesia.

II. Tinjauan Pustaka

Per definisi segala sesuatu yang menyangkut banyak bagian/ unsur yang saling berinteraksi adalah sistem (Mubyarto, 1987:213).Sistem ekonomi adalah sistem yang memiliki unsur-unsur yang terlibat dalam proses produksi dan konsumsi dan memerlukan aturan dalam interaksi terentu, seperti sumber daya alam, teknologi dan manusia serta subsistem sosial ekonomi dan lembaga-lembaga masyarakat yang terlibat didalamnya. Karena tiap negara mempunyai sistem nilai tertentu yang berbeda dengan negara lain, maka sistem ekonomi setiap negara memiliki ciri khas tersendiri. (Mubyarto, 1987:214).

Krisis ekonomi diakibatkan krisis moneter regional secara langsung dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kekeliruan dalam memilih kebijakan sistem ekonomi nasional dengan tidak terlalu berpihak pada rakyat membuat fundamen perekonomian nasional menjadi rapuh dan tidak stabil. Dari argumen ini memberikan simpulan tentang perlunya review dan rethinking atas pola kebijakan pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan. Namun yang tidak boleh dinafikkan adalah hasil-hasil positif dari pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan.

Hasil Pembangunan Ekonomi Orde Baru

Hasil-hasil pembangunan yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru menunjukkan grafik peningkatan taraf hidup rakyat yang luar bisa. Hal ini bisa dilihat dari angka statistik hasil pembangunan ekonomi Orde Baru selama kurun waktu 25tahun terakhir, yakni (GBHN, 1983):

1. Jumlah penduduk miskin yang pada tahun 1970 berjumlah 70 juta pada tahun 1993 tinggal 25,9 juta.
2. Pendapatan rata-rata per jiwa pada tahun 1970sekitar US$ 70 dan menjelang akhir PJP I menjadi US$700.
3. Laju pertumbuhan produksi nasional dengan harga konstan selama 25 tahun terakhir rata-rata tumbuh + 6,0 % setiap tahun, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % setiap tahun.
4. Sektor industri berkembang rata-rata 12,0% per tahun, meningkat dari 9,2% pada tahun 1969 menjadi 21,3 % pada tahun 1991.
5. Kegiatan ekspor non migas meningkat dari US$ 569 juta pada 1968 menjadi US$28,9 milyar pada akhir PJP I.

6. Secara komulatif, nilai investasi asing (PMA) meningkat menjadi US$37 milliar, sedangkan PMDN menjadi US$ 159,4 trilliun (1988-1990).
7. Tabungan pemerintah pada akhir PJP I adalah Rp. 15,7 trilliun.

Sedangkan untuk memacu jalannya proses pembangunan, pemerintah telah melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi secara bertahap (GBHN, 1993). Maksudnya untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dorongan dan kemudahan kepada dunia usaha, terutama di sektor keuangan/ moneter dan sektor riil. Di sisi lain kepercayaan dunia internasional juga semakin tinggi ditandai dengan meningkatnya nilai pinjaman dan bantuan yang diterima.

Tabel 2.1
Bantuan Pembangunan Internasional Komitmen oleh IGGI/CGI

Tahun Fiskal	Dalam juta US$
1998/ 1990	4,297
1990/ 1991	4,516
1991/ 1992	4,755
1992/ 1993	4,949
1993/ 1994	5,112
1994/ 1995	5,203
1995/ 1996	5,360
1996/ 1997	5,260

Sumber : *Resources Book Indonesia* 1996 (catatan: sumber asli Bank Indonesia)

Sebagai negara berkembang yang sedang menuju pada negara industri baru secara empirik memang banyak hal yang diraih, namun secara khusus ternyata menyimpan banyak sisi negatif. Kebijakan protektif yang dirumuskan dalam beraneka bentuk subsisdi telah menghasilkan industri yang tidak efisien. Model pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi atau terintegrasi ke dunia internasional telah membuat ketergantungan kita pada pinjaman luar menjadi begitu besar, sehingga defisit transaksi berjalan semakin besar.

Akibat lain dari kebijakan protektif adalah suburnya praktik ekonomi patron-klientelistik. Hal ini mengakibatkan fondasi ekonomi makro menjadi rapuh dan tidak stabil karena model pembangunan yng hanya mengandalkan sejumlah kecil masyarakat (pola konglomerasi). Dari luar mungkin terlihat stabil, tetapi hal itu tak ubahnya seperti api dalam sekam, yang dampaknya baru dirasakan ketika kita sedang menghadapi krisis ekonomi. Model pembangunan elitis bukan saja tidak adil, namun juga keropos karena kurang adil dan meratanya kue pembangunan. Dan sisi negatif yang paling bisa dirasakan pada masa

krisis dan reformasi ini adalah model pembangunan yang selama ini berada dalam sistem politik otoritarian, dan kekuasaan yang terlalu lama telah menghasilkan sistem yang penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi demikian merupakan implikasi dari sistem politik yang tanpa pengawasan, dan hubungan klientilistik yang terlalu kuat.

Pertumbuhan versus pemerataan

Seperti yang telah dibahas pada bagian awal bahwa model pembangunan yang elitis dan protektif ternyata menyimpan sejumlah masalah besar dalam segi sosial ekonomi. Krisis yang terjadi akibat kurang tercapainya perasaan keadilan, baik keadilan sosial maupun ekonomi. Sehingga relevan bila difikirkan kembali, apakah masalah keadilan ekonomi dan/ atau keadilan sosial lebih banyak menjadi masalah pada saat kemajuan kemakmuran, ataukah pada saat kemunduran dan keprihatinan seperti saat ini. Meskipun permasalahan yang sering diperdebatkan adalah masalah pertumbuhan (*growth*) dan pemerataan (*equity*), namun berkaca pada masa orde baru tampak jelas bahwa para arsitek ekonomi Orde Baru lebih berminat untuk membahas masalah pertumbuhan dibanding masalah pemerataan. Sistem ekonomi Orde Baru terlalu mempercayai bahwa kemajuan ekonomi secara ekonomis akan menghasilkan keadilan ekonomi (*trickle down effect*), seperti persaingan tidak saja mempercepat pertumbuhan tetapi juga akan membagi hasil pertumbuhan secara merata (Mubyarto, 1987: 211). namun pada kenyataannya kemajuan otomatis semacam ini jarang sekali terjadi , justru mengakibatkan jurang kesenjangan sosial semakin lebar.

Pada dasarnya terdapat tiga tipologi pembangunan pertumbuahan seperti yang dikemukakan oleh Gary Field (dalam Todaro, 1995: 147), yakni 1) tipologi pertumbuhan perluasan sektor-modern, dimana pengembangan ekonomi dua sektor, tradisional dan industri modern tertumpu pada pembinaan dan pemekaran sektor modern. Pada tipologi ini sulit diperoleh ketagasan tentang perubahan atas ketimpangan distribusi pendapatan, karena distribusi pendapatan bersifat fluktuatif, bisa dikatakan membaik namun bisa dikatakan memburuk. 2) Tipologi pertumbuhan yang memperkaya sektor modern. Pada tipologi ini pertumbuhan ekonomi memang berjalan pesat namun distribusi pendapatan semakin timpang, karena hasil pembangunan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. 3) Tipologi pertumbuhan yang memperkaya sektor tradisional. Dalam tipologi pertumbuhan ini hampir semua manfaat dapat lebih dirasakan secara merata oleh segenap elemen masyarakat, terutama yang bergerak di sektor tradisional, dan sedikit saja yang menetes di sektor industri modern. Buah dari tipologi ini pendapatan meningkat dan menyebar lebih merata sehingga berhasil mengurangi angka kemiskinan. Pada tipologi ini peran masyarakat dalam menentukan arah perekonomian sangat besar karena adanya dukungan pemerintah pada sektor ekonomi rakyat.

Pertumbuhan biasanya berkaitan dengan modernisasi, yakni adanya peranan teknologi tinggi dan alat ekonomi yang padat modal, sehingga hasil yang diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dan dapat diekspor. Implikasi selanjutnya yang diharapkan adalah meningkatnya tingkat pendapatan nasional (GNP). Padahal GNP merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan nasional yang tidak tepat (Todaro, 1995: 168). Sehingga seringkali terjadi pertentangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara penekanan prioritas pada pertumbuhan ataukah pada pemerataan.

Prioritas pertumbuhan memang berhsil meningkatkan tingkat pendapatan nasional (GNP), karena pertumbuhan biasanya berkaitan dengan modernisasi. Berarti penekanan pada peranan teknologi tinggi dan alat yang padat modal. Namun disadari bahwa tingginya GNP tidak menggambarkan kenaikan pendapatan penduduk secara agregat, sementara pembangunan ekonomi yang memperbesar pertumbuhan dulu baru membagikannya ternyata tidak bisa menutupi jurang sosial antara si kaya dan si miskin. Sedangkan prioritas pada pemerataan membawa konsekuensi pengorbanan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meskipun tidak bisa dikatakan angka pertumbuhan itu stagnan.

Kebijakan pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan dan pemerataan memerlukan suasana yang stabil, karena stabilitas adalah syarat pokok bagi usaha pembangunan yang kontinyu. Stabilitas yang dinamis harus merupakan hasil dari pola pembangunan yang seimbang. Artinya, pembangunan yang senantiasa memelihara keseimbangan antara peningkatan produksi dengan laju yang cukup tinggi, dan pola pembagian hasil secara lebih merata (Prayitno dan Santosa, 1996:86). Karena dari dua aspek pertumbuhan dan pemerataan ini masing-masing memberikan andil besar bagi terselenggaranya kondisi stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Sehingga untuk merealisasikannya diperlukan suatu pola kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi ketidakmerataan, sambil tetap mempertahankan dan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Todaro (1995: 175-179) menyebutkan ada empat kebijakan yang bisa menjadi pilihan kebijakan pemerintah yang menyangkut empat unsur penting, yaitu: 1) Distribusi fungsional, berarti terdapata upaya perubahan atas distribusi pendapatan fungsional melalui pola kebijakan untuk mengubah harga-harga faktor secara positif. Dari perubahan distribusi fungsional terdapat suatu pendekatan terhadap ekonomi tradisional. 2) Distribusi ukuran, berarti mengubah distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif pemilikan harta (asset). Dengan demikian, garis kebijakan kedua adalah secara langsung mengurangi terpusatnya penguasaan harta, pendistribusian kekuasaan yang tidak merata, dan juga memperluas pendidikan serta kesempatan untuk memperoleh penghasilan. 3) pengurangan pendapatan golongan atas melalui pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi. Hal ini berarti adanya perubahan distribusi pendapatan golonagan atasa melalui

pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. 4) Peningkatan distribusi pendapatan golongan bawah melalui pengeluaran pemerintah dari pajak yang diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya ada perubahan dalam distribusi pendapatan golongan lemah melalui pembayaran tunjangan dan penyediaan barang dan jasa pemerintah.

Kesimpulan dari kebijakan yang ditawarkan oleh Todaro (1995) ini adalah adanya suatu paket kebijakan ekonomi yang meliputi kebijakan untuk mengoreksi distorsi harga faktor produksi, kebijakam untuk merubah struktur distribusi kekayaan, kekuasaan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang disertai dengan kesempatan memperoleh penghasilan (pekerjaan), serta kebijakan yang dibuat untuk memodifikasi distribusi pendapatan melalui pajak progresif.

Alternatif Pemecahan Masalah

Dari beberapa sistem kebijakan yang selama ini diterapkan oleh rejim Orde Baru tampak adanya beberapa kelemahan, baik sistem liberalnya para teknokrat maupun sistem protektif milik kaum nasionalis-patrimonalis. Strategi pembangunan ekonomi yang ada memang membawa hasil-hasil prestisius selama kurun waktu tiga dasawarsa terakhir. Bila ditinjau secara empirik, pembangunan ekonomi Indonesia sejak Pelita I hingga PJP II, dapat dikatakan telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang cukup spektakuler. Pada tingkat makro, secara agregat keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat dan diukur dengan memakai banyak indikator, dua diantaranya yang umum dipakai adalah tingkat pendapatan nasional perkapita (GNP) dan laju pertumbuhan output agregat (PDB) rata-rata per tahun (Sasono, et.al, 1998: 14). Meski tingginya GNP tidak dapat dijadikan patokan kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan nasional secara tepat.

Krisis ekonomi memberikan banyak pelajaran bagi kita bahwa reformasi ekonomi adalah jawaban untuk segera keluar dari krisis. Reformasi ekonomi memberikan dasar bagi kita untuk secara radikal memeriksa kembali strategi perekonomian nasional dan dicarinya alternatif sistem ekonomi baru dan cara untuk melaksanakannya, baik dari segi waktu, ruang lingkup dan muatan. Waktu disini merujuk pada saat kapan mulainya reformasi sistem yang ada itu dimulai dan dilakukan, segera ataukah ditunda. Ruang lingkup disini menurut Nelson (1990) lebih merujuk pada luasnya alternatif pemecahan yang direncanakan apakah berlangsung secara koheren atau sepotong-potong, sedangkan muatan merujuk pada jenis tindakan reformasi sistem yang dipilih, ortodoks atau heterodoks. Dari berbagai kelemahan yang didapat dari dua sistem yang pernah diterapkan diperlukan suatu gagasan tentang sistem ekonomi baru dan strateginya baik jangka pendek atau jangka panjang.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam (muslim), adalah wajar dan logis apabila kaum muslim memiliki kepentingan ekonomi yang lebih besar. Hal ini bukan berarti hendak menimbulkan spekulasi sentimen SARA, namun dari krisis ekonomi yang terjadi

maka yang menjadi korban terbesar adalah kaum muslim. Angka kemiskinan yang terbesar tentunya disandang oleh kaum muslim. Sehingga sistem ekonomi alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk mengembalikan dan selanjutnya memperkuat perekonomian nasional adalah sistem ekonomi yang berbasis syariah (Sistem Ekonomi Islam). Sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam (Prawiranegara, Tanpa Tahun: 10-15).

Apalagi ditengah kontroversi mengenai pertumbuhan dan pemerataan di masa krisis seperti ini maka strategi baru yang lebih realistis dan berjangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan ekonomi rakyat sebagai fundamen ekonomi nasional disamping tujuan untuk lebih memeratakan distribusi pendapatan dengan tetap memikirkan cara bagaimana untuk segera lepas dari krisis. Sementara sistem ekonomi Islam sendiri adalah sistem yang dinamik dan terus berkembang untuk didialogkan dan dicari formula strategiknya sebagai sistem ekonomi nasional. Seperti yang dikatakan oleh Dawam Raharjo (1989: 86) bahwa sistem ekonomi Islam bukan suatu pemikiran yang bersifat final, melainkan terus berkembang melalui kerja ijtihad. Sistem ekonomi Islam bukan suatu hal yang hanya bersifat teoritis, namun merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembangaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

Seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab semakin parahnya krisis ini adalah tumbuh suburnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) semasa Orde Baru. Perilaku ini terjadi dikarenakan kurang transparannya berbagai kebijakan ekonomi serta model-model pembangunan ekonomi Orde Baru yang cenderung klientilistik, otoriter dan tidak demokratis, sedangkan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menganut prinsi-prinsip egalitarian, transparan, jujur dan bersih dari unsur-unsur tersebut. Penjelasan dan pembahasan mengenai sistem ekonomi Islam sendiri akan dibahas lebih lanjut dalam bab pembahasan.

III. Metode Penelitian

Agar pembahasan yang diajukan tidak meluas dan untuk memudahkan analisa, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Bahwa permasalahan akan lebih difokuskan pada persoalan pola sistem ekonomi yang pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru dan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif.

Desain Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pada masa sekarang (Nazir, 1988:63). dengan metode deskriptif ini penulis mencoba membuat satu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem ekonomi yang dijalankan selama pemerintahan Orde Baru dan mendeskripsikan kemungkinan dan peluang diterapkannya sistem skonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif.

Pola pendekatan yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan yakni dengan menggunakan desain deskriptif-analitis. Melalui pendekatan studi deskriptif-analisis ini penulis berkehendak memberikan satu gambaran tentang fenomena-fenomena yang terdapat di seputar fokus permasalahan dengan diikuti satu analisa-analisa dengan tujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa yang ada dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan dari fenomena yang terjadi (Nazir, 1988:105)

Metode Pengumpulan Data

Metode Focus Discussing Group (FGD)

Metode Focus Discussing Group (FGD) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan diskusi-diskusi kelompok guna mencari berbagai informasi yang terkait dengan topik penulisan.

Metode Studi Literatur/Kepustakaan

Metode studi kepustakaan adlah metode pengumpulan data dengan melihat, membaca dan menulis data-data dari literatur yang berkaitan dengan topik penulisan.

Metode Analisa Data

Proses dalam menganalisa data dilakukan penulis dengan menggunakan teknik diskusi-diskusi kelompok atau kajian kepustakaan terhadap informasi yang diperoleh baik dari kepustakaan, media cetak maupun elektronik. Informasi yang berkaitan dengan topik penulisan selanjutnya dikaji secara komprehensif. Melalui cara seperti ini dimunculkan satu bentuk kritikan ataupun saran yang bersifat umum terhadap inti permasalahan yang dianalisa. Dari saran dan kritik tersebut, akhirnya dapat diberikan suatu tawaran alternatif pemecahan dan sekaligus ditarik kesimpulan.

Sumber Data

Penyusunan karya tulis ilmiah ini sepenuhnya mengambil data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat tidak langsung baik berupa dokumen-dokumen maupun informasi lain.

IV. Pembahasan

Deskripsi Kebijakan Ekonomi Orde Baru

Berdasar pasal 33 UUD 1945, GBHN menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi dan karena itu masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan yang positif melalui kegiatan yang nyata sesuai dengan usahanya. Sehingga dari keduanya ada peran-peran ekonomi yang bersifat mutualistik dan saling mendukung.

1. Kebijakan Sistem Ekonomi Liberal

Hasil-hasil pembangunan nasional selama PJP I yang terangkum dalam penjelasan GBHN 1993 tidak lepas dari pola kebijakan perekonomian yang selama ini dijalankan. Pemerintah Orde Baru pada awalnya jelas mewarisi masalah-masalah ekonomi yang berat yang ditinggalkan oleh era ekonomi terpimpin Orde Lama (1959-1965), dimana kebijakan lama adalah konfrontasi dan bermusuhan dengan investasi asing. Oleh karena itu, tindakan pertama yang segera dilakukan Orde Baru adalah program rehabilitasi dan stabilisasi sesuai dengan kebutuhan untuk mengembalikan kepercayaan asing. Secara pragmatis pemerintah Orde Baru memilih jalan keluar berupa kebijakan yang berorientasi ke luar (program liberalisasi) karena keperluan dukungan moral asing yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan penghematan dan pengetatatan kebijakan moneter. Dapat dikatakan bahwa sumber kekuatan awal Orde Baru dalam program stabilisasi ekonomi adalah bantuan/ pinjaman asing.

Program stabilisasi Orde Baru yang diarsiteki kaum ekonom-teknokrat bisa dikatakan berhasil, terbukti turunnya inflasi ke tingkat 85 % pada 1968, dari hampir 1000% pada 1965. Kendati terdapat dampak negatif dari tindakan penghematan dan langkah-langkah stabilisasi itu, keadaan ekonomi cenderung normal. Sealnjutnya strategi-strategi program teknokratis dikembangkan dan dilaksanakan melalui Program Repelita di bawah panduan naskah GBHN yang ditetapkan MPR tiap lima tahun sekali. Karena menganut sistem liberal dan melalui mekanisme pasar maka dalam melaksanakan strateginya, para ekonom di dukung oleh sejumlah besar pinjaman lunak (*soft loans*) dan hibah-hibah dari luar negeri, misalnya dari IGGI yang tentu saja dengan syarat pinajaman pada tingkat yang wajar, baik dalam hal suku bunga, jangka waktu pinjaman maupun periode pengembaliannya.

Prinsip umum yang dipakai oleh para teknokrat sejak tahap stabilisasi adalah diterapkannya sistem anggaran berimbang yang berbeda, dimana dua sumber eksternal pendapatan (migas dan bantuan asing) dimasukkan di dalamnya (Saidi, 1998:76). Dengan perkataan lain, anggaran dikatakan berimbang karena defisit yang terjadi di bayar oleh

pinjaman luar negeri. Implikasinya defisit transaksi berjalan yang semakin besar. Karena demikian strukturnya, sistem anggaran ini memiliki pengaruh luar biasa terhadap perekonomian dalam negeri sekaligus dapat mencerminkan akibat yang timbul jika ada guncangan dari luar.

Dinaikkannya tingkat suku bunga bank menjadi 6-9% sebulan dan tingkat penalti untuk kredit yang menunggak, sebagai bagian dari tahap stabilisasi memberikan sejumlah masalah yang terjadi pada awal 1970-an. Diantaranya banyak industri kecil dan menengah kolaps dan gulung tikar, karena besarnya beban bunga yang harus ditanggung, disusul pengangguran dan gangguan-gangguan sosial di perkotaan ditambah dengan persoalan etnis Cina, warisan Orde Lama yang belum terselesaikan secara tuntas, yang semakin lama semkain memburuk. Masalah ini berpuncak pada meletusnnnya peristiwa Malari 1974 dimana gerakan anti investasi asing meluap sedemikian besar. Permasalahan ini merupakan mata rantai dari implikasi kebijakan liberal yang berorientasi keluar yang selanjutnya memaksa pemerintah mengubah strategi pembangunannya.

2. Kebijakan sistem ekonomi nasionalis

Selama satu dekade berikutnya, yaitu periode 1973-1983, strategi pembangunan berbalik arah sebagai akibat logis diterapkannya industrialisasi substitusi impor (Import Substitution Industrialize atau ISI). Hal ini ditandai dengan adanya tiga ciri kebijakan pemerintah, yakni *pertama* pengaturan penanaman modal asing yang makin restriktif. *Kedua*, kebijakan industri dan perdagangan yang lebih proteksionis dan *ketiga* strategi kebijakan pada umumnya pada umumnya bertambah intervensionistik. Dari tiga ciri ini jelas terlihat adanya perubahan darai pola liberal ke arah pola nasionalisasi yang semakin diperkuat oleh topangan boom minyak pada tahun 1970-an.

Orientasi ke dalam yang diterapkan sebagai pengganti orientasi liberal ditindaklanjuti dengan dibentuknya Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, sebagai dampak dari peristiwa Malari 1974. Kebijakan sistem ekonomi nasionalistis yang diberlakukan oleh para supra kabinet ini diantaranya (Kuntjoro-Jakti (1981) dalam Zaim Saidi, 1998: 78) adalah *pertama*, kebijakan investasi asing menjadi jauh semakin restriktif dan harus dalam bentuk *joint venture* serta penyertaan nasional harus ditingkatkan. Disamping itu, daftar sektor-sektor yang tertutup bagi investasi asing diperpanjang, insentif pajak dikurangi dengan jumlah tenaga kerja asing dibatasi. Bukti yang nampak adalah semakinbesranya penyertaan modal pemerintah , dari US$ 263 juta pada tahun 1975 menjadi US$ 595 juta pada 1983. *Kedua* , pemerintah meluncurkan sejumlah program kredit bagi pegusaha pribumi yang didanai melalui APBN. Ketiga, pemerintah menerapkan tindakan-tindakan protektif terhadap sektor industri kecil melalui Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BPIK).

Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada masa tersebut jelas terlihat bahwa tonggak penting dari adnya *boom* minyak adalah bangkitnya kaum nasionalis dan patrimonalis. Dimana kendali negara (pemerintah)sangat dominan terhadap sistem ekonomi Indonesia, menggantikan sistem berbasis pasar yang didukung oleh kaum teknokrat pada masa sebelumnya Dari sini terjadi pertentangan antara sistem ekonomi liberal berbasis pasar dengan sistem ekonomi nasionalistis.

Keunggulan komparatif berbasis pasar yang diajukan oleh kaum teknokrat dianggap tidak menjanjikan banyak kecuali ditpang oleh pertumbuhan ekonomi tinggi dalm tempo sekejap melalui integrasi dengan psar internasional. Sementara keunggulan kompetitif yang diajukan kelompok nasionalis (merkantilistik) dapat dicapai melalui transformasi industri berbasis teknologi tinggi (*hitech*) dan padatmodal sehingga bentuk-bentuk proteksi dan fasilitas dari pemerintah sangat dibutuhkan. Hal ini secara sekilas mirip dengan keunggulan kompetitifnya Michael Porter (1990), dimana keunggulan kompetitif tidak didasarkan atas karunia alam tetapi harus diciptakan. Namun ada sedikit perbedaan dimana menurut Porter peran negara adalah terbatas untuk menciptakan iklim dan lingkungan yang kondusif, sedangkan kelompok merkantilistik (nasionalis) memandang bahwa pelaku utama haruslah negara. Berbagai program pembangunan yang bersifat protektif dan fasilitatif di satu sisi memeberikan perlindungan bagi perekonomian nasional, tapi di sisi lain memnuculkan efek negatif, seperti rasa kecemburuan bagi pelaku-pelaku ekonomi yang tidak memperoleh perlakuan protektif, munculnya monopoli atas sumber ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, seperti Bulog dan Pertamina, serta berkembangnya praktek nepotisme, korupsi dan kolusi..

Berbagai fasilitas dan proteksi pemerintah serta berbagai instrumen peraturan yang menguntungkan pelaku ekonomi dalam negeri (lokal pribumi) telah membantu terciptanya kelas pengusaha karbitan yang tumbuh atas dasr sistem *clientele* atau patron-klien yang memiliki kekuatan dalam kekuatan dalam ikut menetukan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Deskripsi Sistem Ekonomi Islam

Terpuruknya perekonomian nasional akibat krisis memang disebabkan banyak faktor, diantaranya adalh kuatnya intervensi negara atau dalam sistem politik yang tidak demokratis, telah mengahasilkan “kegagalan pemerintah” atau *government failure* (Saidi, 1998:171) dalam bentuk praktik KKN, disamping papola kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik yang menyebabkanfundamen perekonomian nasional menjadi keropos. Sistem politik korporatis yang diterapkan pemerintah orde baru telah menyuburkan praktik ekonomi yang klientelistik, tidak transparan dan manipulatif. Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah memeriksa kembali asmsi dasar perekonoian yang selama ini kita percayai dan

mencoba memikirkan ulang tentang sistem ekonomi alternatif yang lebih mengutamakan pemerataan kue pembangunan secara lebih demokratis, jujur dan transparan. Karena bagaimanapun juga yang menduduki ranking tertinggi korban krisis ini adalah rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (muslim).

Sistem Ekonomi Islam seperti yang dimaksud oleh Prawiranegara (tt: 10-15) adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari Al qur'an dan hadist yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat untuk ijtihad, dan kemudian diterapkan dalam masyarakat (Ali, 1988:20). Sementara definisi ekonomi Islam lain dikemukakan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi (dalam Ahmadi dan Sitanggal, 1980:11) menerangkan bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian: salah satu diantaranya tetap, sedangkan yang lain dapat berubah-ubah. *Pertama* adalah yang diistilahkan dengan "sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al qur'an dan As sunnah", yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. *Kedua* diistilahkan dengan"bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuiai dengan tiap lingkungan dan masa". Bertolak dari hal tersebut, maka sistem ekonomi Islam haruslah tersusun dari seperangkat nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu, yakni filsafat ekonomi Islam, nilai dasar ekonomi Islam dan nilai instrumental ekonomi Islam (A.M. Saefuddin, et. al., 1998:34). Satu hal yang membedakan ciri konsep ekonomi Islam dengan kosep ekonomi lainnya di dunia, konsep ekonomi kapitalis dan konsep ekonomi marxis adalah pada konsep *triangle*, yakni Tuhan-Manusia-Alam.

Pada dasarnya strategi sistem ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan cenderung menggunakan model atau sistem ekonomi neo-keynesian (Saidi, 1998:74). Dimana penekanan terletak pada pentingnya pertumbuhan ekonomi dangan sebuah "dorongan kuat " dan direncanakan secara tersentralisasi melalui mekanisme pasar (liberal). Akibat terlalu kuatnya "dorongan eksternal" menjadikan Indonesia menjadi kelompok negara pengutang terbesar di dunia. Sehingga dari kebijakan yang kapitalistik tersebut menyebabkan Indonesia terjebak serta menjadi korban dari sistem kapitalisme internasional itu sendiri (Mubyarto, 1999:2-3). Bercermin dari hal diatas, bila digabungkan dengan nilai dasar ekonomi Islam tampak ada suatu hubungan yang bersifat antagonistik. Bahwa Islam menekankan pada nilai kepemilikan (*ownership*) atas harta kekayaan dan sumber-sumber ekonomi, khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak secara terbatas, bersendikan atas nilai keadilan (*justice*) dan nilai keseimbangan (*equilibrium*) yang terimplementasikan ke dalam nilai instrumental ekonomi Islam, yakni jaminan sosial melalui konsepsi zakat, sistem bagi hasil (non riba), *al-musyarakah* (kerjasama/ cooperation), dan hisbah (lembaga pengawasan oleh negara).

Tabel 4.1
Perbandingan Ekonomi Islam dengan aliran Kapitalis dan Marxis

Segi Pembanding	Konsep Islam	Konsep Kapitalis	Konsep Marxis
Filsafat Ekonomi	Berasal konsep tauhid yang menguatkan Tuhan sebagai puncak dari segala hukum kausalitas	berasas laissez faire yang memberi kebebasan penuh kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan meterialistiknya	berasas pada konsep perjuangan kelas yang menegaskan peran Tuha sebagai kausa prima kehidupan
Nilai Dasar Ekonomi	Kebebasan terbatas terhadap pemilikan (ownership) harta kekayaan dan sumber-sumber ekonomi, Nilai keseimbangan (*equilibrium*), Nilai Keadilan (*justice*).	hak milik individu adalah absolut, adanya kebebasan memasuki semua sektor kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas dan norma individu ditarik dari individualime dan utilitarianisme.	Hak milik ada pada kaum proletar yang diwakili oleh pemerintah diktator, sentralistik dan mematikan kreativitas ekonomi rakyat, pendapatan dan distribusi kolektif adalah hal utama dan hubungan ekonomi di luar negara sengat dibatasi.
Nilai Instrumen Ekonomi	Konsep zakat larangan riba (bunga) kerjasama ekonomi (*cooperation* atau *syirkah*), jaminan Sosial, Peran negara (lembaga pengawasan atau *hisbah*)	Terletak pada persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, Pasar yang monopolistis, Informasi dan bentuk pasar atomistis dari tiap unit ekonomi	Perencanaan sentralistik melalui proses iterasi yang mekanistis, Pemilikan kaum proletar thd. faktor produksi secara kolektif

Sumber : A. M. Saefuddin, et.al (1998: 35-56)

1. Konsepsi Zakat

Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Islam mewajibkanya atas setiap muslim yang sampai pada nisab zakat (Ahmadi dan Sitanggal, 1980:110). Nisab adalah batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan dari padanya. Sebenarnya zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada yingkah laku konsumsi. Menurut A.M Saefudin (dalam Sasono et al, 1998:46), pengaruh zakat terhadap aspek sosial ekonomi adalah memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan. Selain itu, pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang stabil, yakni peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Zakat merupakan satu bentuk jaminan sosial seperti yang dikatakan oleh Todaro (1995) yang dimbilkan dari pendapatan golongan atas secara proporsional (melalui mekanisme nisbah zakat) lewat kebijakan penarikan pajak progresif atas kekayaan dan pendapatan.

2. *Sistem bagi hasil*

Banyak pakar ekonomi yang berkeyakinan bahwa krisis ekonomi dewasa ini disebabkan oleh sistem riba (bunga), padahal Islam secara jelas melarang adanya praktek riba atau pembungaaan uang. Karena hakikatnya adalah suatu penolakan terhadapa resiko finansial tambahan yuang ditetapkan dalam transaksi uanga atau modal maupun jual beli yang dibebeankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya (A.M saefudin, et al., 1998:47). Yang termasuk dalam praktek riba adalah bunag pinjaman uang, modal, dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif dan konsumtif, dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek.

Maka sistem bunga yang cenderung tidak adil dan bersifat pemerasan tersebut harus diganti dengan sistem yang mutualistik, yakni konsep sistem bagi hasil. Prinsip ini pada dasarnya adalaha penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad (perjanjian) dilakukan yang pelaksanaannya terjadi pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati (PINBUK, tt: 15-16).

Tabel 4.2

Perbandingan antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Penentuan besarnya hasil (bunga) dibuat sebelumnya (pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung rugi.	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan ber-pedoman pada kemungkinan untung rugi (besarnya jumlah diketahui sesu-dah berusaha, sesudah ada untungnya).
2.	Besarnya presentase (bunga/ nilai rupiah) ditentukan sebelumnya, berdasarkan jumlah uang yang dipinjam	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan yang pararel dengan menyepakati proposi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak, belum tentu besarnya.
3.	Jika terjadi kerugian ditanggung si peminjam saja berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan.	Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan si peminjam.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Besarnya bunga yang harus dibayar si pemin-jam pasti diterima baik	Keberhasilan usaha yang jadi perhatian bersama yaitu si peminjam dan si pemilik modal.

Sumber : PINBUK PUSAT

3. Al-Musyarakah

Adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal umtuk membiayai suatu usaha yang keuntungannya dibagi sesuai dengan persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa modal masing-masing (Sumitro, 1996: 34-35). Menurut Fiqh ada dua bentuh musyarakah, yaitu syarikah *Amlak* (secara otomatis) dan sayrikah *Uqud* (atas dasar kontrak). Musyarakah Uqud dibagi dalam lima jenis akad, yaitu: 1) Syirkah 'Inan, 2) Syirkah Mudlarabah, 3) Syirkah Wujuh, 4) Syirkah Abdan, 5) Syirkah Mufawadah.

4. Hisbah

Hisbah merupakan bentuk peran atau campur tangan pemerintah atau negara dalam fungsionalisasi ekonomi Islam, sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi. Menurut A.M Saefudin (1998: 56), hisbah adala institusi negara yang pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. sebagai lembaga pengawas pasar ekonomi yang menjamin tidak adanya perkosaan dan pelanggaran aturan moral dalam pasar monopoli, perlindungan atas hak konsumen, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. Lembaga ini bersifat independen dari kekuasaan yudisial maupun eksekutif. Peran negara dalam lembaga pengawasan ini diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nila-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasan dalam pengalokasian/ distribusi sumber-sumber maupun dana, pemertaan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Faktor Pendukung

Sistem ekonomi Islam dengan derivasi sistemnya menjanjikan suatu bentuk perekonomian yang jujur, tranparan, egaliter dan demokratis. Nilai keadilan dan keseimbangan menjadi dasar dari perilaku ekonomi Islam. Keterbukaan dari sistem ini membuat kehidupan perekonomian menjadi jujur dan non KKN (sesuatu hal yang ditakuti pada jaman Orba), non monopoli dan jaminan atas hak-hak konsumen.

Kelebihan sistem ini selain diatas adalah mudah diterima karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan sebagian besar masyarakat masih bergerak dalam sektor tradisional. Aspek keadilan membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata secara proporsional. Seperti yang disinggung oleh Garry Field, pada tipologi pembangunan pertumbuhan yang ketiga, bahwa distribusi pendapatan akan lebih adil dan merata apabila terjadi perluasan dan pembesaran ekonomi sektor tradisional. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dapat lebih berperan dalm menentukan arah perekonomian nasional.

Meski tidak berarti menurunkan tingkat pertumbuhan namun untuk masa yang lebih dekat, mengurangi angka kemiskinan yang semakin besar akibat krisis adalah hal yang urgen, sehingga kebijakan ini bisa menjadi pilihan yang utama.

Namun faktor pendukung yang paling utama dalam melakukan reformasi ekonomi ini adalah adanya kemauan kuat (*political will*) dari pemerintah dalam melaksanakannya. Nelson (1990) (dalam Saidi, 1998: 36) menyebutkan bahwa salah satu variabel yang dijadikan pertimbangan terhadap pelaksanaan reformasi adlah pola kepemimpinan. Kemauan politik dan kepemimpinan dianggap penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program reformasi.

Strategi Pelaksanaan

Hipotesa Nelson meyebutkan bahwa semakin parah tingkat krisis suatu ekonomi maka semakin besar kemungkinan dilaksanakannya program reformasi yang berskala luas. Dengan melihat kondisi krisis ekonomi Indonesia yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda segera pulih memberi kesimpulan bahwa reformasi ekonomi secara radikal dan berskala luas memang dibutuhkan. Besarnya tanggungan hutang kuar negeeri beserta bungany, sebesar US$ 137,42 milyar (terdiri atas US$ 63,46 milyar hutang pemerintah, dan US$ 73, 96 milyar hutang swasta) (lihat Abadi, Desember 1998: 10) memberikan implikasi yang sangat berat bagi bangkitnya perekonomian tanah air, belum lagi tambahan pinjaman IMF sebesar US$ 43 milyar hasil *Letter of Intent* untuk program pemulihan ekonomi. Melaksanakan semua resep IMF-plus yang tertuang dalam *Letter of Intent* adalah suatu keniscayaan yang mesti dituruti, meskipun kita harus mencoba membuat resep sendiri yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural ekonomi masyarakat Indonesia.

Startegi yang mungkin bisa diterapkan adalah secara bertingkat atau berjenjang. Maksudnya dalam jangka pendek, menciptakan peluang-peluang kerja baru ditengah krisis dalam rangka mengurangi kemiskinan akibat pengangguran adalah hal mendesak. Sektor informal dan usaha kecil menjadi pilihan utama dalam membuka peluang baru, karena sektor inilah yang terbukti palinga kuat dalam menghadapi guncangan ekonomi akibat krisis. Pengguanaan pinjaman dari IMF-plus harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran agar efektifitas penggunaan dana dapat tercapai dan benar-benar untuk sektor informal dan usaha kecil.

Langkah selanjutnya adlah secar aperlahan merubah dan merekonstruksi paradigma perbankan konvensional dan sistem bunganya dengan perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu harus diberlakukan sistem perngakta hukum yang kuat dan perngawasan perbankan yang ketat. Segala program rehabilitasi dan stabilisai hasil ramuan IMF, meskipun terasa pahit harus dilaksanakan sampai keadaan perekonomian

menunjukkan tren kestabilan, yang ditandai dengan naiknya tingkat pertumbuhan ke arah positif. Hasil analisis CSIS (lihat Kompas, Maret 1999: 1) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan baru mencapai titik terendah (2, 0%) mulai awal tahun 2000, dan selanjutnya meningkat menjadi 4,0% pada tahun 2001; 5,0% pada tahun 2002; 6,0% pada tahun 2003; dan baru 7,0% pada tahun 2004. Perkiraan ini merupakan perkiraan ekonomi yang sangat optimis karena masih harus melewati variabel penentu lain berupa Pemilu Juni 1999.

Proses Pemilu 1999 merupakan prasyarat utama bagi stabilitas politik nasional yang selanjutnya membawa pengaruh dan implikasi mendasar bagi pulihnya perekonomian nasional. Karena dari Pemilu yang adil dan jujur akan dihasilkan struktur pemeeerintahan yang terlegitimasi oleh rakyat. Seperti yang dikatakatan oleh Nelson, bahwa variabel lain yang menentukan kesusksesan pelaksanaan reformasi adalah struktur dan susunan elit politik, yang bertautan erat dengan jenis rejim dan karakteristik khususnya. Disinilah letak kesungguhan *political will* pemerintah diuji, apakah proses reformasi itu dilaksanakan secara koheren atau sepotong-potong.

Dalam kondisi perekonomian yang stabil, sistem ekonomi Islam sangat mungkin untuk diterapkan karena pemerataan distribusi pendapatan dinggap lebih menjanjikan daripada sistem kapitalis dan sosialis. Sehingga untuk jangka panjang, dengan asumsi Pemilu 1999 sukses dan ada *political will* dari pemerintah untuk mempertimbangkan sistem ekonomi Islam, maka sitem ini menjanjikan kehidupan perekonomian yang jujur, adil dan merata sesuai dengan amanah pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai; bekerja menurut aksioma dasar dan instrumental dalam mengelola ekonomi berdasar Qur'an dan Hadist; bersifat dinamis menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah *rahmatan lil alamin* (untuk seluruh alam, bukan hanya umat Islam).

V. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa macam kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama masa pemerintahan Orde Baru menganut dua macam pola sistem kebijakan ekonomi yakni kebijakan ekonomi liberalistik pada fase stabilisasi perekonomian awal Orde Baru dan kebijakan ekonomi nasionalistik-protektif pada fase pasca boom minyak.
2. Kebijakan sistem ekonomi yang dijalankan pemerintah Orde Baru telah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bagi peningkatan perekonomian nasional. Namun disisi lain, pemilihan kebijakan ekonomi yang bersifat elitis, liberal (kapitalistik) serta lamanya rejim Orde Baru yang otoritarian mengakibatkan rapuhnya

fundamen perekonomian nasional, tersumbatnya kretifitas ekonomi rakyat karena kebijakan monopoli dan semakin besarnya defisit neraca berjalan.

3. Sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif merupakan konsepsi sistem pembangunan ekonomi jangka panjang yang penekanannya pada pelibatan rakyat secara penuh dengan pengawasan pemerintah dalam mengembangkan kreatifitas potensi ekonominya sebagai cara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kekuatan ekonomi nasional. Pemerataan distribusi pendapatan secara terbuka, egaliter, adil dan demokratis dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran dari sistem ekonomi ini.
4. Nilai dasar dari sistem ekonomi Islam adalah hak kepemilikan yang terbatas pada sumber-sumber ekonomi, nilai keadilan dan nilai keseimbangan. Sedang nilai instrumentalnya adalah zakat, sistem bagi hasil (non bunga), jaminan sosial, koperasi atau al-musyarakah dan adanya lembaga pengawasan atau hisbah dari pemerintah.
5. Faktor-faktor pendukung terlaksananya reformasi ekonomi menuju sistem ekonomi Islam adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, konsentrasi ekonomi rakyat sebagian besar masih pada sektor tradisional, serta adanya kemauan (*political will*) yang kuat dan sungguh-sungguh dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pendukung reformasi kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan pelaksanaan ekonomi Islam.

Saran-saran

1. Perlunya memikirkan kembali konsep sistem ekonomi yang selama ini dijalankan guna memperkokoh fundamental perekonomian nasional.
2. Diperlukan seperangkat kebijakan pemeerintah yang mendukung, baik di bidang ekonomi maupun hukum terhadap sistem ekonomi Islam.
3. Perlu adanya semacam lembaga khusus yang secara *concern* melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan secara komprehensif tentang sistem ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

Al-'Assal, A.M. dan Fathi Ahmad A.K. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Terjemahan Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal dari *An-Nidzdamul Iqtishaadi Fil Islam Mabaadi* - Uhu Wahdaafuhu (Tanpa Tahun). Surabaya: Bina Ilmu

Anonim. 1993. *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*

Anonim. 1992. *Biro Pusat Statistik*

Anonim. 1994. *Biro Pusat Statistik*

Basri, Faisal H. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, Peluang dan Kendala.* Jakarta: Erlangga

Bulan Bintang Abadi. 17-23 Desember 1998. Hal. 10

Daud Ali, Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Kuncoro, Mudrajad. 1996. "Nasionalisme Ekonomi dan Tantangannya Dalam Era Globalisasi". Makalah disampaikan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa I Dies Natalis XXXII Universitas Jember, 11-12 Nopember.

Kompas. Sabtu, 6 maret 1999, hal. 1

Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinannya*. Jakarta: LP3ES.

Mubyarta. 1999. "Ekonomi Indonesia Korban Kapitalisme". Dalam Buletin PIMNAS XII. Edisi 2/ 26 Februari. Jakarta: 2-3.

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prayitno, H. dan Budi Santosa. 1996. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prisma. 1994. Jakarta: LP3ES.

Raharjo, M. Dawam. 1989. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.

Saidi, Zaidi. 1998. *Soeharto Menjaring Matahari*. Bandung-Jakarta: Mizan bekerjasama dengan PIRAC.

Saleh, Ismail. 1990. *Hukum dan Keadilan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sasono, Adi, Didin Hafidudin, A.M. Saefudin, dkk. 1998. *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah)*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Rajawali Press.

Team PINBUK PUSAT. 1998. *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*. Surabaya: Vde Press

Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Todaro, Michael P. 1995. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Terjemahan Burhanudin Abdullah dan Haris Munandar dari *Economic Development in The Third World, Fourth Edition* (1989). Jakarta: Erlangga.

Lampiran 1

NISAB ZAKAT

No.	Jenis Zakat	Nisab
1.	Binatang ternak (unta, sapi, kambing)	satu tahun digembalakan
2.	Emas dan Perak	nisab emas = 77,56 gram nisab perak = 543 gram zakatnya : 2,5% atau 1/ 40
3.	Barang Dagangan	20 dirham emas = 77,56 gram emas zakatnya = 1/ 40
4.	Hasil bercocok tanam dan buah-buahan	1/ 10 hasil jika diairi tanpa alat 1/ 20 hasil jika diairi dengan alat

Cat: Pada dasarnya nisab atas kekayaan seseorang, baik fitrah maupun maal adalah sebesar 2,5% atau 1/ 40 bagiannya, kecuali zakat hewan ternak dan hasil pertanian.

Lampiran 2

AL- MUSYARAKAH

Jenis dan ciri Al-Musyarakah:

1. *Syirkah 'Inan*, cirinya:
   - Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota harus sama.
   - Masing-masing anggota berhak penuh aktif dalam pengelolaan perusahaan.
   - Pembagian keuntungan (profit) dan kerugian bisa dilakukan menurut besarnya pangsa modal dan bisa berdasarkan persetujuan (kesepakatan).

2. *Syirkah Mufadhah,* cirinya:
   - Kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota.
   - Setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha
   - Pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi menurut pangsa modal masing-masing.

3. *Syirkah Wujuh,* cirinya:
   - Para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka, tanpa menyertakan modal.
   - Pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan (kesepakatan)

4. *Syirkah Abdan,* cirinya:
   - Sekerja atau usahanya berkaitan
   - Menerima pesanan dari pihak ketiga.
   - Keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian.
5. *Syirkah mudlarabah,* cirinya:
   - Pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut.
   - Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.
   - Pembagian hasil keuntungan sesuai dengan perjanjian.
   - Jika mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

KONSEP SISTEM EKONOMI PASAR SOSIAL KERAKYATAN SEBAGAI DASAR PEMIKIRAN EKONOMI DAN SOSIAL DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Joko Waluyo *)

Sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan ini merupakan suatu sistem yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, etika dan moral bangsa. Sistem ini mampu menjawab problematika ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh perekonomian bangsa Indonesia.

Sistem ini menghasilkan produk barang kebutuhan pokok masyarakat lewat mekanisme pasar sosial kerakyatan dan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar lewat mekanisme pasar murni.

Pola distribusi sumber daya alam lewat mekanisme pasar sumber daya alam. Sistem ini didukung oleh 3 badan usaha yaitu: BUMN memproduksi barang kebutuhan pokok masyarakat, koperasi memenuhi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan anggota dan pasar, BUMS memenuhi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan pasar. Pola hubungan 3 badan usaha ini adalah kompetisi yang diliputi oleh semangat gotong royong. Sistem pengaman sosial kerakyatan disiapkan untuk mengantisipasi dampak buruk persaingan.

Di dalam sistem ekonomi sosial pasar kerakyatan produksi diperuntukkan bagi rakyat banyak dengan car yang adil dan merata untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sistem ekonomi sosial pasar kerakyatan ialah syarat ideologi, politik, ekonomi, hukum, dan pelopor konsep. Agar sistem tetap bertahan sampai akhir jaman diperlukan inovasi dan kreasi dari para pelaku ekonomi dan sosialnya.

---

*) Joko Waluyo : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Yogyakarta

I. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perdebatan yang sengit dan seru dalam berbagai seminar, lokakarya, dan diskusi-diskusi ilmiah untuk merumuskan suatu sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia telah menghasilkan kesimpulan yaitu tentang penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila di Indonesia. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila telah berkembang dengan berbagai versi menurut kemampuan dan latar belakang si pemikir. Evolusi pemikiran Pancasila sebagai suatu sistem ekonomi dimulai dari sidang BPUPKI dan PPKI yang selanjutnya dikembangkan oleh Muhammad Hatta dan pada akhir-akhir ini diteruskan dan dikembangkan oleh Mubyarto dan kawan-kawan.

Pemikiran tentang sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila ini sekarang baru sampai pada taraf kajian filsafat dan landasan moral, dengan sedikit kajian empiris teknis untuk memecahkan masalah problematika ekonomi dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila itu sendiri.

Pemikir-pemikir ekonomi Indonesia sekarang ini "banyak terjebak" dalam pemikiran-pemikiran tentang cara dan upaya untuk menanggulangi dan keluar dari krisis yang terjadi, sehingga pengembangan konsep dan teori untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan idealisme bangsa (Pancasila) kurang mendapat kontribusi. Penyusun dapat mengambil suatu contoh yaitu tentang krisis politik dan ekonomi pada masa transisi antara orde lama dengan orde baru , krisis minyak pada awal tahun 80-an, krisis ekonmi dan keuangan yang berkelanjutan huingga sampai pada krisis politk pada pertengahan tahun 1997 sampai sekarang. Ketika terjadi krisis seperti ini banyak sekali pemikir ekonomi yang berpendapat , tetapi belum ada suatu pendapat yang "membumi" di Indonesia sebagai konsep dasar pemikiran ekonomi. Penyusun juga menyadari bahwa penanggulangan krisis adalah penting dan perlu walaupun kadang-kadang cara yang digunakan kurang sesuai dengan Pancasila.

Suatu sistem ekonomi itu terdiri dari berbagai himpunan konsep dan teori yang terus dikembangkan sesuai dengan keadaan jaman, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh untuk menjawab berbagai problematika ekonomi yang juga terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakatnya.

Sistem ekonommi harus mampu dan siap untuk memberi jawaban dengan berbagai konsep dan teori yang dipunyai untuk menyelesaikan problematika ekonomi. Problematika ekonomi oleh P.A. Samuelson secara garis besar dirinci menjadi tigaa pertanyaan utama yaitu *what* (apa), *how* (bagaimana), dan *for whom* (untuk siapa).[1] Disamping itu suatu sistem

---

1 P.A. Samuelson, 1985. Ekonomi (terjemahan). Penerbit PT Erlangga, Bandung, halaman 495-499

ekonomi harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan jaman yang selalu berubah. Dalam artian ekonomi, sistem harus mampu mengikuti dinamika pasar yang terjadi baik dalam pasar kapitalis maupun dalam pasar sosialis.

Sebagai suatu ilmu yang mempunyai objek masyarakat, maka sistem ekonomi harus peka terhadap perubahan masyarakat dan harus mampu juga mengatur masyarakatnya walaupun secara tidak langsung. Jadi mutu sistem ekonomi juga harus mampu berintegrasi dengan sistem sosial yang ada menjadi suatu sistem ekonomi dan sosial yang dapat mewujudkan tujuan masyarakatnya.

Di Indonesia sistem ekonomi dan sosial ini berupa tatanan kehidupan berekonomi dan bermasyarakat yang sesuai dengan jiwa dan budaya bangsa. Tatanan ekonomi ini diatur dalam UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar filsafat dan moral penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Jadi sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila ini bukan sistem baru yang benar-benar baru, tetapi pengembangan sistem lama yang disesuaikan dengan keadaan jaman serta dilandasi oleh jiwa dan budaya bangsa (Pancasila).

Penyusun tidak memberi judul karya tulis ini dengan judul sistem ekonomi Pancasila, karena penyusun menyadari bahwa proyek penyusunan sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia hanya didasari oleh filsafat dan moral Pancasila, sedangkan Pancasila tidak mengatur secara empiris teknis kegiatan ekonomi. masalahnya bila pembicaraan mengenai sistem ekonomi Pancasila ini penulis lanjutkan, penyusun akan terjebak pada pembicaraan moral dan filsafat saja (tidak lebih dan tidak kurang).

Pembicaraan mengenai sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia, sebenarnya sangat banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan harus disertai dengan konsep dan teori yang jelas, tetapi karya tulis ini hanya bersifat sebagai dasar pemikiran ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada karya tulis ini penyusun memperkenalkan suatu kerangka dasar pemikiran sistem ekonomi Indonesia dengan judul "Konsep Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan Sebagai Dasar Pemikiran Ekonomi dan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1) A. Apakah dasar filsafat dan moral sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan itu
   B. Bagaimanakah dasar filsafat dan moral sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan berperan sebagai dasar pemikiran ekonomi dan sosial di Negara kesatuan Republik Indonesia.

2) Bagaimanakah fungsi dan peranan dari tatanan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Bagaimanakah sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan mejawab problematika ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh Negara kasatuan Republik Indonesia.
4) Bagaimanakah cara mewujudkan dan mempertahankan sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Indonesia.

Batasan Masalah

Pembahasan dalam karya tulis ini hanya dibatasi pada dasar-dasar kerangka pemikirannya saja, sehingga lebih tepatnya karya tulis ini hanya sebagai pengantar untuk membuka pemikiran ke arah yang lebih realistis dan mengena terhadap suatu masalah. Hal ini karena pembahasan tentang sistem ekonomi diperlukan suatu pemahaman dan studi yang *comprehensive* terhadap berbagi faktor dan sektor yang ada dalam perekonomian suatu negara.

Sasaran dan Tujuan

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini yaitu terumuskannya berbagai konsep pemikiran dengan metode kuantitatif maupun metode kualitatif untuk menjawab problematika ekonomi dan sosial yang dihadapi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini yaitu terumuskannya kerangka dasar pemikiran sistem ekonomi dan sosial yang tepat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cara mewujudkan serta mempertahankan sistem tersebut di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. Dasar Filsafat, Etika, Moral, Dan Tatanan Ekonomi Serta Sosial Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dasar Filsafat Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu sistem ekonomi agar bisa diterapkan dan bisa bertahan sampai akhir jaman harus berdasarkan suatu filsafat yang digali dan dikembangkan dari masyarakat penganutnya. Republik Indonesia sebagai suatu negara *(state)* telah memiliki dasar filsafat negara yang digunakan yaitu Pancasila, sehingga semua ssistem yang ada di Indonesia harus mendasarkan kerangka pikir yang sesuai dengan filsafat negara tersebut.

Sistem ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila harus mau dan mampu membuat pemikiran dengan dasar sila-sila dalam Pancasila dengan segala kebaikan dan keburukannya. Dasar-dasar filsafat ekonomi yang berdasarkan Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Dasar Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa

Dasar filsafat pertama ini menunjukkan sifat religius keagamaan. Sifat religius ini menjadi dasar berpikir pertama sebelum mulai berpikir ke dasar lain.

Secara ekonomi sifat religius ini dapat diartikan bahwa alam semesta beserta isinya ini adalah milik Tuhan termasuk faktor-faktor produksi bahkan manusia-pun milik Tuhan. Manusia ini sebagai makhluk Tuhan diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur alam semesta untuk kebaikan hidup manusia di dunia tanpa melupakan Tuhan sebagai sang penciptanya.

Materi yang diterima manusia di dunia adalah hak yang harus diterima sebagai imbalan manusia yang telah mengelola dan mengatur alam semesta ini. Manusia mendapatkan materi di dunia ini sebagai hak yang harus diterima karena faktor keturunan atau kebetulan serta berkat usaha ddan kerja kerasnya yang mendapat rahmat dan ridho dari Tuhannya. Secara lebih mudah dapat diartikan manusia mendapat materi karena belas kasihan Tuhan terhadap manusia yang telah berusaha dan bekerja keras untuk mencari materi.

Dasar filsafat religius ini mendasarkan diri pada hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya yang telah diatur dalam agama dan kepercayaan yang dianutnya. Sifat religius ini sangat abstrak dan sulit untuk diuji secara material karena hanya dapat dirasakan oleh "rasa" atau hati nurani yang paling dalam yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan mungkin secara materi mustahil untuk dapat diuji keberadaannya.

Di Republik Indonesia ini dasar tidak hanya sebagai dasar negara tetapi semua orang Indonesia harus ber-Tuhan dalam arti harus berdasar agama atau kepercayaannya masing-masing. Hal ini seperti pidato Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI sebagai berikut:

Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhan-nya sendiri-sendiri.[1]

Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita, ialah Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.[2]

2. Dasar Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dasar kedua yaitu kemanusiaan, dalam artian ekonomi konsepsi manusia yang utuh, yaitu manusia sebagai manusia bukan manusia dalam artian yang lain atau disamakan dengan yang lain.

---

1 Ir. Soekarno, 1950. *Lahirnya Pancasila.* Penerbit Dua-R, Bandung, halaman 21
2 *Ibid.* Halaman 22.

Manusia mempunyai tiga unsur utama yang tidak bisa dipisahkan yaitu *body, mind, spirit*. *Body* adalah aspek tubuh jasmaniah, *mind* adalah kemampuan berpikir dan pemupukan penegtahuan, dan *spirit* adalah ruh yang menjadi inti diri manusia.[3]

Terminologi lain mengatakan bahwa manusia mempunyai cipta,rasa dan karsa. Cipta ialah daya nalar yaitu kemampuan manusia meneglola dan mengatur alam sekitarnya dengan pikiran dan logikanya, rasa ialah hati nurani yaitu hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia mempunyai rasa dan perasaan yang berupa feeling, dan intuisi, karsa ialah kegiatan manusia yang berbentuk usaha nyata (*action*) untuk melakukan kegiatan manusia yang dirasanya baik.

Cipta, rasa dan karsa serta *body, mind, spirit* ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan bersama dan saling mempengaruhi untuk menghasilkan kegiatan yang baik di dunia. Apabila cipta, rasa, dan karsa serta *body, mind, spirit* berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan menghasilkan manusia yang utuh, tetapi sesuatu manusia yang cacat unsur kemanusiaannya.

Adil dan beradab merupakan hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus baik tehadap sesamanya. Adil berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu apa haknya sendiri. Beradab artinya mempunyai adab, sopan, santun, susila yang artinya mau dan mampu menghormati orang lain termasuk bangsa lain.

Kemanusiaan yang dimaksud ialah manusia yang memiliki *body, mind, spirit* atau cipta, rasa, dan karsa yang utuh dan mampu mengerti haknya sendiri dan mampu menghormati hak orang lain dengan dasar susila.

Jadi konsepsi kemanusiaan ini adalah manusia yang utuh yang tidak dapat disamakan dengan materi yang ada di dunia termasuk uang. Dasar ini menghendaki manusia sebagai pengelola dan pengatur kegiatan ekonomi dan bukan manusia sebagai unsur ekonomi yang bisa dieksploitasi untuk kegiatan ekonomi, sehingga manusia ditempatkan sebagai manusia ekonomi dan bukan manusia yang buas dan serakah.

Nilai manusia tidak bisa diukur dengan ketrampilannya, pendidikannya, profesionalismenya, tetapi diukur sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Nilai manusia ini tidak bisa disamakan atau *equivalent* dengan nilai uang seberapapun besarnya.

3. Dasar Ketiga Persatuan Indonesia

Dasar ketiga ini merupakan dasar nasionalisme Indonesia. Secara konsepsi ekonomi dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia harus mau bekerjasama dalam suasana gotong-

3 Ace Partadiredja. 1994. *Aspek Religius Spiritual Dalam Ekonomi Pancasila.* Termuat dalam Mubyarto dan Boediono (editor). Sistem Ekonomi Pancasila Edisi 1. BPFE Yogyakarta, halaman 91.

royong tanpa meninggalkan unsur-unsur Ketuhanan dan Kemanusiaan. Persatuan Indonesia menuntut penyebaran sumber-sumber daya ekonomi untuk dieksploitasi demi kesejahteraan bersama.

Konsepsi ini bukan berarti nasionalisme yang sempit atau *chauvinisme* atau *uber alles,* tetapi nasionalisme yang luas demi kesejahteraaan bersama, seperti pidato Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI:

> *Tuan-tuan jangan berkata bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.*[4]

Konsepsi ini mendorong dan membolehkan kita untuk bekerjasama dengan bangsa lain termasuk menerima globalisasi, tetapi dengan melihat ke dalam yaitu kemampuan ekonomi bangsa sendiri.

4. *Dasar Keempat Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.*

Dasar Keempat yaitu kerakyatan. Dalam konspsi ekonomi dapat diartikan sebagai demokrasi ekonomi atau lebih tepatnya sosial demokrasi ekonomi. Sosial demokrasi ekonomi ialah suatu bentuk pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat yang diatur oleh negara lewat pemerintahan yang mendapat legitimasi rakyat. Hal ini dapat dilihat pada pidato Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI sebagai berikut:

> *Negara Indoesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu".*[5]

Dasar kerakyatan ini melahirkan sosok sosial demokrasi ekonomi Indonesia yang bercirikan utama suatu demokrasi rakyat, rakyat yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan mempunyai nasionalisme. Pengertian rakyat disini bukan hanya orang miskin, nelayan miskin, buruh, dan pengangguran, tetapi lebih luas lagi yaitu semua warga negara Indonesia. Jadi konglomerat, orang Cina, dan orang asing lainnya yang mengakui sebagai warga negara Indonesia adalah rakyat Indonesia.

Proses penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR/ MPR. Realisasinya wakil-wakil rakyat inilah yang menbuat suatu Undang-Undang mengenai tatanan ekonomi dan sosial harus mendapat persetujuan wakil rakyat di DPR/ MPR.

4 Ir. Soekarno. *Op. cit.* halaman 18
5 *Ibid.* halaman 20.

5. Dasar Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dasar kelima yaitu keadilan ekonomi dan keadilan sosial yang harus sama. Konsepsi keadilan sangat banyak tetapi keadilan yang dianut di Indonesia adalah keadilan distributif. Secara ekonomi keadilan distributif (*distributif justice*) yaitu pendapatan yang cukup layak bagi kemanusiaan.[6] Pendapatan yang layak ini dalam artian layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sosial setiap manusia (warga negara).

Pengertian keadilan sosial yang dianut Indonesia sebenarnya lebih luas lagi dari keadilan distributif, yaitu keadilan yang menyangkut keadilan ekonomi, sosial, dan politik yang harus merata pada setiap rakyat Indonesia. Meminjam istilah Ir. Soekarno keadilan yang dimaksud yaitu politik-ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Konsepsi keadilan menurut Ir. Soekarno yang beliau sampaikan dalam sidang BPUPKI sebagai berikut:

> *Dalam tiga hari ini saya belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia.*[7]
>
> *Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawratan yang memberikan hidup, yakni positive accomodative democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil ? yang dimaksud dengan Ratu Adil adalah Sociale-rechwardigheit Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memanga betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip sociale-rechwardigheit ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi-pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.*[8]

Dari pendapat Ir. Soekarno tersebut penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa keadilan sosial yang dimaksud adalah politik-ekonomi demokrasi yang mampu membuat rakyat sejahtera. Dalam konsep ekonomi yaitu pembagian sumber-sumber daya ekonomi yang ada secara merata dan adil dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Semangat atau jiwa dan merupakan inti dari filsafat Pancasila ialah semangat gotong-royong. Gotong royong ialah suatu bentuk kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah yang harus dikerjakan bersama-sama saling tolong-menolong tanpa kecuali di bawah

---

6 Mubyarto, 1994. *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*. Penerbit PT Pustaka LP3ES, Jakarta, halaman 22.
7 Ir. Soekarno. *Op. cit.* Halaman 19
8 ***Ibid*.** halaman 20-21.

pimpinan anggota masyarakat yang dipercaya untuk mencapai tujuan bersama. Konsep gotong-royong ini dalam ekonomi dapat diartikan bahwa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan maka harus dikerjakan secara bersama-sama untuk kebaikan dan kemakmuran bersama.

Sedangkan istilah kekeluargaan yang berasal dari kata keluarga yang berarti kumpulan orang-orang yang masih satu keturunan , lalu ditambah imbuhan ke-an menjadi sebuah kata benda kekeluargaan. Arti kekeluargaan yaitu kumpulan orang-orang yang masih satu keturunan ini saling tolong-menolong dan bekerjasama di bawah pimpinan orang tua atau orang yang dituakan. Tentang inti ajaran Pancasila yang gotong-royong ini dapat dipahami pada pidato Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI di bawah ini:

Negara Indonesia yang kita dirikan ini haruslah negara gotong-royong! alangkah hebatnya! negara gotong-royong ini.

"Gotong-royong" adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara! Kekeluaragaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terormat Soekarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantin gantulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, kepentingan bersama! itulah gotong-royong.[9]

Dasar filsafat Pancasila ini apabila digambarkan akan membentuk sebuah gambar layang-layang yang kuat dan kokoh untuk diterbangkan seperti pada lampiran gambar 1.1. Pada lampiran gambar 1.1 tersebut menggambarkan tentang hubungan filsafat pancasila yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa (filsafat ketuhanan) untuk mencapai kebahagiaan spiritual dan berporos (berpangkal) di dunia pada filsafat kemanusiaan untuk mencapai kebahagiaan material di dunia dengan penyelesaian masalah secara demokratis kerakyatan yang diliputi oleh semangat persatuan dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial sehingga terbentuk masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Hubungan yang terjadi adalah hubungan dua arah yang menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pancasila adalah saling berkaitan erat satu sama lain yang diselenggarakan dengan penuh kegotong-royongan.

Peranan dari filsafat Pancasila ini dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar berfikir, bertindak dalam segala kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga pola berpikir sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan juga harus berpijak dari filsafat Pancasila ini bila ingin diterapkan di Indonesia.

Dasar pemberian nama sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan ini didapat dari dasar kelima (keadilan sosial) dan dasar keempat (kerakyatan) untuk mengelola pasar. Secara

9 *Ibid.* Halaman 23

ekonomi, pasar ialah tempat terjadinya mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi sehingga bisa menimbulkan transaksi ekonomi. Definisi yang lebih luas lagi, yaitu pasar ialah semua kegiatan yang ada di alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan (baik berwujud materi ataupun bukan), sehingga dunia menjadi lebih dinamis. Jadi sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan dapat didefinisikan sebagai berikut: suatu himpunan dari berbagai konsep dan teori serta hubungan-hubungan yang ada tentang terjadinya mekanisme permintaan dan penawaran yang dikelola dengan cara kerakyatan dan berkeadilan sosial tanpa meninggalkan unsur ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan.

Sebenarnya nama lengkap sistem ini ialah sistem ekonomi yang berdasarkan pasar dikelola secara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berlandaskan pemikiran dari filsafat kemanusiaan dan dijalankan oleh pelaku ekonomi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dengan semangat persatuan Indonesia.

Dasar Etika dan Moral Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Etika ialah ajaran atau gari sebesar tentang tata kesopanan dan akhlak bagi setiap pelaku ekonomi, sedangkan moral berupa ajaran tentang kesusilaan dan budi pekerti yang mulia. Etika dan moral ini berperan dalam membina mental pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan menjadi suatu manusia yang mau dan mampu bertanggung jawab kepada agama, nusa, dan bangsa, serta masyarakat disekitarnya di saping terhadap diri pribadinya. Etika dan moral ini harus dipahami dan lambat laun akan bisa menjadi budaya ekonomi dan sosial bangsa Indonesia.

Sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia juga harus dibangun di atas landasan etika dan moral bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Dasar moral ini harus dijalankan oleh semua pelaku ekonomi baik pemerintah maupun individu-individunya. Moral dan etika ini bertujuan untuk membentuk suatu budaya ekonomi dan sosial nasional dan untuk melindungi sistem ekonomi dan sosial dari penyimpangan-penyimpangan oleh para pelakunya untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan sistem ekonomi Indonesia ialah membentuk suatu masyarakat yang berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[10] Menurut GBHN dari berbagai edisi penyusunan ialah untuk membentuk suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila atau dalam istilah orde reformasi ini ialah untuk membentu suatu masyarakat madani.

---

10 Pembukaan UUD 1945 alinea 2

Moral sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Moral Ketuhanan yang dimaksud adalah Ketuhanan yang berkeprimanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial, dapat dirinci sebagai berikut:

A. Semua pelaku ekonomi harus mempunyai Tuhan dan meyembah Tuhannya masing-masing sesuai dengan ajaran agama atau aliran kepercayaan yang dianutnya.

B. Semua pelaku ekonomi harus menyadari bahwa materi yang diterima ini merupakan pemberian Tuhan, sehingga menghasilkan manusia yang mau menerima keadaan tanpa mengurangi semangatnya untuk terus berusaha di dunia ini.

C. Semua pelaku ekonomi harus tabah dan tawakal dalam menghadapi situasi, karena pada hakekatnya alam semesta ini adalah milik Tuhan.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Moral kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial, dapat dirinci sebagai berikut:

A. Semua pelaku ekonomi harus memiliki jiwa kemanusiaan yang utuh yaitu cipta, rasa, dan karsa atau *body, mind, spirit.*

B. Semua pelaku ekonomi dilarang mengadakan eksploitasi terhadap manusia secaar berlebihan tanpa memikirkan unsur kemanusiaannya untuk tujuan-tujuan ekonomi .

C. Dilarang adanya praktek penghisapan terhadap manusia baik oleh sesama manusia (contoh: rentenir) maupun oleh negara (contoh: pengenaan pajak yang tinggi) maupun pihak lainnya (contoh: meninjau ulang sistem suku bunga).

D. Balas jasa ekonomi yang diterima oleh manusia sebagai tenaga kerja harus sesuai untuk mencukupi kebutuhan kemanusiaannya.

3) Persatuan Indonesia

Moral persatuan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan, berkeprimanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial, dapat dirinci sebagai berikut:

A. Setiap pelaku ekonomi harus bekerjasama dalam suasana gotong-royong.

B. Setiap pelaku ekonomi harus mampu menempatkan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat (kepentingan sosial) di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

4) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Moral kerakyatan yang dimaksud adalah Kerakyatan yang ber-Ketuhanan, berkeprimanusiaan, berpersatuan, dan berkeadilan sosial, dapat dirinci sebagai berikut:

A. Setiap pelaku ekonomi harus mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap semua permasalahan yang dihadapi pada kegiatan perekonomian.

B. Setiap pelaku ekonomi harus memahami dan melaksanakan konsep sosial demokrasi ekonomi dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan ekonomi.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Moral Keadilan yang dimaksud adalah Keadilan yang ber-Ketuhanan , berkeprimanusiaan, berpersatuan, dan berkerakyatan, dapat dirinci sebagai berikut:

A. Pemerintah harus mau dan mampu membagi sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang dipunyai secara adil dan merata.

B. Setiap pelaku ekonomi tidak boleh memupuk kekayaan terlalu banyak, apabila masih ada orang yang kekurangan.

C. Tidak ada monopoli yang tidak melibatkan pengusaha kecil dan menengah (baik oleh negara, swasta, koperasi dan individu) dalam penguasaan atas cabang-cabang produksi.

D. Setiap pelaku ekonomi sebaiknya mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya.

Demikianlah dasar moral dan etika yang mendasari sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan, walaupun hanya diuraikan secara terbatas pada masing-masing dasar.

Tatanan Ekonomi dan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berbicara mengenai suatu tatanan ekonomi dan sosial maka sebagai dasar pemikiran kita menggunakan undang-undang yang berlaku bagi suatu negara yangdigunakan untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial negara tersebut. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia undang-undang dasar yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar 1945. Tatanan ekonomi ialah:

> *keseluruhan kode-kode peraturan yang mengatur pengorganisasian dan struktur suatu perekonomian nasional serta proses ekonominya dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga penanggung jawab perancangan, pengendalian, dan pengadministrasian perekonomian bersangkutan.*[11]

---

11 Heinz Lampert, 1994. *Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federal Jerman.* Penerbit Puspa Swara, Jakarta, halaman 1

Sedangkan tatanan sosial dalam konsepsi ekonomi ialah

> *keseluruhan jalinan kelembagaan dan norma-norma yang mengatur kedudukan sosial individu dan kelompok dalam suatu masyarakat, sejauh kedudukan tersebut didasarkan atas faktor ekonomi (seperti: penghasilan, kekayaan atau profesi) ataupun hubungan sosial antar anggota masyarakat dalam kerangka ekonomi (misal: hubungan industri).*[12]

Tujuan utama tatanan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari pengaturan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah:

1. Menciptakan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.[13]
2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.[14]
3. Memajukan kesejahteraan umum.[15]
4. Mencerdaskan kehidupan bangsa.[16]
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[17]
6. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[18]

Fungsi dari tatanan ekonomi dan sosial dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pengamanan program pembangunan nasional.
2. Pengkoordinasian setiap aktivitas kegiatan ekonomi.
3. Tatanan ekonomi dan sosial ini sebagai dasar untuk mencapai tujuan negara.
4. Sebagai dasar politik ekonomi untuk menghilangkan kesenjangan-kesenjangan sosial (baik ketimpangan pendapatan, maupun ketimpangan antar wilayah).
5. Untuk menjaga saling terjadinya kerjasama (gotong-royong) antar pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan.
6. Untuk menghilangkan dampak buruk dari persaingan (contoh: adanya kemiskinan, adanya penurunan moral).
7. Mengantisipasi kegagalan pasar sebagai mekanisme yang tidak kelihatan yang berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian.

---

12 *Ibid.* halaman 45
13 Pembukaan UUD 1945 alinea 2
14 Pembukaan UUD 1945 alinea 4
15 Ibid
16 Ibid
17 Ibid
18 Ibid

Tatanan ekonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

I. Hal keuangan negara (pasal 23)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah , maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan nama mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya ditetapkan dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Hal kesejahteraan sosial : bentuk badan usaha dan distribusi sumberdaya ekonomi (pasal 33)

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negar dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tatanan sosial dalam artian ekonomi menurut UUD 1945 sebagai berikut:

I. Tentang kewarganegaraan : jaminan negara atas kesamaan hukum dan pekerjaan yang layak (pasal 27)

1. Segala warga negar bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

II. Agama : peletakan pemikiran ekonomi di atas filsafat ketuhanan

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

III. Pendidikan : jaminan untuk mendapatkan pendidikan

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

IV. Jaminan Sosial (pasal 34)

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Tatanan ekonomi dan sosial ini akan dijabarkan oleh beberapa undang-undang sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, sekarang berdasarkan tap MPRS No : XX/ MPRS/ 1968. Pada karya tulis ini hanya diuraikan berdasarkan UUD 1945 saja karena bersifat sebagai kerangka dasar pemikiran sistem ekonomi dan sosial yang tepat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan dari tatanan ekonomi dan sosial ialah sebagai norma hukum yang memiliki sifat mengikat setiap pelaku ekonomi untuk membuatnya dengan suatu hukum yang tegas dan jelas. Hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya moral dan etika serta suasana kompetisi yang sesuai dengan dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Pelaksanaan tatanan ekonomi dan sosial ini mempunyai suatu asumsi yang penting yaitu harus disertai penegakan hukum yang kuat serta transparansi setiap kegiatan ekonomi.

Dari tatanan ekonomi dan sosial yang dilandasi oleh dasar filsafat, etika, dan moral Pancasila dapat dibuat suatu kerangka dasar pemikiran sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku seperti pada lampiran gambar 2.1. Pada lampiran gambar 2.1 merupakan skema dasar pemikiran sistem ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara Tuhan dan masing-masing individu merupakan hubungan pribadi yang berdasarkan hubungan ketuhanan. Hubungan ini menghasilkan persebaran faktor-faktor produksi (tanah, kapital, keahlian) kepada masing-masing individu yang berdasarkan 'kemurahan' Tuhan dan usaha yang keras. Hubungan antara individu dengan individu merupakan hubungan sosial yang berdasarkan pranata sosial yang berlaku. Faktor-faktor produksi tersebutdiserahkan oleh individu kepada negara karena loyalitas dan jiwa nasionalismenya.

Negara mengelola dan menguasai faktor-faktor produksi serta menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara untuk kemakmuran rakyat banyak. Negara mendistribusikan faktor-faktor produksi tersebut kembali ke individu-individu dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), koperasi, produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak saja (seperti: produksi pangan, sandang, papan (perumahan) dan negara juga harus menyediakan *public goods and services*, seperti jaringan infrastruktur, penyediaan sarana pendidikan, kessehatan. Ketiga badan usaha ini bekerjasama dalama suasana kegotong-royongan , penentuan harga dan kuantitas ditentukan juga dalam mekanisme pasar sosial kerakyatan untuk hasil produksi BUMN dan mekanisme pasar murni untuk hasil produksi BUMS dan koperasi.

Sistem pengaman sosial kerakyatan harus dibuat untuk mengantisipasi kegagalan mekanisme pasar dan kegagalan pelaku ekonomi dalam persaingan, sehingga akan terwujud masyarakat adil makmur material dan spiritual. Hubungan ekonomi yang terjadi ini berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR.

III. Problematika Ekonomi Dan Sosial Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apa yang di Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Reppublik Indonesia

Suatu sistem yang mengadopsi ekonomi pasar, maka penentuan harga dan kuantitas yang diminta ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran yang menghasilkan suatu titik keseimabangan. Mekanisme pasar ini akan bergerak "liar" tak terkendali apabila tidak ada mekanisme pengatur dan pengendalinya, sehingga dapat menimbulkan suatu goncangan ekonomi maha dahsyat (suatu siklus konjungtur).

Sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Indonesia ini mengadopsi teori-teori untuk mengendalikan pasar yang dianut oleh negara kapitalis maupun sosialis yang disebut mekanisme pasar sosial kerakyatan.

1. Mekanisme Pasar Sosial Kerakyatan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang mekanisme pasar sebaiknya akan diberi batasan tentang barang dan jasa yang akan diproduksi. Secara ekonomi barang dibagi menjadi 2 yaitu : 1) barang konsumsi yaitu barang yang langsung dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi inipun dibagi menjadi 3 yaitu a) barang kebutuhan pokok ialah barang yang dibutuhkan manusia untuk hidupnya, contoh: pangan, sandang dan papan, b) barang kebutuhan pokok tetapi penting (barang sekunder), yaitu barang yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu hidup mannusia, contohnya antara lain: pendidikan, kesehatan, rekreasi, c) barang kebutuhan kemewahan (barang tersier) yaitu barang yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kepuasan manusia dan meningkatkan status sosial manusia, contoh: mobil mewah, alat telekomunikasi modern. 2) Barang modal yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, contoh: mesin. Sedangkan jasa yang diproduksi dibagi 2 yaitu : 1) Jasa yang langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup, contoh : pendidikan, pengobatan, dan hiburan 2) Jasa yang menambah kegunaan barang, contoh : asuransi, pergudangan, angkutan barang.

Penentuan mekanisme pasar sosial kerakyatan ini berdasarkan klasifikasi terhadap barang dan jasa menurut kepentingan untuk hidup. Hal ini berkaitan dengan 3 bentuk badan usaha yang dimiliki oleh sistem.

2. Mekanisme Pasar Sosial Kerakyatan Pada Barang Kebutuhan Pokok

Pada barang kebutuhan pokok ini pengelolaan dan pengendalian terhadap mekanisme pasar harus mendapat perhatian lebih, karena sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Penentuan harga oleh pasar yang terus dijaga agar tetap dalam jangka waktu yang relatif lama. Pada konsep ini akan terjadi kekakuan harga yang cukup lama, karena penentuan harga mendasarkan pada kemampuan rakyat untuk bisa membeli dan menggunakannya, bukan pada biaya produksinya (baik biaya rata-rata maupun biaya marginalnya). Secara grafis dapat dilihat pada lampiran gambar 3.1. Pada lampiran gambar 3.1. tingkat harga yang terjadi tidak ditentukan oleh keseimbangan antara kurva D (permintaan) dengan kurva S (penawaran), tetapi ditentukan oleh pemerintah. Harga yang terjadi disebut harga pasar sosial (P_s). Penentuan harga sosial ini berdasarkan kemampuan rakyat untuk membelinya yang berdasarkan penghasilan perharinya (inilah tugas badan perencana untuk menentukan tingkat harga). Agar harga tetap atau realtif tetap pemerintah dituntut untuk memenuhi setiap permintaan konsumen (rakyat/ masyarakat), sehingga titik keseimbangan akan tetap berada pada tingkat harga yang sama atau pemerintah menyiapkan stok untuk memenuhi kecenderungan kenaikan permintaan. Hal ini bisa dihitung secara matematik untuk menentukan berapa stok barang yang dibutuhkan, walaupun penyusun menyadari mungkin ada kesalahan penghitungan, tetapi hal ini bisa diatasi dengan menentukan tingkat produksi dengan cara menentukan target produksi.

Tingkat harga sosial yang ditetapkan ini berbanding lurus dengan pendapatan disposabel(Y_d). Secara matematik dapat ditulis sebgai berikut : $P_s = \alpha + \beta Y_d$, dimana P_s= harga sosial, Y_d= pendapatan disposabel. Secara grafis dapat disajikan pada lampiran gambar 3.2. Pada lampiran gambar 3.2 memperlihatkan hubungan positif yaitu bila harga sosial naik maka Y_d juga akan naik dengan perubahan yang proporsional. Penentuan tingkat harga ini akan menjamin keadilan ekonomi terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena semua orang akan mendapatkan barang kebutuhan pokok sesuai dengan tingkat penghasilannya. Hal ini mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok pasti terjangkau oleh masyarakat dan tidak menimbulkan goncangan sosial yang hebat bila ada kenaikan harga sebab kenaikan harga relatif lebih lama sesuai dengan kenaikan tingkat penghasilan. Kebijakan penentuan harga seperti ini pasti memerlukan subsidi yang banyak dan perencanaan yang baik.

Konsepsi seperti ini memang secara hitung-hitungan bisnis tidak menguntungkan, tetapi akan menjamin keadilan sosial dan ekonomi serta bisa meredakan gejolak harga barang kebutuhan pokok. Badan usaha yang cocok untuk menggunakan mekanisme pasar sosial kerakyatan ini ialah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) karena bidang usahanya sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

3. Mekanisme Pasar Pada Barang Kebutuhan Sekunder, Tersier, Modal, dan Jasa.

Mekanisme pasar yang terjadi ialah interaksi antara penawaran dan permintaan yang terjadi tanpa campur tangan langsung oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa

tidak akan ada pengawasan harga secara ketat, pemberian subsidi, diskriminasi harga, dan bentuk-bentuk proteksi lannya.

Pemerintah bisa mencampuri pasar lewat kebijakan pajak dan kebijakan deregulasi lainnya yang menguntungkan rakyat. Mekanisme penentuan harga dan kualitas seperti pada lampiran gambar 4.1. Pada lampiran gambar 4.1 terlihat bahwa harga dan kuantitas yang terjadi adalah murni karena interaksi antara permintaan dan penawaran. Disamping itu penentuan harganya berdasarkan biaya produksi. Badan usaha yang cocok untuk ini adalah BUMS dan koperasi, karena adanya *profit oriented* (orientasi untuk mencari keuntungan) untuk berbisnis.

Kesimpulan sementara yang dapat diambil pada perekonomian dengan sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1) Memproduksi barang kebutuhan pokok dengan menggunakan mekanisme pasar sosial kerakyatan.
2) Memproduksi barang kebutuhan sekunder, tersier, modal, dan jasa dengan menggunakan mekanisme pasar murni dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Bagaimanakah Memproduksi Dalam Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerayatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945 telah mengatur tentang pola distribusi sumber daya alam dan 3 bentuk badan usaha (BUMN, koperasi, BUMS). Pola distribusi sumber daya alam dan 3 bentuk badan usaha inilah yang akan menjawab bagaimana memproduksinya. Pada kesempatan pertama akan diuraikan tentang mekanisme pasar dan pola distribusi sumber daya alam:

1. Mekanisme Pasar dan Pola Distribusi Sumber Daya Alam (SDA)

Mekanisme pasar sumber daya alam inilah yang akan menentukan pola distribusi sumber daya alam. Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi negara menguasai sumber daya alam.

Mekanisme pasar yang terjadi ialah interaksi antara permintaan (D) dan penawaran (S) sumber daya alam dalam pasar sumber daya alam. Dikarenakan sumber daya alam dikuasai oleh negara tetapi dimiliki oleh individu maka negara lewat pemerintah yang sah harus menerapkan pajak sumber daya alamterhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penetapan pajak sumber daya alam (Ts) ini berbanding lurus dengan nilai sumber daya alam yang digunakan dalam fungsi produksi atau nilai hasil sumber daya alam itu,

apabila perusahaan menghasilkan output sumber daya alam maka pajak SDA (T_s) merupakan fungsi dari nilai SDA dalam fungsi produksi dan nilai keluaran SDA. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$T^s = \alpha + \beta SD$ Dimana : - Ts = pajak sumber daya alam
- SD = Nilai SDA dalam fungsi produksi atau nilai output SDA

Hubungan pajak SDA (T_s) dengan nilai SDA (SD) adalah hubungan positif. Secara grafis dapat digambarkan pada lampiran gambar 5.1. Pada lampiran gambar 5.1 terlihat bahwa T_s berpengaruh positif terhadap SD secara proporsional. Setiap tambahan SD maka akan menambah nilai TS secara proporsional.

Mekanisme pasar sumber daya alam dengan penerapan pajak SDA dapat dilihat pada lampiran gambar 5.2. Pada lampiran gambar 5.2 terlihat keseimbangan mula-mula pada titik e^1 dan harga pada P^1 dan kuantitas pada Q^1. Setelah dikenakan pajak SDA sebesar T_s maka keseimbangan berubah ke e^2 dengan harga P_2 dan kuantitas Q_2. Hal ini terlihat ada pergeseran kurva S ke kiri yang berarti pengurangan penawaran sehingga kuantitas berkurang sebesar ΔQ.

Manfaat pengenaan pajak SDA ini antara lain 1) Penghematan penggunaan sumber daya alam. 2) Lebih mengefisienkan produk yang menggunakan SDA. 3) Menjamin kelestarian SDA. 4) Produksi jadi ramah lingkungan. 5) Menambah penerimaan negara. Dampak buruknya ialah menaikkan harga SDA dan kenaikan juga terjadi pada produk yang menggunakan SDA dalam fungsi produksinya.

Pengenaan pajak sumber daya alam mempengaruhi pola distribusi SDA seperti pada lampiran gambar 5.3. Pada lampiran gambar 5.3 terlihat bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Di dalam mekanisme pasar sumber daya alam terlihat ada permintaan dari BUMN, koperasi, BUMS untuk memenuhi fungsi produksinya. Pengenaan pajak SDA berdasarkan nilai SDA pada fungsi produksi dan nilai keluaran SDA pada perusahaan pengeksploitasi SDA. Pajak SDA ini akan menambah penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak SDA ini dialokasikan untuk subsidi pada pasar sosial kerakyatan dan rehabilitasi SDA serta lingkungan. Pola distribusi ini akan menguntungkan rakyat karena secara tidak langsung rakyat telah ikut menikmati hasil dari SDA.

2. Badan Usaha Milik Negara

BUMN ialah sebuah badan usaha atau perusahaan yang pengelolaan dan pemilikannya oleh negara. Dasar hukum dari BUMN dalam tatanan ekonomi ialah pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Peranan dan fungsi penting dari BUMN dalam tatanan ekonomi dan sosial ialah sebagai produsen barang kebutuhan pokok. Hal ini karena kebutuhan pokok menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara.

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud ialah pangan, sandang, dan papan. Barang kebutuhan pokok ini merupakan "Hak ekonomi yang paling azasi", karena tanpa tersedianya dengan cukup barang kebutuhan pokok ini maka manusia akan sengsara atau bahkan akan mati. Hal ini menandakan bahwa barang kebutuhan pokok ini menguasai hajat hidup orang banyak. Penting bagi negara dapat diartikan tanpa tercukupinya barang kebutuhan pokok ini maka negara akan lemah, karena rakyatnya lemah fisiknya, terserang wabah penyakit, dan akan banyak kejahatan untuk memperebutkan barang kebutuhan ini.

BUMN diberi peranan seperti ini karena BUMN adalah milik negara sehingga negara bisa melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan mengatur jumlah stok serta menjaga jumlah barang yang dapat mengimbangi permintaannya. Lewat BUMN ini juga pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya dengan menjamin tingkat harga yang terjangkau dengan pendapatan masyarakat dan dengan memanfaatkan jaringan birokrasi pemerintah dapat mendistribusikan ke seluruh wilayah negara.

3. *Koperasi*

Koperasi ialah suatu badan usaha yang bernggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi ini merupakan suatu sarana untuk membuat masyarakat terutama pelaku-pelaku ekonomi untuk berlatih demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa produksi berasal dari masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Konsep demokrasi ekonomi dalam koperasi ini menjamin terjadinya pemerataan dan pertumbuhan secara serempak.

Fungsi dan peranan koperasi disamping untuk melatih jiwa demokrasi ekonomi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebenarnya fungsi dan peranan koperasi hampir sama dengan BUMS, cuma koperasi memproduksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan anggatanya, bukan untuk mencukupi kebutuhan pasar.

Perkembangan koperasi di Indonesia kurang menggembirakan. Koperasi di Indonesia dilatarbelakangi sejarah yang buruk. Di jaman Orde Lama koperasi dimanfaatkan sebagai alat politik dengan ekonomi komandonya. Di jaman Orde Baru terjadi kesalah tafsiran tentang koperasi yang hanya dimasukkan sebagai organisasi sosial yang berasaskan kekeluargaan (berdasarkan UU No. 12 tahun 1967), sehingga koperasi tak ubahnya sebagai lembaga sosial tempat orang-orang mencari bantuan.

Sekarang dengan pemahaman yang baru, bahwa koperasi sebagai badan usaha (berdasarkan UU No. 25 tahun 1997) yang berarti boleh memupuk keuntungan untuk mensejahterakan anggotanya. Dalam perkembangannya sekarang koperasi "Di anak emaskan" oleh pemerintah dengan proteksi lewat undang-undang, fasilitas modal serta pembentukan suatu departemen khusus. Hal ini berdampak buruk pada koperasi, yaitu koperasi seperti "orang asing di rumah sendiri", dalam artian koperasi merasa asing dengan persaingan yang sangat keras. Hal itulah yang menyebabkan koperasi perkembangannya kurang menggembirakan di samping pengelolaan dan manajemennya kurang baik.

Agar koperasi berkembang pesat di samping proteksi lewat undang-undang dan permodalan, maka koperasi tidak perlu dibuatkan suatu departemen khusus yang membuatnya asing dalam persaingan. Disamping itu koperasi juga memerlukan suatu pasar modal sosial untuk mempeeertemukan antara orang yang "senasib" tetapi kelebihan modal dengan koperasi yang kekurangan modal tetapi usahanya mempunyai prospek yang cerah.

4. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

BUMS ialah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Swasta ini dalam artian boleh menjadi milik individu, kelluarga atau kelompok yang berbentuk perseroan terbatas (PT), CV, Firma, usaha dagang dan lain-lain. Dalam sistem perekonomian Indonesia ada istilah pengusaha besar, konglomerat, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Pembedaan ini berdasarkan asset ataupun jumlah tenaga kerjanya.

Perusahaan swasta ini mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu untuk menyediakan barang-barang konsumsi dan barang-barang modal serta barang-barang lainnya sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini karena BUMS adalah badan swasta yang bermotif *profit oriented.* Lapangan usaha perusahaan swasta ini sangat banyak, asalkan lapangan usaha ini tidak menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara, contoh : bidang pertambangan dan eneergi, listrik, telekomunikasi, penyiaran dan lain-lain.

Lapangan usaha BUMS dan koperasi adalah sama, yaitu pada cabang produksi yang tidak penting bagi negara dan tidak menuasai hajat hidup orang banyak agar cabang-cabang produksi yang dikuasai oleh BUMS dan koperasi ini tidak saling berebut yang saling mematikan dalam pasar kompetitif, maka perlu dibuat sebuah pola hubungan gotong-royong antara BUMS dan koperasi yang mampu menjamin pemerataan distribusi dan pengelolaan cabang-cabang produksi , untuk menjamin terdistribusikannya cabang-cabang produksi, untuk menjamin terdistribusikan cabang-cabang produksi ini secara merata maka perlu dibuat suatu undang-undang anti monopoli yang mengatur tentang penguasaan dan pengelolaan cabang-cabang produksi. Hal ini untuk mengantisipasi suasana persaingan yang mematikan serta menjamin distribusi pengelolaan cabang-cabang produksi.

Dari uraian di atas terlihat sekali bahwa BUMS dan koperasi sangat penting untuk menjalankan roda perekonomian. Peranan dari pemerintah (negara) yaitu membuat aturan-aturan main yang cocok serta menjamin bahwa aturan main itu ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam perekonomian.

Pola hubungan kegotong-royongan antara BUMS dan koperasi dapat dilihat pada lampiran gambar 6.1. Pada lampiran gambar 6.1 merupakan pola hubungan gotong-royong antara BUMS menengah, kecil, dan koperasi dengan BUMS besar. Badan-badan usaha ini saling bergotong-royong untuk memproduksi suatu barang konsumsi dan barang modal. Sifat hubungan ini adalah hubungan dua arah, yaitu baik dalam menyediakan fungsi produksi maupun memproduksi barang. Mula-mula BUMS besar, menengah, kecil dan koperasi bergotong-royong untuk mencukupi fungsi produksi (tenaga kerja, tanah, bahan baku, modal) dan yang terpenting (terutama BUMS besar) mau membagi cabang produksi yang dikuasainya secara adil. Jadi dalam membuat suatu barang diharuskan untuk bergotong-royong baik dalam memenuhi fungsi produksi maupun penguasaan cabang-cabang produksi.

Penyusun dapat mengambil suatu contoh sebagai berikut : suatu perusahaan besar memproduksi pesawat terbang, dalam pemenuhan fungsi produksi yang berupa teknisi, tanah, bahan baku, dan modal uang, bisa minta bantuan (gotong-royong) pada pengusaha menengah, kecil, dan koperasi dalam bentuk pembagian pengerjaan komponen pesawatnya, antara lain : sayap dan ekor pesawat kepada koperasi, badan pesawat pada pengusaha menengah, dan kabin pesawat pada pengusaha kecil, sehingga perusahaan pesawat ini tinggal menambahkan mesin dan teknologi yang digunakan, untuk kemudian merakit bagian-bagian pesawat ini menjadi suatu pesawat yang siap untuk diterbangkan.

5. Hubungan Gotong-royong Pada Ketiga Badan Usaha

Dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyaatn masing-masing badan usaha telah memiliki tugas, fungsi dan peranannya masing-masing, tetapi masing-masing badan usaha ini harus menjadi satu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam hubungan ini harus ada kegotong-royongan antar negara (baca: Pemerintah) dengan badan-badan usaha, sebagai berikut:

1) Negara membuat suatu peraturan yang menjamin terjadinya gotong-royong serta menjamin penegakan peraturan itu.
2) Negara harus menyediakan *public goods and services*, yaitu barang-barang kebutuhan umum antara lain : jaringan infrastruktur, pembangunan rumah ibadah, pendirian sekolah, dan rumah sakit.

Badan-badan usaha berperan sebagai penyedia semua kebutuhan masyarakat baik barang konsumsi maupun modal . Pola hubungannya dapat dilihat pada lampiran gambar 7.1. Pada lampiran gambar 7.1 terlihat bahwa negara sebagai pemegang pola distribusi SDA yang didistribusikan lewat mekanisme pasar SDA kepada BUMN, koperasi, BUMS. Ketiga badan usaha ini saling gotong-royong dengan pengusaha kecil dan menengah. BUMN yang diberi hak memonopoli untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (pangan, sandang dan papan), masih juga harus kerjasama dengan pengusaha kecil khususnya untuk bidang pangan yaitu dengan petani. Hal ini karena Indonesia adalah negara pertanian yang masih bercorak subsisten, sehingga petani masih bisa berproduksi di bawah pembinaan BUMN. Walaupun BUMN memegang monopoli tetapi masih harus bergotong-royong dengan pengusaha kecil dan menengah, sehingga monopolinya tidak dalam bentuk monopoli yang jahat tetapi monopoli yang merakyat. Ketiga badan usaha ini saling bergotong-royong membentuk perusahaan Indonesia. Istilah perusahaan Indonesia ini sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam artian ekonomi. Perusahaan Indonesia inilah yang menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat lewat mekanisme pasar sosial kerakyatan maupun mekanisme pasar murni. Negara (baca: pemerintah) harus menyediakan *public goods and services* untuk mendukung usaha perusahaan Indonesia ini. Penyediaan *public goods and services* ini lewat departemen-departemen yang dimiliki oleh pemerintah bukan oleh BUMN.

6. Sistem Pengaman Sosial Kerakyatan

Sistem pengaman sosial kerakyatan ini suatu jaring pengaman yang dibuat untuk mengantisipasi dampak buruk dari pasar yairu kalah dalam persaingan. Dampak buruk dari pasar ini tidak hanya berpengaruh pada bidang ekonomi tetapi juga pada bidang sosial. Dalam bidang ekonomi akan ada pengangguran yang meluas dan berdampak pada pemerosotan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pengaman sosial ini berupa tatanan hukum yang mampu mengantisipasi kekalahan dalam persaingan. Menurut UUD 1945 yang menyatakantentang pentingnya sistem pengaman sosial ini termuat dalam pasal 34 yaitu : fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurut penyusun alangkah baiknya sebelum menjadi fakir miskin dan anak terlantar harus diantisipasi dulu.

Tatanan di bidang sistem pengaman sosial ini menuntut dibuatkan beberapa produk undang-undang baru antara lain:

1) Paket Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang memuat tentang:
   a. Perlindungan kecelakaan di tempat kerja.
   b. Perlindungan jam kerja yang teratur

   c. Perlindungan tata kepegawaian
   d. Perlindungan kepastian sistem pengupahan
   e. Perlindungan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan jaminan hari tua.

2) Mekanisme Pasar Tenaga Kerja, yang berisi tentang:
   a. Kebijakan penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*)
   b. Asuransi pengangguran dan dana bantuan pengangguran.
   c. Sistem perekrutan pegawai.

3) Paket Undang-undang Jaminan Sosial, yang berisi tentang:
   a. Jaminan perawatan kesehatan
   b. Jaminan hari tua bagi pekerja
   c. Jaminan promosi pendidikan
   d. Jaminan tercukupinya kebutuhan pokok.

Semua undang-undang yang diususlkan di atas sangat berat bagi suatu negara yang baru berusaha untuk membangun, tetapi kita harus mulai memikirkannya dari sekarang untuk bisa mencapai tujuan negara.

Produksi dilakukan untuk siapa?

Dalam sistem ekonomi sosial pasar kerakyatan produksi barang dan jasa diperuntukkan bagi semua rakyat tanpa kecuali, distribusi hasil produksi ini harus bisa merata dan mengalami peningkatan dalam jumlah maupun volumenya.

Produksi untuk rakyat dengan menjamin keadilan dan peningkatan ini merupakan wujud akhir demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa produksi dilakukan oleh semua rakyat untuk kesejahteraan semua rakyat dibawah pimpinan anggota masyarakat yang ditunjuk.

Produksi untuk rakyat ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual untuk menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur di masa depan.

Prasyarat yang Dibutuhkan untuk Mewujudkan Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Membangun suatu sistem perekonomian dibutuhkan beberapa syarat wajib yang harus terpenuhi. Syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1) *Syarat Ideologi*

   Syarat ideologi yaitu ada ideologi yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia, dalam hal ini Pancasila. Pancasila harus mau , mampu, dan bisa menjiwai dan sebagai dasar pemikiran oleh para pelaku ekonomi.

2) *Syarat Politik*

   Syarat politik yang diminta yaitu pemenuhan pilihan publik, dalam artian pemenuhan hampir semua tuntutan publik (masyarakat) terutama golongan oposisi. Pemenuhan pilihan publik ini akan menciptakan ketenangan politik, dengan catatan bahwa semua masyarakat bisa dan boleh mengeluarkan dan menyampaikan pilihannya. Hal ini berarti di buka kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat, dan berkumpul, agar pilihan-pilihan publik ini tidak melenceng dari tujuan nasional maka perlu disusun undang-undangnya.

3) *Syarat Ekonomi*

   Syarat ekonomi yang dibutuhkan yaitu harus mau merubah struktur perekonomian yangada sekarang ini (kapitalis semu) menjadi suatu perekonomian yang demokratis , menuju terwujudnya sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan.

   Penguasaan negara atas BUMN yang menguasai berbagai cabang produksi perlu ditinjau ulang, koperasi dibangun dengan paradigma yang baru dan diatur tentang penguasaan cabang-cabang produksi oleh swasta serta di buat aturan persaingan yang sehat dalam suasana kegotong-royongan, serta meninjau ulang sistem suku bunga.

4) *Syarat Hukum*

   Syarat hukum yang diinginkan yaitu dibuatkan dan direvisi berbagi produk hukum yang tidak mencerminkan demokrasi ekonomi serta tidak memihak pada rakyat.

5) *Syarat Sosial*

   Syarat sosial yang diingikan yaitu adanya dukungan dari rakyat yang sangat pluralistik ini dengan penuh tanggung jawab.

6) *Syarat Pemikiran*

   Syarat pemikiran yang diinginkan yaitu adanya evolusi pemikiran yang terus berkembang maju sesuai dengan dinamika masyarakat.

Cara Mempertahankan Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah sistem ini diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus ada inovasi dan kreasi di bidang produksi, distribusi dari segenap pelaku ekonomi untuk menghindarkan sistem dari bahaya resesi atau depresi ekonomi.

Inovasi ialah penemuan sesuatu yang baru dan berbeda dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi di bidang teknik produksi dan distribusi ini akan menghasilkan suatu penemuan yang baru yang lebih mengefisienkan perekonomian, contoh : penemuan mesin uap, listrik, telepon dan lain-lain. Inovasi tidak hanya pada produsen barang dan jasa tetapi juga sektor industri lainnya termasuk inovasi sektor perbankan, sektor politik, sektor pemerintahan, dan lain-lain.

Kreasi ialah suatu pengembangan dari sesuatu yang sudah ada untuk lebih disempurnakan lagi. Kreasi ini juga harus pada semua sektor, sehingga sistem akan bergerak lebih dinamis lagi sesuai dengan dinamika masyarakat.

Sinergi antara inovasi dan kreasi di semua sektor kehidupan ini akan membawa sistem ke jaman yang lebih gemilang, karena sistem mampu mengantisipasi tantangan jaman. Dalam berinovasi dan berkreasi ini jangan lupa bahwa sistem diletakkan dan didasarkan pada filsafat, moral dan etika Pancasila yang berisi tentang Ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan.

IV. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang konsep sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan sebagai dasar pemikiran ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) A. Sistem ekonomi pasar sosial kerakyaatn ialah suatu sistem yang bertumpu pada filsafat kemanusiaan yang berasal dari filsafat Ketuhanan dengan penyelesaian masalah secara demokratis kerakyatan yang dilipputi oleh semangat persatuan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

   B. Dasar etika dan moralnya, yaitu etika dan moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan serta keadilan sosial.

2) Fungsi dan peranan tata ekonomi dan sosial di negara kesatuan Republik Indonesia sebagai norma hukum yang memiliki sifat mengikat setiap pelaku ekonomi untuk mentaatinya dengn sanksi hukum yang tegas dan jelas.

3). A.. a. Produksi untuk menghasilkan barang kebutuhan pokok rakyat lewat mekanisme pasar sosial kerakyatan.

   b. Produksi untuk menghasilkan barang sekunder, tersier, modal, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mekanisme pasar murni.

   B. a. Pola distribusi sumber daya alam sesuai dengan mekanisme sumber daya alam.

   b. BUMN memprodukai barang untuk kebutuhan pokok rakyat lewat mekanisme pasar sosial kerakyatan.

c. Koperasi memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan anggotanya, baru sisanya dijual ke pasar lewat mekanisme pasar murni.
d. BUMS memproduksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan pasar lewat mekanisme pasar murni.
e. Hubungan yang terjadi diantara ketiga badan usaha adalah kompetisi yang diliputi oleh semangat gotong-royong.
f. Sebagai langkah antisipasi untuk mengantisipasi kegagalan kompetisi harus disiapkan sistem pangaman sosial.

C. Produksi diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual.

4) A. Untuk mewujudkan suatu pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya, yaitu : syarat ideologi, politik, ekonomi, hukum, sosial, dan pelopor konsep pemikirannya.

B. Untuk mempertahankan dan memelihara kelangsungan sistem maka diperlukan inovasi dan kreasi .

Demikianlah kesimpulan akhir yang dapat diambil dari pembahasan tentang sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

Arsyad Anwar, Thee Kian Wie, dan Iwan Jaya Azis (editor). *Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Kerjasama antara FEUI, ISEI, dan PT GramediaPustaka Utama, Jakarta, 1992.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Djoyohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Umum*. Penerbit Yayasan Obor, Jakarta, 1991.

Djoyohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar dan Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Penerbit PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1992.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Bahan Penataran P4 Pola 100 jam Terpadu: Tentang UUD 1945, GBHN, P4*. 1994.

Ebenstein William, Fogelman Edwin, dan Jemadu Alex. *Isme-Isme Dewasa Ini Edisi Kesembilan (terjemahan)*. Penerbit PT Erlangga, Jakarta, 1994.

Grossman Gregory. *Sistem-sistem Ekonomi (terjemahan)*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1987.

Hatta. *Ekonomi Berencana.* Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1971.

Heinz Lampert. *Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman (terjemahan).* Penerbit Puspa Swara, Jakarta, 1994.

Lewis Arthur. *Dasar-Dasar Perencanaan Ekonomi Negara (terjemahan).* Penerbit BHRATARA, Jakarta, 1962.

Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila.* Penerbit PT Pustaka LP3ES, Cetakan Ketiga, 1994.

Mubyarto dan Boediono (editor). *Ekonomi Pancasila Edisi 1.* Penerbit BPFE, Yogyakarta, Cetakan Kelima, 1994.

Samuelson Paul dan Nordhaus William. *Ekonomi Edisi Kedua belas.* penerbit PT Erlangga, Bandung, 1994.

Soekarno. *Lahirnya Pancasila.* Penerbit Dua-R, 1985.

Soekanto Soerdjono. *Sosiologi: suatu pengantar.* Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika Logika Etika.* Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 1985.

Sunoto. *Mengenal Filasafat Pancasila: Pendekatan Melalui Etika Pancasila* Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 1985.

TRANSFORMASI SISTEM EKONOMI INDONESIA MENUJU SISTEM EKONOMI SOSIALISME PASAR

Ledi Trialdi, I Kadek Dian Sutrisna A. dan Joko Arif *)

I. Pendahuluan

Didalam mengatur perekonomian suatu negara diperlukan sebuah sistem. Sistem yang dipilih haruslah mampu menjiwai kehendak dan keinginan dari kebanyakan masyarakat dalam negara tersebut, karena sebuah sistem tidak mungkin akan berjalan dengan baik bila tidak ada kebutuhan dari masyarakat sendiri terhadap berdirinya sistem tersebut.

Pada umumnya semua sistem ekonomi yang ada berkehendak untuk mensejahterakan masyarakat di dalam sistem tersebut. Artinya kesejahteraan sosial lah yang diutamakan. Maksud seperti ini terdapat pula salam sistem yang dinamakan kapitalisme sekalipun. Meski prinsip kebebasan individu yang sangat diutamakan di dalam kapitalisme namun tujuan akhirnya, seperti yang dikmukakan Adam Smith (pelopor dari kapitalisme), adalah untuk mencapai efisiensi perkonomian yang akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Jika pada akhirnya tujuan awal tersebut tidak tercapai,,kesejahteraan sosial tidak kunjung bisa diwujudkan, itu permasalahan yang berbeda. Sistem sosialisme pun yang memang belum pernah diwujudkan secara murni seperti halnya kapitalisme, belum bisa pula benar-benar memeberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Masalah inilah sebenarnya yang hendak kami bahas dalam tulisan ini. Pada dasarnya kami setuju dengan sistem sosialisme, akan tetapi dalam pelaksanaannya kami merasa perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus mengenai penerapan sistem ini. Pada bagian pertama makalah ini akan kami bahas mengenai sistem ekonomi sosialisme *centrally planned* yang telah dijalankan oleh negara Uni Soviet. Selanjutnya pada bagian kedua akan kami bahas mengenai sistem ekonomi sosialisme pasar atau *decentralized socialism*, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara Eropa Timur. Dari analisis terhadap kedua sistem sosialisme di atas, dengan merujuk kepada buku *Comparing Economic Systems* (Andrew Zimbalist dkk.*), Politics, Economics and Welfare* (Robert A. Dahl dkk) beserta tambahan dari beberapa buku lainnya, kami lebih menyetujui sistem ekonomi sosialis pasar untuk berlaku

---

*) Ledi Trialdi, I Kadek Dian Sutrisna A., dan Joko Arif : ketiganya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

dalam sistem perekonomian di Indonesia. Dengan demikian yang kami anggap penting untuk ditelaah secara lebih mendalam dalam tulisan ini adalah mengenai proses transformasi kepada sistem ekonomi sosialisme pasar.

Pada bagian akhir dari tulisan kita kaan lihat bagaimana kondisi di Indonesia, baik dari segi institusional maupun hukum untuk berlakunya sistem ekonomi sosialisme pasar.

II. Sistem Ekonomi Perencanaan Sentral Sosialis

Sejarah Sistem Ekonomi Perencanaan Sentral Sosialis

Sistem ekonomi sosialis jika dilihat dari sejarahnya merupakan kelanjutan dari pemikiran Karl Marx (1818-1883) dalam bukunya, *Das Capital* (1867). Pemikiran Karl Marx ini lahir sebagai kritik atas kapitalisme. Menurut teori *political economy* yang dikemukakan oleh Marx dengan menggunakan analisis dialektik *Hegelian*, dikatakan bahwa di dalam kapitalisme ada pertentangan kepentingan antara kaum pemilik modal dengan kaum buruh yang terus di eksploitasi. Pertentangan antara kaum buruh dengan pemilik modal inilah yang pada akhirnya akan meruntuhkan kapitalisme. Proses transisi dari kapitalisme ke sosialisme adalah suatu *natural historical process* yang tak dapat dielakkan lagi akibat perkembangan di dalam masyarakat kapitalis itu sendiri.

Karl Marx serta para pemikir sistem ekonomi sosialis lainnya seperti Frederick Engels dan Vladimir Lenin , berdasarkan teori revolusi sosial yang dikembangkannya, mengemukakan bahwa kapitalisme membangkitkan *material preconditions* melalui pola produksi dan arah pembangunannya untuk transisi revolusioner kapitalisme ke arah sistem sosialis komunis. Pergantian sistem kapitalisme oleh sosialisme ini tidak dapat terjadi begitu saja. Kapitalisme hanya dapat dihentikan melalui sebuah revolusi sosial yang dapat menghilangkan kekuatan politik kaum kapitalis dan tekanan serta eksploitasi terhadap kaum buruh. Revolusi oktober yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 adalah revolusi sosial yang dilakukan oleh kekuatan sosial revolusioner, yaitu kaum proletar, adalah untuk membangun sosialisme, mengakhiri perbedaan sosial atas kelas-kelas, menjadikan seluruh anggota masyarakat pekerja, dan menghilangkan sumber dari seluruh eksploitasi manusia oleh manusia. [1]

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dilakukanlah apa yang disebut dengan *sosialist nationalization*. *Sosialist nationalization* atau nasionalisasi sosialis adalah pengambilalihan secara revolusioner kepemilikan dari kelas yang mengeksploitasi oleh negara yang proletar dan mengubahnya menjadi milik negara, milik sosialis. Menurut

1 *Political Economy: Sosialism*, ed. G.A. Kozlov, Progress Publishers, Moscow 1977, hal. 20

Lenin, proses sosialisasi produksi menurut cara sosialis bukanlah hanya sekedar masalah pengambilalihan kepemilikan, melainkan juga perusahaan yang menjadi milik masyarakat haruslah benar-benar tersosialisasi. Kegiatan atau aktivitas dari perusahaan tersebut harus mementingkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Untuk tujuan tersebut maka harus dilakukan pengawasan keuangan yang ketat, kontrol produksi dan distribusi produk yang diorganisasikan dalam perusahaan yang sosial, dan lain-lain. Dengan demikian di dalam sistem ekonomi sosialisnya Marx dan Engels yang kemudian diterapkan oleh Lenin di USSR, digunakan mekanisme ekonomi perrencanaan sentral. Perencanaan seperti ini bersifat menyeluruh dan mencakup keseluruhan perekonomia dimana ada satu penguasa pusat yang merencanakan, mengatur dan memerintahkan pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya.[2]

Mekanisme Perencanaan Sentral Sosialis dalam Praktek

Zimbalist, Sherman dan Brown dalam buku mereka mengemukakan definisi sistem ekonomi perencanaan sentral sebagai berikut: *"Centrally Planned Socialism, which is defined as a system in which the central government plans all major prices, outputs, and technologies; the plan is a law that must be obeyed by managers".* [3]

Dalam sistem ini, penetapan besarnya harga dan siapa yang memproduksi ditentukan melalui suatu perencanaan yang sifatnya terpusat yang dilakukan oleh sebuah badan yang disebut *Central Planning Board* (CPB), sebuah badan yang menangani perencanaan ekonomi. Kekuasaan ekonomi secara penuh terpusat di tangan badan tersebut. Ia menetapkan tujuan, prioritas dan sasaran rencana. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah diletakkan dalam rencana pada jangka waktu yang telah ditetapkan, ia mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber ekonomi dengan komando dan pengawasan secara terencana.

CPB menentukan barang dan jasa yang akan dihasilkan dalam suatu periode perencanaan, misalnya satu tahun. Dari survei atas faktor-faktor input yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan input antara yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah unit output (biasanya didasarkan atas hubungan input-output seara historus), CPB menyusun daftar input yang dibutuhkan oleh output yang ingin dihasilkan tersebut. Di sini sebuah mekanisme berjalan, dimana CPB berusaha memaksimalisasi produksi namun dihadapkan pada *constraint* input yang tersedia . Ketersediaan input membatasi jumlah output, dengan anggapan bahwa teknologi tidak berubah.

---

2 M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembanguan dan Perncanaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hal. 664

3 Andrew Zimbalist et al., Comparing Economic System: A political-economic Approach, (Florida: Hartcout Brace Jovanovich, Inc., 1989), hal. 10

CPB harus mengetahui sumber-sumber daya apa saja yang tersedia, apa yang dibutuhkan, dan keterkaitan di antara keduanya. Disini terkihat penting adanya keseimbangan antara jumlah yang dibutuhkan (permintaan) dan jumlah yang tersedia (penawaran). Jika terjadi ketidakseimbangan (*excess demand* atau *excess supply*), maka harus dilakukan langkah-langkah administratif untuk mengurangi kelebihan pada salah satu sisi.

Pada sisi penawaran, ada tiga sumber utama dari input: produksi, stok dan impor. Pada sisi permintaan, dua elemen utamanya adalah: permintaan anatar industri, dimana output industri yang satu digunakan sebagai input industri yang lain, serta permintaan akhir (*final demand*), terdiri atas output yang ditujukan untuk investasi, konsumsi rumah tangga dan ekspor. Akan menjadi permasalahan yang sangat rumit untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam hal ini CPB bertugas menghitung berapa besar kebutuhan di tiap-tiap sektor elemen permintaan untuk dijadikan dasar dalam menghitung jumlah produksi yang akan dihasilkan. Sepintas kelihatan sangatlah sederhana, tetapi keterkaitan antar industri menunjukkan bahwa input dari satu industri ditentukan pula oleh perencanaan output dari industri lainnya. Disinilah hakekat dari ekonomi komando kembali erperan. Keputusan di tingkat pusat akan menentukan industri apa yang akan dijadikan andalan dalam sebuah periode perencanaan. Industri inilah yang akanmenjadi ujung dari lingkaran keterkaitan tersebut.

Dalam memenuhi permintaan rumah tangga, satu hal yang unik adalah bahwa keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang dari tiap-tiap rumah tangga diasumsikan sama. Jika dalam teori pasar dikenal adanya istilah *consumer* dan *producer surplus,* maka dengan adanya perencanaan kedua konsep ini menjadi tidak relevan. Harga yang dipatok pada tingkat tertentu menyebabkan inflasi secara nominal tidak terjadi. Demikian juga dengan alokasi sumber daya. Jika dalam kapitalisme sumber daya akan bergerak ke sektor yang tengah berkembang dan menawarkan *rate of return* yang tinggi, mobilitas sumber daya dalam sistem ini terjadi akibat perencanaan dan komando. CPB telah mengalokasi jumlah tertentu dari sumber daya untuk masing-masing sektor. Perencanaan ekonominya mengandung keputusan makroekonomi dan mikroekonomi. CPB memutuskan distribusi pendapatan nasional ke daklam investasi, konsumsi dan jasa pemerintah, termasuk pula pertahanan. Pada prinsipnya perencanaan pusat didasarkan pada pertimbangan makroekonomi jangka panjang.

Keunggulan dari Sistem Ekonomi Perencanaan Sentral Sosialis

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersamaan dengan industrialisasi perekonomian adalah daya tarik utama dari Perencanaan Sentral Sosialis (PSS). Karena PSS mampu, paling tidak secara teoritis, untuk menghasilkan dampak-dampak tertentu yang

diinginkan ke arah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Beberapa dampak positif dari PSS terlihat dalam bidang sosio-ekonomi dan ekonomi itu sendiri, terutama dalam hal mobilisasi sumber daya, pengurangan ketidaksempurnaan mekanisme pasar dan stabilitas ekonomi.

Kepemilikan secara sosial membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih mungkin terjadi tanpa harus mengakibatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan, suatu kondisi yang sering terjadi sebagai *trade off* dalam usaha suatu perekonomian untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dari sudut lain, PSS memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat produksi tidak diserahkan kepada kekuatan pasar, melainkan diawasi dan diatur oleh badan perencanaan dengan cara yang paling efisien. *Capital Formation* di dalam PSS menjadi lebih besar dibandingkan sistem ekonomi pasar karena modal digunakan seefisien mungkin untuk lebihmeningkatkan tingkat *saving* dan *invesment*. Adanya proses *extensive development* akan lebih meningkatkan penggunaan tenaga kerja, baik yang tidak terpakai dari sektor pertanian maupun *unemployment urban labour*. Keberadaan eksternalitas yang terjadi akibat ketidak sempurnaan pasar dapat dikurangi dalam sistem PSS, dengan adanya kepemilikan sosial dan sentralisasi. Selain semua yang telah disebutkan diatas, sistem PSS juga lebih menjamin adanya kestabilan ekonomi pada tingkat harga dan upah, serta kemampuan untuk meminimalisir pengaruh dari tekanan dan gangguan siklis ekonomi eksternal.

Kelemahan Sistem Ekonomi Perencanaan Sentral Sosialis

Sesuai dengan karakteristik dari sistem PSS, dimana setiap kegiatan perekonomian diatur oleh penguasa pusat, maka sistem ekonomi ini akan mengakibatkan gangguan pada efisiensi ekonomi. Sistem PSS selalu tidak memuaskan karena sistem ekonomi ini sangat rumit. Dalam rangka mennningkatkan output suatu komoditi, diperlukan peningkatan output komplementernya atau pengurangan output komoditi subtitusinya. Seperti yang dikatakan oleh Lewis, "Hasil perencanaan dengan komando ini selalu berupa kelangkaan pada beberapa barang dan surplus pada barang lainnya." [4]

Sistem ekonomi PSS ini berkaitan erat dengan rezim birokratis dan totaliter. Tidak ada kemerdekaan ekonomi, dimana pasar konsumen dan pasar buruh ditentukan oleh penguasa perencanaan . Karena pendistribusian dan pengendalian harga sangat bergantung kepada birokrasi, maka kekuasaan birokrasi yang absolut ini akan mengarahkan pada kecenderungan untuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem ini menimbulkan apa yang disebut Lewis sebagai kecenderungan pemaksaan yang mengakibatkan standarisasi yang

4. M. L. Jhingan, *op. cit.*, hal. 665

berlebihan demi mempermudah proses produksi. Produk dibuat standar dan tanpa ragam. Pembuatan suatu barang dengan satu jenis dan usaha, serta menghilangkan dorongan untuk berinovasi. Dengan adanya prioritas ekonomi yang mengabaikan sektor pertanian, maka terjadilah pengangguran tersembunyi yang ditransfer dari sektor pertanian ke sektor industri. Prioritas ekonomi dan *extensive development* memang mengakibatkan peningkatan output dari sektor industri tetapi mengakibatkan semakin terabaikannya sektor pertanian dan kinerja jangka panjang dari sektor tersebut. Industrialisasi juga semakin meningkatkan urbanisasi dan menambah masalah-masalah sosial di daerah perkotaan.

III. Sistem Ekonomi Sosialis Pasar

Teori mengenai sistem ekonomi sosialis pasar dikemukakan pertama kali oleh Oskar Lange sebagai jawaban atas kritik yang dilontarkan oleh Friedrich Hayek mengenai sistem ekonomi sosialis dengan perencanaan yang terpusat. Lange beranggapan bahwa dengan sosialis pasar atu sosialis yang terdesentralisasi, tak akan timbul lebih banyak masalah dari perusahaan swasta yang kompetitif dalam mencapai tingkat harga yang rasional dan alokasi sumber daya secara optimal.

Dalam sistem ekonomi sosialis pasar Lange, alat-alat produksi dalam perekonomian dimiliki oleh publik. *Central Planning Board* (CPB) tetap ada dalam sistem sosialis ini dengan fungsi antara lain: mengangkat direktur dari perusahaan dan dari keseluruhan industri; menetapkan aturan mengenai keputusan produksinya; menetapkan harga atas semua barang kapital dan input-input non tenaga kerja (harga barang-barang konsumer dan tingkat upah ditentukan secara bebas oleh kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar); memilih tingkat akumulasi kapital (investasi) dan menetapkan tingkat bunga untuk menyeimbangkan jumlah penawaran dari modal dengan permintaannya.

Keputusan mengenai apa, berapa banyak, dan bagaiman produksi dibuat oleh manajer dari perusahaan dan industri-industri berdasarkan dua aturan yang dibuat oleh CPB. Aturan pertama adalah bahwa perusahaan harus berproduksi hingga mencapai tingkat outpu dimana biaya marjinal produksinya sama dengan harga output yang ditetapkan oleh CPB. Aturan yang kedua adalah bahwa perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksinya hingga jumlah dollar yang dikeluarkan untuk masing-masing faktor sama dengan jumlah tamabahan output yang dihasilkan.

Penetapan harga oleh CPB dalam sistem Lange adalah dengan melalui mekanisme pasar. CPB menetapkan harga output berdasarkan penurunan dan peningkatan inventori perusahaan. Bila inventori perusahaan naik, artinya telah terjadi kelebihan penawaran di pasar, maka CPB akan melakukan penurunan harga. Begitu pula sebaliknya. Pada akhirnya,

jika dua aturan CPB di atas dijalankan, melalui pasar bebas dalam tenaga kerja dan barang-barang konsumsi, sistem akan menghasilkan suatu alokasi sumber daya yang efisien.

Sistem Lange ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Dengan CPB yang memiliki pandangan yang lebih luas mengenai perekonomian dibandingkan dengan *enterpreneur* swasta dalam menetapkan harga, maka ia akan mampu mencapai keseimbangan harga yang tepat dengan waktu uji yang lebih singkat.
2. Dalam menetapkan harga, CPB bisa secara eksplisit dan langsung memasukkan biaya sosial sebagai tambahan dari biaya perusahaan.
3. Kepemilikan publik atas alat-alat produksi akan menghilangkan *property income* yang selama ini dianggap sebagai sumber dari ketimpangan pendapatan.
4. Perekonomian yang tetap sosialis tidak akan menjadi subjek dari fluktuasi siklus bisnis (*bussiness cycle*).

Sistem Lange mendapat kritikan dari Hayek dan Bergson, antara lain karena kemungkinan besar sulitnya CPB untuk menetapkan harga atas ratusan ribu barang yang ada dalam perekonomian dan sulitnya CPB untuk memperoleh data yang akurat dan periodik mengenai informasi jumlah inventori. Disamping itu pula CPB akan sulit untuk mengontorl setiap perusahaan bahwa ia benar-benar mengikuti dua aturan CPB dalam menetapkan output dan meminimalkan biaya.

Hal yang kedua dari kritik di atas mungkin muncul karena keterbatasan pengetahuan CPB mengenai insentif dan motivasi dari manajer maupun pekerja. Sistem Lange ini mungkin akan berhasil bila masyarakat yang ada demokratis dan publik merasa bennar-benar terwakili oleh pasar dari barang konsumer dan oleh CPB, karena dari kondisi seperti inilah akan terjadi suatu keinginan umum untuk melakuakan kerjasama.

Kekurangan dari sistem Lange diatas coba diatasi oleh seorang ahli ekonomi Polandia, Wlodzimierz Brus. Ia mengusulkan adanya pembenahan institusional dengan memasukkan partisipasi pekerja di dalam amnajemen perusahaan. Artinya, di dalam perusahaam dengan demikian akan berkembang pengambilan keputusan, insentif, dan tanggung jawab yang kolektif. Inilah ciri yang paling esensial dari usaha desentralisasi yang efektif. Dengan adanya partisipasi pekerja pada manajemen perusahaan, masyarakat yang dmokratis di dalam sistem ekonomi sosialis pasar seperti yang diinginkan oleh Lange terwujud pada tingkat perusahaan.[5]

Sistem ekonomi sosialis pasar Lange dan self-management yang dikemukakan oleh Brus inilah yang kemudian diterapkan oleh Yugoslavia. Dengan sistem seperti ini, Yugoslavia

5. Andrew Zimbalist et al., *op. cit.*, hal.389-394

bisa menghasilkan kinerja ekonomi yang cukup baik meskipun ia dihadapkan oleh banyak kesulitan, antara lain misalnya perbedaan kultural, etnik dan bahasa, masyarakat yang terpecah belah akibat perang, populasi masyarakat desa yang cukup besar, dasar industri yang kecil, serta lemahnya tingkat pendidikan dan sedikitnya pengetahuan mengenai proses manufaktur dari pekerja yang sangat kurang kondusif untuk tingkat partisipasi pekerja yang tinggi dalam manajemen.

IV. Transformasi Menuju Sistem Ekonomi Sosialis Pasar

Rasionalitas Sistem Ekonomi Sosialis Pasar

Setiap sistem ekonomi yang ada pada dasarnya mengarahkan suatu negara kepada suatu proses sosio-politiko-ekonomi untuk mencapai tujuh tujuan dari tindakan sosial yang rasional, antara lain:[6]

1. Kebebasan, yang diartikan sebagai absennya rintangan untuk mewujudkan keinginan. Kondisi ini bisa dimaksimalkan dengan menghilangkan rintangan, merubah keinginan, atau dengan merubah keduanya.
2. Rasionalitas. Untuk memaksimalkan kebebasan dibutuhkan kalkulasi yang rasional dan kontrol.
3. Demokrasi, yang diartikan sebagai prinsip dan metode untuk mengatur konflik yang terjadi antar individu dalam usaha mereka untuk memaksimalkan kebebasannya.
4. Persamaan yang dilihat secara subjektif, yaitu individu bisa mendapatkan persamaan yang sesuai dan proporsional dengan preferensi masing-masing.
5. Sekuritas, yaitu jaminan akan masa depan.
6. Kemajuan, yang diartikan oleh Dahl sebagai peningkatan dari kebebasan.
7. Keterlibatan yang tepat dari pihak-pihak yang ada dalam proses sosial yang terjadi.

Dari ketujuh poin diatas kita bisa menarik inti dari permasalahan sosio-politiko-ekonomi, yakni pemaksimalan kebebasan. Kebebasan sendiri adalah tidak tak terbatas karena adanya keterbatasan alami (fisikal, fisiologikal, teknologikal, dan psikologikal), keterbatasan yang diakibatkan oleh konflik pada tujuan yang dimiliki dalam diri seseorang maupun oleh konsekuensi yang berlawanan dari tindakan pencapaian tujuan dari orang lain. Oleh karena itulah hal yang paling utama untuk memaksimalkan kebebasan ini adalah adanya perhitungan yang rasional dan kontrol.

---

6. Robert A. Dahl & Charles E. Lindblom, *Politics, Economics, and Welfare: Planning and Politico-Economy System resolved inti Basic Social Processes* (New York: Harper Torchbooks, 1953), hal. 28-52

Kontrol bisa dilakukan secara spontan seperti pada ekonomi kapitalis, meskipun biasanya pada akhirnya akan terjadi manipulasi di dalam kontrol tersebut. Kecenderungan buruk dari kontrol yang dilakukan secara spontan ini coba dirubah dalam *centrally planned socialism* dengan melakukan kontrol melalui cara komando. Inilah yang dilakukan oleh sistem ekonomi sosialis pasar, dan tampak lebih rasional dari kedua cara sebelumnya.

Syarat-syarat Transformasi Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pasar

Perpindahan menuju sistem sosialis pasar membutuhkan suatu landasan yang kuat untuk mendukung berjalannya sistem tersebut. Perubahan politik yang mengakui adanya perbedaan dalam nilai dan inisiatif individu, konsensusu sosial dan politik adalah merupakan suatu proses yang bertahap untuk mewujudkan landasan tersebut. Inilah yang dinamakan sebagai *proses transformasi yang mereformasi semua elemen dan mekanisme dalam sistem ekonomi PSS dengan sistem ekonomi pasar.*

Transformasi yang dibutuhkan untuk jalannya sistem ekonomi sosialis pasar dapat digolongkan menjadi empat kategori utama yaitu: (1) privatisasi, (2) marketisasi, (3) stabilisasi, dan (4) pembangunan institusi.[7]

1. Privatisasi

Dalam sistem perekonomian PSS, tidak ada kepemilikan swasta atas perusahaan, semuanya merupakan milik negara dan diatur oleh negara. Disaat birokrasi dan kekuasaan yang korup masuk ke dalam sistem ini, maka sistem tidak akan berjalan secara efisien. Campur tangan pemerintah yang terlalu berlebihan dalam penentuan keputusan ekonomi juga menyebabkan perusahaan negara ini tidak berjalan secara efisien dan malahan akan menimbulkan eksternalitas negatif bagi perekonomian. Oleh karena itulah privatisasi atas perusahaan milik negara ini perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi pembatasan dalam produksi dan ketetapan harga secara irasional (tidak menunjukkan kelangkaan sumner daya yang sebenarnya).

Proses privatisasi ini merupakan bagian transformasi yang sulit untuk dilaksanakan. Permasalahan itu antara lain:

1. Cabang produksi mana yang harus diprivatisasi dan apa akibatnya serta berapa lama.
2. Sifat dan waktu dari restrukturisasi untuk perusahaan negara, contohnya restrukturisasi industri yang mencakup banyak perusahaan; restrukturisasi finansial (penghapusan hutang); restrukturisasi fisik (mengganti peralatan). Dalam proses sebelum dilakukan privatisasi atau perusahaan langsung diserahkan saja kepada pemilik swasta yang baru.

---

7. Morris Bornstein, *Comparative Economic Systems: Models and Cases* (Sydney: Rivhard D. Irwin, Inc., 1989), hal. 381-383

3. Pilihan metode yang digunakan untuk pelepasan aset negara (misalnya, pada tingkat mana perusahaan tersebut harus dijual, seperti Yugoslavia membagi kepemilikan saham perusahaan kepada pekerja).

2. Marketisasi

Marketisasi membutuhkan pergantian dari perencanaan yang terpusat menjadi pelepasan kepada mekanisme pasar untuk barang, jasa dan juga faktor produksi, namun tetap dengan adanya suatu koordinasi dan mekanisme alokasi. Tugas yang paling uatam yaitu dengan mengganti harga yang irasional (tidak menunjukkan rasio kelangkaan) ke dalam *market-clearing price* untuk barang dan pasar faktor (termasuk *financial market*). Tugas yang kedua adalah membangun suatu sistem finansial dan perdagangan luar negeri, termasuk pemebentukan *currency convertability*.

Tetapi proses transformasi harga ini bagaimanapun sangat sulit untuk dilakukan bila harga terlalu jauh dari ekuilibrium dan pentingnya distribusi pendapatan dan produksi sangat besar. Perlu ditekankan disini bahwa privatisasi dan *marketization* sangatlah tergantung pada penciptaan *institution framework* yang tepat.

3. Stabilisasi

Untuk memastikan sistem sosialisme pasar ini berjalan secara efektif maka stabilitas kondisi makroekonomi sangat diperlukan. Stabilisasi tersebut mencakup keseimbangan eksternal dan internal. Disinilah diperlukan suatu alat dan instrumen sebagai sarana untuk menciptakan stabilisasi ekonomi ini, seperti instrumen kebijaksanaan moneter yang secara luas menjamin stabilitas makroekonomi.

4. Pembangunan Institusi

Untuk melepaskan sebagian dari sistem ke dalam mekanisme pasar, maka harus ada suatu institusi yang kuat untuk mengatur jalannya mekanisme pasar tersebut. Inilah yang dijadikan landasan sekaligus kontrol dalam suatu sistem ekonomi sosialis pasar. *Institutional setting* menciptakan suatu *rule of the game* dalam mekanisme pasar. Institusi ini mencakup hukum, kelembagaan dan struktur fiskal. Misalnya diperlukan institusi yang baru untuk perbankan dan pasar modal dan sistem fiskal yang akan dapat menjamin kondisi makroekonomi yang stabil.

Disamping itu hal yang paling penting adalah pemerintahan yang bersih dan tidak korup yang dapat menciptakan iklim dan kondisi persaingan yang sehat. Bisnis yang besar dan pemerintahan yang besar tidak berarti bila tidak adanya masyarakat yang besar sebagai kontrol.

Jadi pembangunan institusi (kelembagaan) inilah yang akan mendasari berjalannya sebuah sistem sehingga dengan institusi yang mantap maka sistem pasar akan berjalan secara efektif.

V. Proses Transformasi Sistem Ekonomi Indonesia

Untuk menerapkan semua kajian dari materi di atas ke dalam sistem perekonomian Indonesia, maka sebelumnya perlu dilakukan analisis tentang sistem perekonomian Indonesia sendiri dengan menggunakan analisis tradisional, yaitu struktur, perilaku dan kinerja.

Saat menganalisis struktur, maka kita akan melihat bagaiman struktur dari sistem ekonomi di Indonesia, yang mencakup filosofi dari sistem ekonomi Indonesia. Perilaku, mencakup segala kebijaksanaan yang telah diambil oleh pemerintah dalam perekonomian kinerja, merupakan kinerja dari segala kebijaksanaan tersebut yang tentunya mencakup *social welfare.*

Struktur Sistem Ekonomi di Indonesia

Dasar bagi sistem ekonomi Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945, yakni demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan, dengan koperasi sebagai lembaga perekonomian yang paling sesuai. Tetapi dalam sistem ekonomi Indonesia kita menerima tiga bentuk badan usaha yaitu badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan koperasi.

Sebagai dasar titik tolak, maka pasal 33 UUD 1945 yang terdiri dari tiga ayat ini perlu dikutipkan disini: (1) Perekonomian disususn sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang paling penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perlu digarisbawahi bahwa menguasai bukanlah berarti memiliki, dan untuk memisahkan pengertian di atas maka diperlukan suatu hukum yang tegas dan berwibawa. Seperti juga pernah dikemukakan oleh Hatta: dikuasai oleh negara tidak berarti bahwa pemerintah sendiri yang menjadi pengusaha dengan segala birokrasi yang ada padanya. Pekerjaan dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Dalam masa peralihan badan-badan itu boleh berbentuk perusahaan-perusahaan negara yang berbentuk badan hukum atau perusahaan-perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas.[8] Sedangkan sektor swasta sendiri tidak tersurat tetapi tersirat dalam UUD 1945.

---

8 Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (jakarta: Penerbit Djambatan, 1960), hal. 24-25

Sektor swasta diatur dalam KUHD yang didasari oleh Aturan Peralihan (Ayat II: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini"), namun sampai sekarang aturan ini belum mangalami tanggapan yang serius sehingga sektor swasta yang bermoralkan persaingan (liberalisme-kapitalisme), nilai transaksi dan motif ekonomi untuk mencari laba, tumbuh pesat dalam perekonomian Indonesia. Inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem perekonomian Indonesia, di satu sisi ada koperasi dengan jiwa kekeluargaan dan kebersamaan yang menunjukkan demokrasi ekonomi, di sisi lain sektor swasta dengan semangat yang individualistis dan bermoralkan persaingan berjiwa liberal-kapitalis.

Pada masa transisi, melalui proses demokratisasi ekonomi, diharapkan dapat tercipta sektor-sektor swasta yang berjiwa koperasi. Ini dapat diwujudkan melalui kapemilikan saham oleh para pekerja/ buruh dalam perusahaan yang bersangkutan sehingga buruh mempunyai *co-responsibility, co-ownership* dan *co-determination*. Di sini diterapkan *participatory* dan *emancipatory* sehingga secara langsung para buruh dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan.

Kebijaksanaan Perekonomian

Melihat adanya dualisme dalam sistem perekonomian di Indonesia, maka perlu ditinjau kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam sistem perekonomian Indonesia selama ini. Pada tahun 1950-1960an, ketika Indonesia menganut sistem ekonomi terpimpin, pemerintah melakukan kebijaksanaan nasionalisasi badan usaha. Politik menjadi panglima pada saat itu sehingga kebijaksanaan pemerintah lebih mengarah pada stabilitas politik. Mulai tahun 1967 yaitu ketika dikeluarkannya UU PMA, terlihat bahwa peran swasta semakin menonjol. Investor asing bebas untuk masuk ke dalam negeri dan menanamkan modalnya dengan menikmati berbagai fasilitas dari pemerintah.

Sejak menurunnya harga minyak bumi pada tahun 1986, penerimaan pemerintah di sektor migas menurun secara drastis sehingga dirasakan perlu untuk meningkatkan tabungan swasta untuk menggairahkan kembali perekonomian. Oleh karena itu dilaksanakanlah beberapa paket deregulasi dari tahun 1983-1988 yang diawali dengan mekanisme pasar (Juni 1983). kemudian, untuk meningkatkan persaingan antar bank dalam memobilisasi dana sebagai dana pembangunan, maka pada tahun 1988 dikeluarkan paket deregulasi yang pada intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan sebuah bank.

Sejak saat itu terlihat kebijaksanaan pemerintah yang lebih mengandalkan mekanisme pasar karena dianggap lebih efisien daripada campur tangan pemerintah yang terlalu banyak dalam perekonomian. BUMN mulai diprivatisasi dan investor asing semakin banyak masuk untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Restrukturisasi sektor perbankan menyebabkan menjamurnya bank-bank swasta dalam sistem perbankan di Indonesia.

Deregulasi ini merupakan suatu usaha restrukturisasi perekonomian, terutama di sektor moneter. Hal ini merupakan usaha untuk mengalihkan peran pemerintah yang terlalu besar. Tetapi restrukturisasi dengan segala paket deregulasinya menyebabkan timbul suatu paradigma baru dalam sistem perekonomian Indonesia. Peran swasta dalam perekonomian semakin besar, dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Ketika unsur politik dan kekuasaan masuk maka terjadilah persaingan yang tidak sehat. Muncullah konglomerat-konglomerat yang dijadikan sebagai motor dalam perekonomian.

Kebijaksanaan mekanisme pasar ini sebenarnya telah melupakan proses transformasi yaitu pembangunan kelembagaan yang sangat penting sebagai landasan dalam mekanisme pasar dimana komponen-komponen kelembagaan tersebut (menurut *Strategic Basic Need)* mencakup struktur kekuasaan (*Power structure*), representasi politik (*Political Representation*), administrasi negara (*Bureaucracy*), lembaga kontrol sosial (pers, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain) dan sistem hukum.

Mengacu pada kajian sistem sosialisme pasar yang sebelumnya mengalami transformasi, maka perlu kiranya dilakukan restrukturisasi dalam sistem perekonomian Indonesia (Swasono, 1993) secara luas yang meliputi berbagai sektor, bidang dan dimensi, antara lain:

(1) Restrukturisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi.
Pemilikan oleh rakyat harus semakin merata dan mengurangi secara struktural konsentrasi-konsentrasi pemilikan dan penguasaan aset.

(2) Restrukturisasi alokatif
Menyangkut alokasi dana-dana pembangunan, baik dana anggaran nasional ataupun daerah, baik yang berasal dari perbankan ataupun dari non bank.

(3) Restrukturisasi spasial
Diperlukan untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan pembangunan serta pertumbuhan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia.

(4) Restrukturisasi sektoral
Diperlukan terutama untuk mencapai keseimbangan antar sektor, baik sektor industri dan pertanian maupun sektor informal-tradisional.

(5) Restrukturisasi strategis
Merupakan upaya untuk memperkuat perekonomian dalam negeri dengan mengurangi segala ketergantungan terhadap pihak luar.

(6) Restrukturisasi pola pikir
Reorientasi ke arah pemihakan lebih banyak kepada hak-hak rakyat.

(7) Restrukturisasi perpajakan
Menerapkan pajak progresif dengan menerapkan prinsip keadilan.

(8) Restrukturisasi di bidang sosial-budaya
Merupakan bagian dari pembangunan institusi, dengan menciptakan budaya pemerintah, hukum , dan rakyat yang demokratis.

Peralihan kebijaksanaan pemerintah yang lebih mengarah pada mekanisme pasar sebenarnya memerlukan suatu proses transformasi secara bertahap (masa transisi) untuk membangun suatu kelembagaan dan infrastruktur yang kuat, yang menjamin berjalannya mekanisme pasar secara efisien dan efektif. Dan yang paling penting diperhatikan adalah kesiapan individu-individu dalam sistem ekonomi untuk malaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ini tentunya sangat berhubungan dengan restrukturisasi sosial budaya masyarakat Indonesia.

VI. Penutup

Dualisme yang terdapat dalam sistem ekonomi Indonesia, dimana di satu sisi pasal 33 UUD 1945 dengan jiwa demokrasi ekonomi dan disisi lain Aturan Peralihan (ayat II) dengan kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang bermoral persaingan (liberalisme-kapitalisme), memerlukan suatu proses demokratisasi menuju pasal UU Pokok Perekonomian Nasional. Ini merupakan masa transisi untuk membangun koperasi sebagai soko guru dan mem Pasal 33-kan KUHD untuk menuju pada sistem ekonomi yang mencerminkan *co-omnership*, *co-determination* dan *co-responsibility*.

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan swasta dengan asas individualistis semakin berkembang dalam perekonomian Indonesia. Hadirnya para konglomerat dan investor asing sebagai motor penggerak perekonomian menciptakan paradigma yang baru dalam sistem ekonomi Indonesia, yaitu paradigma yang bermoralkan persaingan, nilai transaksi, akuisisi motif ekonomi: laba (profit). Dalam hal ini, kebijaksanaan pemerintah juga terlalu banyak memberikan fasilitas untuk berkembangnya kekuatan-kekuatan ekonomi tersebut sedangkan kekekuatan ekonomi rakyat kurang mendapat sentuhan.

Diterimanya bentuk badan usaha swasta dalam sistem ekonomi Indonesia dan selanjutnya ada suatu proses demokratisasi/ mempasal-33-kan badan usaha tersebut, sebenarnya mencerminkan suatu sistem yang masih percaya pada kekeuatan pasar yang memerlukan suatu kontrol untuk dapat mengatur berjalannya pasar agar tetap pada paradigma perekonomian kita yaitu kekeluargaan dan kebersamaan (sistem sosialis). Masa transisi ini merupakan proses untuk menciptakan kontrol dalam sistem dengan suatu usaha membangun infrastruktur pasar yang kuat dan kelembagaan yang mencakup struktur kekuasaan, representasi politik, birokrasi, lembaga kontrol sosial dan sistem hukum sebagai landasan dalam sistem ekonomi pasar yang tetap memegang teguh perekonomian rakyat dan demokrasi ekonoi (sosialisme-pasar).

Dalam proses transformasi inilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan bukannya terlalu banyak mengatur jalannya perekonomian, sehingga distorsi pasar dapat dihindarkan dari masuknya unsur-unsur kepentingan politik. Di sini jelas terlihat harus adanya demarkasi antara kepentingan politik dan kebijaksanaan ekonomi sehingga proses transformasi menuju pada pembangunan kelembagaan ini tidak terganggu oleh peranan pemerintah yang terlalu besar yang mengarah pada etatisme ekonomi.

Jadi kajian dari proses transformasi dari sistem ekonomi sosialis sentral menuju sosialisme pasar inilah yang dapat menyumbangkan pemikiran dalam sistem perekonomian Indonesia, yang masih percaya pada kekuatan pasar dengan tetap pada jiwa dan paradigma kekeluargaan dan kebersamaan.

Daftar Pustaka

Bornstein, Morris. *Comparative Economic System: Models & Cases*. 7th ed. Sidney: Richard D. Irwin Inc., 1994.

Dahl, Robert A. & Charles E. Lindblom. *Politic, Economics, and Welfare: Planning and Politico-Economics Systems Resolved into Basic Social Processes*. New York, Evanston and London: Harper & Row Publisher, 1953.

Galbraith, John Kenneth & Stanislav Menshikov. *Capitalism Comunism and Coexistence from a Bitter Past to a Better Prospect*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1988.

Hatta, Mohammad. *Persoalan Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1960.

Icozlov, G..A. *Political Economy Socialism*. Moskow: Progress Publishers, 1977.

Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Swasono, Sri-Edi. "Menuju Pembangunan Perekonomian Rakyat: Apa tanggung jawab pendidikan tinggi kita". Pidato diucapkan pada Dies Natalis Universitas Janabadra, Yogyakarta, 7 Oktober 1998.

Swasono, Sri-Edi. "Demokrasi Ekonomi Komitmen dan Pembangunan Indonesia". Pidato diucapkan pada pengukuhan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 13 Juli 1988.

Zimbalist, Andrew et. al. *Comparative Economic Systems: Political Economics Approach*. 2nd ed. Florida: Hartcout Brace Jovanovich Inc. Florida, 1989.

PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAN KINERJA EKSPOR INDONESIA DALAM RANGKA PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA

(Kategori Sektor Riil)

*Budi Siswanto dan Priyatno *)*

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Persaingan global merupakan karakteristik utama ekonomi menuju abad 21 yang mengakibatkan semakin terbukanya ekonomi suatu negara terhadap dunia luar. Globalisasi menghasilkan suatu kondisi ke arah pasar bebas *(free trade area)* yang membuat dunia sebagai *borderless states* atau semakin terkikisnya hambatan-hambatan perdagangan, lalu lintas keuangan internasional dan keluar masuknya arus modal serta tenaga kerja. Kecenderungan ini sudah terlihat dengan adanya kesepakatan perdagangan internasional seperti APEC, AFTA, dan NAFTA yang makin mendorong keluar masuknya faktor produksi ke suatu negara. Arus globalisasi ini akhirnya menimbulkan beberapa akibat.

Pertama, persaingan yang semakin ketat. Persaingan global tersebut menuntut perubahan-perubahan yang cukup signifikan baik dalam teknologi, proses produksi, maupun disain produksi, serta memperbaiki efektivitas keputusan mengenai penentuan harga jual. Persaingan yang ketat tidak hanya dihadapi oleh perusahaan dalam suatu negara saja melainkan antara negara. Oleh karena itu, globalisasi menuntut masing-masing negara untuk memfokuskan industrinya yang memiliki *Competitive Advantage* dan *Comparative Advantage.*

Kedua, Adanya ketergantungan dan keterkaitan global. Pergerakan yang relatif bebas dari barang dan jasa serta faktor-faktor produksi menyebabkan hampir semua kehidupan dalam suatu negara terpengaruh oleh ekonomi internasional. Adanya masalah di satu negara akan berdampak pada negara lain. Dengan kata lain, era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dapat dikatakan tidak ada negara yang "autarki", yaitu negara yang hidup terisolasi tanpa mempunyai hubungan ekonomi, keungan maupun perdagangan internasional (ekspor dan impor).

Ketiga, proteksionisme dan blok-blok ekonomi yang makin tumbuh. Meskipun ada komitmen untuk menghilangkan tarif-tarif dalam perdagangan internasional, globalisasi

---

*) Budi Siswanto dan Priyatno : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

juga menghasilkan adanya suatu bentuk kearah proteksionisme non tarif dan blok-blok ekonomi. Hambatan non-tarif meliputi lisensi impor yang dikenakan secara diskriminatif, kuota impor dan segala persyaratan standar yang secara jelas melarang ekspor suatu negara tertentu. Blok-blok ekonomi secara eksplisit melakukan diskriminasi terhadap negara-negara di luar kelompok mereka dengan memberikan pengaturan dagan yang lebih mengutamakan negara-negara anggota saja.

Keempat, kemajuan pesat teknologi. Perkembangan teknologi yang demikian cepat terutama di negara-negara maju memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas yang menghasilkan penurunan biaya tenaga kerja sebagai proporsi biaya total dalam banyak industri. Sehingga ini merupakan ancaman utama bagi negara berkembang yang telah melandaskan industrinya pada tenaga kerja dan bahan baku yang murah.

Kelima, keprihatinan yang mendalam atas lingkungan. Isu lingkungan hidup memperoleh perhatian yang semakin intens dan mendalam terutama dikaitkan dengan aktivitas ekonomi. Semakin parahnya kemerosotan lingkungan hidup juga mendorong timbulnya kesadaran bagi pentingnya perlindungan lingkungan hidup *(environmental protection).* Adanya persyaratan produk bebas lingkungan untuk memasuki pasar internasional merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap negara termasuk Indonesia dalam menjalankan perdagangan internasionalnya.

Namun disisi lain, Indonesia saat ini dihadapkan pada salah satu dampak adanya globalisasi. Keterkaitan ekonomi suatu negara terhadap negara lain serta bebasnya mobilisasi faktor produksi termasuk modal, memaksa Indonesia harus menghadapi krisis ekonomi yang terus berkepanjangan. Krisis yang dimulai dari depresiasi nilai tukar rupiah yang sangat tajam terhadap dolar AS akhirnya meluas menjadi krisis moneter yang parah. Institusi keuangan yang belum kokoh dan utang luar negeri yang sangat besar yang sebagian besar berjangka pendek serta makin diperparah dengan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin membuat penyelesaian krisis moneter berlarut-larut dan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi.

Mengingat pinjaman dan bantuan luar negeri harus dibayar kembali, maka yang paling menentukan adalah kemampuan menghasilkan devisa atau kemampuan ekspor untuk membiayai impor maupun pinjaman luar negeri tersebut. Peningkatan ekspor juga penting untuk memperbaiki neraca pembayaran sekaligus untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang rupiah. Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an telah mengikuti proses pembangunan yang menggantungkan diri pada ekspor sebagai penggeraknya *(export led growth).* Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan ekspor non migas mutlak diperlukan. Apalagi jika dikaitkan dengan GBHN yang menuntut adanya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Artinya kita tidak akan terlalu menggantungkan diri pada

pinjaman luar negeri untuk pembiayaan pembangunan, meskipun kita memerlukan hanya sebagai pelengkap dana dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan.

Dengan demikian perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Keberhasilan perdagangan luar negeri semakin menentukan proses pembangunan nasional. Bagi Indonesia sendiri yang memiliki perekonomian terbuka, perdagangan sangat penting bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional.

Tujuan

Tujuan penulisan karya tulis mengenai daya saing produk dan kinerja ekspor adalah untuk memberi masukan-masukan guna meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Karya tulis ini juga mencoba untuk membuka cakrawala berpikir dengan mengusahakan suatu paradigma baru dalam analisis kondisi dan permasalahan serta strategi ekspor Indonesia agar dapat bersaing dengan produk dari negara lain dan dapat menjadi sumber utama penerimaan dana pembangunan selain utang sekaligus sebagai upaya mempercepat proses pemulihan perekonomian Indonesia.

Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis ini dibatasi pada permasalahan ekspor terutama dalam masa krisis dan strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk dan kinerja ekspor Indonesia. Pembahasan masalah juga diuraikan sedikit mengenai urgensi peningkatan daya saing produk dan kinerja ekspor.

Teknik Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan teknik studi literatur yang menggunakan sumber penulisan dari buku-buku atau tulisan yang telah diterbitkan. Penulis menggunakan kerangka teori dari buku yang berjudul *"The Marketing of Nation"* karangan Philip Kotler. Somvid Jatusripitak dan Suvit Maesincee dan *"Competitive Advantange of Nation"* karangan Michael E. Porter sebagai dasar analisis tulisan ditambah beberapa referensi untuk mendukung analisis tersebut.

Sistematika Penulisan

Karya tulis ini disusun menjadi 5 buah bab agar dapat lebih mudah memahaminya. Pada Bab I diterangkan tentang latar belakang penulisan karya tulis tentang ini yaitu adanya

era globalisasi yang semakin menuntut persaingan ketat antar bangsa. Bab II dibahas kerangka teori yang melandasi perlunya ekspor sebagai bagian dari perdagangan internasional dan analisis tentang posisi Indonesia dalam tingkat daya saing produk di pasar internasional. Bab III membahas secara lebih rinci mengenai perkembangan ekspor produk Indonesia dan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian Bab IV dibahas kekuatan dan kelemahan ekspor Indonesia serta strategi peningkatan kinerja ekspor Indonesia di masa datang. Akhirnya penulis mencoba menarik kesimpulan tulisan mengenai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam persaingan global sebagai upaya membantu memulihkan perekonomian Indonesia pada Bab V.

II. Landasan Teori

Masalah utama yang dihadapi sebagian besar negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah sangat kurangnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini mengingat pendapatan masyarakat yang masih sangat rendah sehingga dapat diperkirakan tabungan masyarakat sangat kurang dibanding dengan kebutuhan investasi. Perekonomian Indonesia sampai saat ini masih ditandai adanya tiga buah kesenjangan *(gap)*. *Pertama,* adanya kesenjangan tabungan-investasi *(investment saving gap)*. *Investment saving gap* ini dapat terjadi karena adanya tingkat tabungan yang lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran investasi yang ternyata lebih besar. Kondisi demikian tetap dilakukan karena Indonesia berupaya mencapai tingkat kesempatan kerja penuh *(full employment)* dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kedua, adanya defisit transaksi berjalan *(current account deficit)* yang terjadi secara terus menerus. *Current account deficit* ini terjadi karena penerimaan dari luar negeri lebih kecil daripada pembayaran ke luar negeri. Hal ini terjadi mengingat Indonesia mengalami defisit yang sangat besar pada transaksi jasa sehingga menutupi surplus neraca perdagangan yang kita raih.

Ketiga, adanya defisit anggaran *(budget deficit)* negara. *Budget deficit* ini dapat terjadi karena rendahnya penerimaan dalam negeri akibat penghimpunan pajak yang masih rendah. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakatnya masih rendah disamping administrasi perpajakannya pun belum baik. Sedangkan Indonesia menghadapi pengeluaran rutin yang besar terutama untuk pembayaran cicilan bunga dan hutang yang membengkak akibat adanya depresiasi rupiah yang sangat tajam.

Untuk mengatasi masalah kurangnya dana untuk pembiayaan pembangunan dan konsumsi masyarakat serta membiayai impor barang modal, maka dapat dilakukan dengan mengundang modal dari luar negeri baik jangka panjang maupun jangka pendek. Arus modal jangka panjang dapat berupa investasi langsung *(direct foreign investment)* atau pinjaman jangka panjang. Sedangkan dana jangka pendek berupa investasi portfolio yang bermaksud mengambil keuntungan dari jual beli efek *(capital gain)* di pasar modal.

Sementara pinjaman luar negeri untuk kondisi krisis ekonomi ini jelas bukan alasan yang tepat untuk membiayai segala pengeluaran pembangunan. Hal ini dikarenakan pinjaman menuntut kewajiban pembayaran di masa yang akan datang. Apalagi jika dikaitkan dengan melemahnya mata uang riil terhadap mata uang asing yang akan semakin memperberat neraca pembayaran[1]. Oleh karena itu, penerimaan devisa dari ekspor baik sektor migas maupun non-migas sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri, membiayai impor dan sekaligus menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Keseimbangan ekonomi nasional suatu negara dapat dirumuskan sebagai suatu keseimbangan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Pada gambar 1 divisualisasikan bahwa total penawaran *(supply total)* terdiri dari penawaran dalam negeri atau produk domestik ditambah dengan penawaran dari luar negeri atau impor (M). Sedangkan total permintaan *(demand total)* terdiri dari konsumsi dalam negeri *(domestic consumption)* ditambah permintaan dari luar negeri atau ekspor (X). Dari uraian tersebut jelas bahwa keseimbangan ekonomi nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh ekonomi internasional, yaitu impor (M) sebagai *supply* and ekspor (X) sebagai *demand* dari luar negeri.

Peranan dan pengaruh ekonomi internasional khususnya dalam bidang perdagangan dapat juga ditinjau dari model perhitungan pendapatan nasional. Secara teoritis, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran *(expenditure approach)* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$GDP = Y = C + I + G + (X - M)$$

dalam hal ini:
GDP = Gross Domestik Product
C = Consumption (Konsumsi)
I = Invesment (Investasi)
G = Goverment Expenditure (Pengeluaran Pemerintah)
X = Ekspor
M = Impor

Sehingga bila X > M maka saldo X neto positif atau posisi neraca perdagangan luar negeri surplus yang berarti pendapatn meningkat atau GDP naik. Begitu pula jika X < M maka saldo X neto negatif atau posisi neraca perdagangan luar negri defisit yang berarti pendapatan menurun atau GDP turun. Dengan kata lain semakin besar ekspor suatu negara dibandingkan dengan besar impor dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan

1 Lihat tabel 1, terjadi kenaikan pembayaran bunga dan cicilan hutang dari Rp.29,7 triliun (23%) tahun 1997/1998 menjadi Rp. 66,24 triliun (25%) 1998/1999

negara tersebut. Selanjutnya bila pengaruh ekonomi internasional melalui X dan M terhadap ekonomi nasional dapat divisualisasikan dengan grafik di gambar 2.

Pengaruh ekspor terhadap perekonomian negara yang mempunyai struktur ekonomi ekspor, dapat terlihat dari pengaruh inflasi *(inflation tendency)*. Bila ekspor naik akibatnya pendapatan nasionalnya naik maka pendapatan rakyat naik dan daya beli meningkat. Jumlah uang yang beredar (Ms) akan bertambah besar yang akan menambah tekanan inflasi *(Inflationary pressure)*. Keadaan ini dapat terjadi karena adanya kekurangan kesempatan investasi (penanaman modal). Akibatnya uang dipergunakan untuk membeli barang yang pada gilirannya menambah bergeraknya uang panas *(hot money)*.

Sebaliknya bagi negara yang memiliki *investment economic*, kenaikan ekspor akan mengakibatkan kenaikan produksi dalam negeri yang mendorong upah buruh naik sehingga kekuatan daya beli bertambah. Karena adanya kesempatan investasi mengakibatkan naiknya daya beli *(purchasing power)* masyarakat. Akibat selanjutnya akan tumbuh kegairahan untuk memperbesar produksi yang akhirnya menambah output barang dan jasa dalam suatu negara. Investasi naik dan pendapatan masyarakat meningkat.

Alasan dipertahankannya struktur ekonomi ekspor:

1. Keuntungan komperatif *(comparatif advantange)* didasarkan pada hukum yang mengatakan bahwa suatu akan mengekspor hasil produksi yang darinya terdapat keuntungan yang lebih besar *(comparative advantage)* dan mengimpor barang-barang yang keuntungan produksinya lebih kecil *(comparative disadvantage)*.

2. Sektor ekspor menjadi penggerak dari kegiatan perekonomian yang berarti ekspor merupakan *generating sector* dari perkenomian seluruhnya, berarti ekspor menjadi *leading sector*. Hal ini akan menunjang sektor impor yang mengakibatkan kegiatan ekonomi disektor lain akan meningkat.

3. Ekspor merupakan suber devisa negara, yaitu bila ekspor naik maka penerimaan dalam negeri dari pajak tidak langsung (pajak ekspor) akan meningkat. Ini berarti dara pertukaran *(term of trade)* akan naik. *Term of trade* adalah angka yang diperoleh dengan membandingkan harga-harga ekspor dengan impor (lihat tabel 4 kondisi perkembangan ekspor dan impor). Bila *terms of trade* besar, berarti harga ekspor naik dibandingkan impor dengan demikian berarti adanya kenaikan pendapatan.

Namun mengingat struktur ekonomi ekspor sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ekspor di pasaran dunia yang akhirnya akan mengganggu kegiatan ekonomi dalam negeri, maka *pola struktur perekonomian harus di ubah sedemikian rupa supaya terdapatnya keseimbangan antara ekonomi pertanian dengan non pertanian (jasa, industri perdagangan) pada produksi nasional (GDP).*

Oleh sebab itu, masing-masing negara memiliki strategi dan kebjiakan perdagangannya sendiri-sendiri. Kebijakan perdagangan internasional dapat diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi dan arah perdagangan internasional dari negera tersebut. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara menyangkut beberapa hal. *Pertama,* melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk dari kondisi perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. *Kedua,* melindungi kepentingan industri dalam negeri. *Ketiga,* melindungi lapangan kerja *(employment). Keempat,* menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional *(balance of payment). Kelima,* menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. *Keenam,* menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya.

Dalam kaitannya dengan strategi perdagangan internasional, ada sebuah teori mengenai analisis persaingan dagang di pasar internasional yang dikemukakan oleh Michael Porter. Dalam bukunya itu Porter berusaha dengan mengemukakan suatu konsep paradigma baru yang disebutnya sebagai "keuntungan kompetitif bangsa-bangsa" *(Competitive Advantage of Nation)*. Berdasarkan studinya terhadap sepuluh negara termaju industrinya, yakni Denmark, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat itu, ia menyimpulkan bahwa suatu bangsa memiliki keunggulan kompetitif dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki empat faktor penentu. Empat faktor penentu tersebut adalah:

1. Kondisi faktor *(Factor Conditions)*
   a) Sumber Daya Manusia *(Human Resources)*
   b) Sumber Daya Fisik *(Physical Resources)*
   c) Sumber Daya Pengetahuan *(Knowledge Resources)*
   d) Sumber Daya Modal *(Capital Resources)*
   e) Sumber Daya Infrastruktur *(Infrastructure Resources)*
2. Kondisi permintaan *(Demand Conditions)*
   a) Komposisi permintaan domestik *(Composition of home demand)*
   b) Besar dan pola permintaan domestik *(Size and pattern of growth of home demand)*
   c) Kecepatan pertumbuhan pasar domestik *(Rapid home market growth)*
   d) Kecenderungan permintaan internasional *(Trend of international demand)*
3. Industri pendukung dan terkait *(Related & Supporting Industry)*
4. Strategi perusahaan, struktur dan pesaing *(Firm Strategy Structure &* Rivalry)

III. Kondisi Ekspor Produk Non - Migas Indonesia

Perkembangan Ekspor Indonesia

Perkembangan ekspor Indonesia dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa dari 1985 sampai 1995 terlihat pergeseran yang sangat mencolok dalam komposisi ekspor. Ini merupakan pencerminan dari keberhasilan kebijakan pemerintah dalam melepaskan ketergantungan perekonomian kita terhadap sektor migas[2]. Pada tahun 1980-an lebih dari setengah penerimaan devisa kita bersumber dari ekspor migas. Walaupun dominasinya kelihatan menurun sejalan dengan trend ekspor yang juga menurun. Namun, setelah dilakukan devaluasi pada tahun 1986 serta penyempurnaan berbagai kebijakan untuk menggalakan penerimaan ekspor, trend ekspor menunjukan peningkatan yang cukup besar. Peningkatan ekspor tersebut terutama dari non migas sedangkan penerimaan ekspor migas relatif memiliki fluktuasi yang lebih kecil.

Pada tahun 1996 penerimaan devisa dari ekspor migas hanya mencapai US$10.616 miliar dari total ekspor sebesar US$47.754 miliar. Sementara itu nilai ekspor non-migas mencapai US$37.138 miliar, sehingga peranan ekspor migas mengecil menjadi 23.20%. Sejalan dengan pergeseran komposisi ekspor Indonesia dari ekspor migas ke non-migas, komposisi pernanan mitra dagang Indonesia juga mengalami pergeseran[3].

Dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi pembentukan regionalisasi perdagangan melalui pembentukan *Free Trade Area*. Untuk kawasan Amerika Utara ada *NAFTA (North American Free Trade Area)* dan di kawasan Eropa Barat ada pasar tunggal Eropa, serta di kawasan Asean ada AFTA *(Asean Free Trade Area)*. Kemudian pada tahun 1994 sebanyak 125 anggota GATT telah mencapai kesepakatan tentang persetujuan yang baru. Bagi kita GATT harus diwaspadai khususnya dalam memanfaatkan setiap peluang akses pasar bagi barang non-migas dipasaran internasional. Sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisi moneter yang mengarah kepada kondisi resesi ekonomi. Penurunan kinerja ekspor Indonesia dapat dilihat selama periode Januari - Desember 1998,

---

2 Ketika pasaran minyak dunia mencapai puncaknya pada tahun 1981, penerimaan devisa dari ekspor migas mencapai US$20,7 miliardari total ekspor sebesar US$25,3 miliar. Dengan demikian peranan penerimaan ekspor migas mencapai 82,11%. Untuk penerimaan ekspor non-migas hanya sebesar 17,89%. Namun pada tahun-tahun sesudahnya peranan ekspor migas terhadap total ekspor Indonesia memperlihatkan penurunan yang tajam. Ini akibat terus melemahnya harga minyak dunia juga karena pesatnya perkembangan ekspor non-migas. Lihat Djoko Moeljono, Peluang dan Tantangan Ekspor Non Migas dalam Pelita VI dan Akses Pasar Dunia, *"Strategi Pembiayaan Ekspor Non Migas Pasca GATT*, Jakarta : Info Bank, 1995.

3 Pada tahun 1986 Jepang merupakan negara mitra dagang utama untuk ekspor non migas, yaitu hampir sepertiga ekspor non migas ke Jepang menurun menjadi 19%. Sementara itu, Amerika Serikat tahun 1986 menjadi tujuan ekspor non-migas dengan pangsa pasar sekitar 6.51% meningkat tajam menjadi 17.07% pada tahun 1993. Begitu pula dengan ekspor non-migas ke negara-negara ASEAN, pangsanya dalam periode yang sama mengalami peningkatan dari 6.98% menjadi 15.55%. Namun perlu dicatat di sini bahwa ekspor negara-negara ASEAN tersebut mayoritas adalah ditujukan ke Singapura.

total nilai ekspor mencapai nilai sekitar US$50,05 milyar atau turun sebesar 6,34% terhadap nilai ekspor 1997 yang mencapai nilai sekitar US$53,44 milyar. Turunnya nilai ekspor migas merupakan penyebab turunnya total nilai ekspor keseluruhan. Penurunan ini disebabkan karena dua hal, yaitu karena turunnya minyak mentah di pasar internasional dan berkurangnya volume pada seluruh komoditi ekspor migas. Kemerosotan total ekspor sebesar 34.1% kurang menguntungkan bagi APBN pemerintah yang saat ini tengah menghadapi beban yang sangat berat mengingat pendapatan dari pajak migas juga termasuk sumber utama pendapatan pemerintah.

Dalam sektor pertambangan, sekalipun memiliki kandungan lokal yang tinggi namun dalam kegiatan penambangannya memerlukan teknologi dan modal sing yang sangat tinggi dan ekspornya sangat tergantung pada harga di pasar internasiona. Selama periode bulan Januari - Mei 1998 nilai ekspornya telah merosot sebesar 33,8% atau nilainya menjadi US$855,7 juta dan penurunan inilah yang menghambat laju pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Turunnya harga minyak mentah dunia di bawah US$10/ barel tentu sangat memprihatinkan, karena sektor inilah yang sebenarnya diharapkan dapat mendukung biaya pembangunan di tahun-tahun mendatang. Penurunan ekspor migas tersebut terutama disebabkan karena berlimpahnya stok dan melemahnya permintaaan karena musin dingin yang baru lalu tidak terlalu dingin dan terjadinya krisis ekonomi di Asia yang berdampak ke negara-negara lain.

Penurunan ekspor hasil pertambangan yang sangat drastis terutama berkaitan dengan penurunan nilai ekspor biji tembaga sebesar 49,9% sehingga nilainya menjadi US$267,7 juta. Penurunan ekspor tersebut berkaitan dengan melemahnya permintaan dunia yang mengakibatkan penurunan volume ekspor sebesar 26,5%. Pendorong penurunan ekspor hasil pertambangan yang cukup signifikan juga adalah ekspor batu bara sebesar 16,6% dibanding dengan nilai ekspor selama bulan Januari -Mei 1997. Sekalipun volume ekspornya meningkat sebesar 2,5% tetapi nilainya merosot karena terjadi penurunan harga di pasar internasional.

Sementara itu kecilnya peningkatan nilai ekspor non migas menunjukan buruknya kinerja ekspor sektor riil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat pada tabel bahwa sekali pun ekspor non migas meningkat 5,6%, namun tidak dapat mengkompensasi kemerosotan ekspor migas. Sehingga tetap terjadi penurunan ekspor walau dalam persentase yang lebih kecil. Apabila kemerosotan ekspor minyak semakin tajam dan peningkatan eskpor non migas tidak dapat mengkompensasinya, maka pemupukan devisa akan terhambat. Terlebih bila pada tahun 1998 dan 1999 pemerintah harus mengimpor pangan dalam jumlah besar maka pemupukan devisa makin suit dilakukan.

Di lain pihak andalan untuk meningkatkan eskpor non-migas kini beralih ke produk-produk pertanian. Hal ini disebabkan karena sektor tersebut tidak memiliki kandungan

impor. Namun perannya jauh di bawah produk hasil industri sehingga akan kurang mampu berperan dalam peningkatan laju pertumbuhan ekspor non migas[4]. Ditengah-tengah hampir terhentinya arus devisa yang masuk terutama yang datangnya dari investasi langsung *(FDI)* maka surplus neraca perdagangan luar negeri merupakan satu-satunya sumber yang dapat diandalkan untuk mendapatkan devisa, disamping bantuan negara lain dan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Selama semester pertama (Januari - Juni) 1998, perkembangan total ekspor menunjukan penurunan 3,8%. Tetapi karena total impornya mengalami penurunan drastis sebesar 38% maka sekalipun total ekspor turun, Indonesia masih mampu meraih surplus neraca perdagangan yang cukup signifikan yaitu sebesar US$11.289,9 milyar atau meningkat 17.4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 1997. Nilai surplus tersebut sudah hampir 96% dari nilai surplus pada tahun 1997.

Terjadinya kemerosotan ekspor meskipun diikuti dengan penurunan impor yang lebih besar bukanlah sesuatu yang menguntungkan jika dilihat dari segi pemupukan pendapatan devisa. Keadaan menjadi semakin tidak menguntungkan apabila terjadi peningkatan laju penurunan impor karena terjadi perlambatan pertumbuhan impor bahan baku dan penolong serta barang modal yang menandakan bahwa kegiatan produksi sektor industri dan investasi cenderung berhenti. Apabila hal ini terjadi, maka penggerak ekspor non migas hanya mengandalkan sektor pertanian yang sangat rentan terhadap keadaan alam dan lingkungan seperti musim, bencana alam serta hama dan penyakit tanaman.

Berdasarkan pendapat dikalangan para pelaku bisnis[5], terjadinya surplus nilai perdagangan yang sangat besar dalam kenyataannya hanya sedikit devisa yang masuk karena secara fisik valuta asing yang merupakan surplus tersebut tidak seluruhnya berada di Indonesia, tetapi disimpan oleh para eksportir di bank-bank asing di luar negeri. Penyimpanan di luar negeri tersebut dengan maksud untuk memudahkan impor bahan baku, suku cadang mesin-mesin atau memenuhi kebutuhan lainnya yang menuntut valuta asing. Hal ini dilakukan terutama karena dua hal. *Pertama,* L/C yang dibuka oleh bank-bank nasional di Indonesia tidak dapat diterima atau diakui oleh bank-bank koresponden dan importir luar negeri. *Kedua,* terjadi perbedaan kurs jual dan beli yang besar besar. Jika mereka membutuhkan rupiah maka menukarkan valuta asing yang dipunyai di luar negeri terlebih dahulu kemudian baru mengirimkan perbedaan rupiah tersebut ke Indonesia.

---

4 Ekspor pertanian dalamperiode Januari - Mei 1998 meningkat sebesar 28,7% dibandingkan dengan nilai pada periode yang sama pada tahun 1997 dan perannya terhadap total ekspor hanya sebesar 6,78%. Sedangkan hasil industri memiliki peran sebesar 71,9% terhadap total ekspor selama periode Januari - Mei 1998 hanya meningkat sebesar 7,5%

5 Rahayudi, "Perdagangan Luar Negeri", *Profil Perdagangan Luar Negeri Indonesia,* 1998.

Permasalahan Ekspor yang Dihadapi Indonesia

Permasalahan yang dihadapi oleh eksportir Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal.

1. Faktor Internal

Permasalahan yang dihadapi dari sisi internal adalah sebagai berikut : *Pertama,* kelemahan manajemen dalam bidang pemasaran. Manajemen yang kurang profesional dalam mengelola perusahaan terutama dalam hal pemasaran produk di pasar internasional. Kelemahan ini disebabkan salah satunya karena eksportir kurang dapat membuat jaringan pemasaran global dan membina hubungan dengan para relasi bisnis.

Kedua, kurang terampil menguasai tata cara dan ketentuan ekspor. Eksportir Indonesia belum sepenuhnya menguasai ketentuan-ketentuan atau tata cara menghubungi calon pembeli dan pusat-pusat pemasaran luar negeri. Sebagian besar industri kita masih bersikap pasif dalam memasarkan produknya. Pada umumnya mereka berhubungan dengan agen-agen dari perusahaan dagang (importir) luar negeri yang berada di Indonesia. Para agen itulah yang kemudian memasarkan produk kita di luar negeri. Disamping eksportir Indonesia memiliki keterbatasan informasi pasar, besarnya ketergantungan mereka kepada agen tersebut sangat tinggi sehingga kekuatan negosiasi kita menjadi lemah.

Ketiga, perencanaan dan manajemen produksi yang masih lemah. Ada cukup banyak masalah dalam bidang produksi terutama dalam hal pengendalian kualitas *(quality control)* dan sistem produksi. *Pertama,* kontrol kualitas *(quality control)* yang masih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada kualitas produk yang sering berubah-ubah akibatnya produk yang sudah diekspor ditolak dan dikembalikan oleh perusahaan importir. *Kedua,* desain produk yang masih tertinggal sehingga produk Indonesia kalah bersaing dengan produk luar negeri lainnya. *Ketiga,* kurang memadainya bentuk kemasan dan label karena tidak memenuhi persyaratan internasional atau negara tujuannya seperti ISO 9000 hingga ISO 14000 sehingga menyulitkan produk Indonesia memasuki pasar luar negeri. *Keempat,* sistem produksi yang masih kurang efisien. Karena efisiensi barang ekspor masih rendah mengakibatkan biaya tinggi dan harga jualnya lebih tinggi. Kekurangefisienan produksi disebabkan oleh adanya tingkat kerusakan pada produk yang masih tinggi. Banyak bahan baku yang terbuang karena proses pemilihannya kurang cermat dan kesalahan proses produksi mengakibatkan biaya produksi meningkat. *Kelima,* perencanaan produksi masih lemah. Banyak keluhan dari importir mengenai jangka waktu pegiriman produk yang tidak sesuai dengan kontraknya yang tercantum dalam *letter of credit* karena keterlambatan produksi.

Keempat, penerapan teknologi tepat guna yang kurang memadai. Mengingat keterbatasan modal yang dimiliki oleh industri kita dan fokus kebijakan pemerintah yang

lebih mengarah pada keunggulan komparatif maka Indonesia lebih menekankan pada industri yang berbasis padat karya *(labor intensif)* dan sumber daya alam. Akibatnya, penerapan teknologi tepat guna menjadi terabaikan (dalam hal ini bukan *hi-tech* salah guna).

2. Faktor Eksternal

Permasalahan ekspor yang dihadapi oleh industri dari sisi eksternal dapat dilihat dari 2 aspek yaitu, dari dalam dan luar negeri. Dari aspek dalam negeri menyangkut beberapa hal. *Pertama*, masalah pembiayaan ekspor. Mengingat kondisi inflasi yang tinggi dan upaya untuk meredam spekulan, pemerintah menerapkan kebijakan uang ketat dengan menggunakan instrumen suku bunga tinggi. Akibatnya, para eksportir sulit mendapatkan kredit untuk pembiayaan ekspor. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya institusi keuangan dan pembiayaan terutama bank bermasalah yang kini sedang diawasi pemerintah (BPPN). Hal ini makin membuat pihak eksportir makin kesulitan untuk mendapatkan dana.

Kedua, merosot nilai tukar riil efektif menyebabkan berbagai tekanan terhadap peningkatan ekspor non-migas. Depresiasi rupiah yang sangat tajam seharusnya dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia ternyata pada kenyataannya terjadi perlambatan pertumbuhan ekspor non migas. Hal ini disebabkan sebagian besar bahan baku industri diimpor dari luar. Akibatnya penurunan nilai rupiah yang tajam tersebut menyebabkan naiknya harga bahan baku impor sehingga industri sulit untuk mempertahankan produksinya sehingga kemampuan mengimpor bahan baku industri menurun. Keterbatasan likuiditas yang dihadapi oleh sebagian besar industri kita mengakibatkan turunnya kemampuan mengimpor bahan baku industri. Hal itu makin diperburuk dengan persepsi bank asing yang negatif terhadap kredibilitas bank-bank nasional. Akibatnya banyak L/ C kita yang ditolak bank asing karena tidak mau mengambil resiko atas ketidakmampuan pembayaran *(default risk)*.

Ketiga, adalah kestabilan politik dan sosial. Dengan alasan belum tercapainya kestabilan politik, baru-baru ini para pembeli luar negeri atau importir tekstil dan produk tekstil dari Amerika Serikat, Hongkong dan Eropa membatalkan sekitar 50% pesanannya pada bulan Mei-Juni 1998 untuk pengapalan September 1998 dan pesanan bulan September-Oktober 1998 [6]. Penurunan pesanan inilah yang menjadi penyebab terjadinya penurunan ekspor kulit, barang kulit dan sepatu/ alas kaki yang selama periode bulan Januari-Mei 1998 telah merosot sebesar 36,9%.

---

6 Nilai pembatalan order tekstil dan produk tekstil diperkirakan mencapai US$ 1,2 milyar. Selama Juni-Juli 1998 telah terjadi penurunan pesanan tekstil dan produk tekstil dari importir sebesar 20% dibanding periode yang sama tahun 1997. Padahal bulan Januari-Mei 1998 ekspor tekstil masih meningkat sekitar 10,2% dan perannya seperlima dari total ekspor hasil industri. Pesanan sepatu dari importir selama periode Januari 1998 telah menurun sebesar 13,3% dibanding dengan periode sama tahun 1997. Untuk lebih jelasnya lihat Rahayubudi, "Tinjauan Perdagangan Indonesia", No. 16, tahun 1998.

Keempat, masalah birokrasi. Para eksportir menganggap pengurusan dokumen masih terlalu panjang. Dokumen ekspor yang tidak kunjung selesai dan tidak pernah dapat dipastikan kapan selesainya adalah masalah yang sering dihadapi. Hal ini merupakan pemborosan waktu, tenaga dan uang bagi dunia usaha, yang akhirnya berujung pada ketidak-efisienan dan ketidak-kompetitifan produk ekspor nasiona. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa hal. *Pertama,* prosedur ekspor yang tertuang dalam berbagai paket kebijakan deregulasi memang masih terlalu panjang. *Kedua,* ketidakmampuan aparat pelaksana di lapangan untuk melaksanankan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ada. *Ketiga,* ketidakmampuan dan kurangnya inovasi aparat pelaksana dalam menerjemahkan misi kebijakan pemerintah. Hal itulah yang memacu adanya pungutan tidak resmi yang membuat efisiensi dan daya saing produk semakin memburuk.

Kelima, keterbatasan transportasi barang untuk ekspor. Transportasi yang terbatas menciptakan dua permasalahan, yaitu masalah waktu pengiriman dan daya saing. Dengan terbatasnya jumlah kapal mengakibatkan tidak dimuatnya barang ke kapal, yang akhirnya akan menambah biaya tunggu maupun klaim dari pembeli karena jadwal pengiriman tidak tepat waktu. Selain itu keterbatasan sarana angkutan ini juga mendorong tingginya biaya transportasi.

Keenam, rapuhnya komposisi ekspor komoditas itu sendiri. Struktur ekspor Indonesia yang masih mengandalkan pada beberapa produk dan negara tujuan sangat rentan terhadap gejolak permintaan luar negeri. Hal ini akibat terjadinya konsentrasi industri yang pada gilirannya menghambat ekspor[7].

Ketujuh, struktur ekonomi Indonesia yang mengarah kepada oligopoli dan monopoli mengakibatkan industri beroperasi secara tidak efisien karena tidak ada persaingan. Pengusaha akan mendjadi lebih cepat puas terhadap pasar domestik yang mengakibatkan industri nasional tidak siap menghadapi persaingan di tingkat global. Kenyataan menunjukan industri yang memiliki tingkat konsentrasi rendah seperti tekstil dan sepatu justru memiliki prestasi ekspor yang bagus. Konsentrasi ekonomi di Indonesia lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah terhadap suatu bidang industri terlalu protektif.

Kedelapan, investasi langsung maupun tidak langsung telah gagal mendongkrak eskpor non-migas. Ini merupakan dilema bagi negara kita mengenai orientasi industri kita. Penduduk Indonesia yang mendekati 200 juta jiwa memiliki potensi pasar domestik yang cukup besar.

---

7 Ekspor non-migas terkonsentrasi pada 20 negara mitra dagang dengan 23 kelompok dagangan utama. Pangsa pasar 5 kelompok dagangan utama sebesar 53%. Kayu, pakaian jadi dan tekstil mencapai 38.1% dari kelompok tersebut. Konsentrasi ekspor non migas masih terfokus di 4 kawasan, yaitu AS (17%), Eropa Barat (21%) dan ASEAN mencapai 17%. Sedangkan kawasan Asia Pasifik yang merupakan *the emerging market* masih belum banyak terjamah.

Pengusaha domestik maupun asing *lebih tertarik* melayani pasar dalam negeri daripada pasar internasional, khususnya industri yang pasarnya dilindungi oleh pemerintah.

Selanjutnya dari aspek luar negeri dapat dirumuskan sejumlah masalah sebagai berikut: *Pertama*, Blok-blok perdagangan. Dengan adanya blok perdagangan di sejumlah kawasan membuat masuk ke pasar kawasan tersebut sulit untuk di tembus. Mereka, negara dalam blok perdagangan, lebih cenderung untuk berkerjasama dengan negara di kawasannya. Alasannya untuk menciptakan suatu perdagangan yang saling menguntungkan di antara mereka, contohnya Masyarakat Eropa (ME).

Kedua, hambatan tarif dan non-tarif. Sering suatu negara guna memproteksi produk lokalnya dengan berbagai kebijakan. Diantaranya tarif bea masuk yang tinggi atau juga yang bersifat non-tarif seperti produk yang sudah memiliki berbagai sertifikat standar seperti ISO *(International Standard Organization)*. Yang paling nyata dan harus dicermati adalah adanya proteksi terselubung *(insidious protection)* yang kini dilakukan negara maju. Demi melindung pasarnya dari produk-produk yang berasal dari sejumlah negara berkembang, kini mereka semakin rajin memperlakukan aneka kebijakan non-tarif. Dengan mengamati kondisi industri di Indonesia mungkin produk yang sudah memiliki sertifikat seperti ISO sangatlah kecil jumlahnya. Hal ini membuat pengusaha atau eksportir Indonesia tidak dapat mengekspor produknya karena tidak mendapatkan sertifikat ISO tersebut. Ada juga hambatan seperti quota, proteksi atau *dumping*[8]. Dengan alasan standar internasional, standar kesehatan dan standar teknis industri, negara maju juga menentukan batasan hanya produk-produk yang memenuhi standar itulah yang bisa masuk ke negaranya. Eropa sampai sekarang masih bersikeras menggunakan standar lingkungan seperti ekolabel bagi produk-produk kehutanan. Amerika juga masih mengaitkan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama yang menyangkut tenaga kerja di perusahaan dan pabrik-pabrik. Dengan kondisi seperti ini jelas produk-produk negara berkembang, yang boleh dikata memiliki keunggulan komparatif seperti rendahnya upah pekerja dan mudahnya sumber daya alam menjadi kesulitan menggenjot ekspor. Padahal ekspor merupakan satu kunci pemulihan perekonomian Indonesia.

Ketiga, besarnya pangsa pasar Indonesia terhadap total impor masih kecil sekitar 1%. Kondisi ini menyebabkan posisi Indonesia, secara teoritis sebagai *prices taker*. Sebagai *price*

---

8 Sejumlah produk Indonesia belum lama ini terhambat ketika hendak memasuki pasar negara maju. Pada bulan Agustus 1998 Uni Eropa menetapkan bea masuk definitif sebesar 41.1% bagi disket 3.5 inch asal Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut hasil investigasi yang dilakukan komisi Eropa sejak 1995. Terhadap tuduhan dumping ke pasar Eropa yang dilakukan oleh para produsen disket asal Indonesia, Kanada, Thailand dan Makao. Investigasi yang dilakukan atas keluhan Asosiasi Manufaktur Eropa hasilnya hanya Indonesia yang terbukti melakukan dumping. Setelah disket yang terkena hambatan adalah produk besi. Pertengahan Juli 1998, para wakil rakyat AS mengeluarkan resolusi yang mendesak Presiden Bill Clinton agar memberlakukan larangan impor besi dari 10 negara termasuk Indonesia.

taker tidak banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi pasar dunia. Kebijakan perdagangan luar negeri kita praktis tidak mempunyai pengaruh terhadap pola perdagangan dunia.

IV. Peningkatan Kinerja Ekspor Indonesia

Analisis Daya Saing Ekspor Indonesia

1. Kondisi Faktor Produksi

Dari aspek Sumber Daya Manusia, SDM Indonesia pada tahun 1997 sudah banyak mengalami kemajuan walaupun masih dititikberatkan pada pendidikan dasar. Proporsi penduduk yang hanya berpendidikan sampai lulus SD menaik sedikit dari 24.20% pada tahun 1974 menjadi 35.43% pada tahun 1997. Sebaliknya mereka yang berpendidikan SMTP meningkat dari 3.5% menjadi 11.67% dalam jangka tahun yang sama. Penduduk yang berpendidikan SLTA bertambah dari 725.519 juta menjadi 8.576.385 juta orang atau hampir 12 kali lipat. Sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi, diploma-Universitas dari 0.57% menjadi 3.74%.

Menegenai daya saing tenaga kerja Indonesia, berdasarkan *World Economic Forum* dalam *The Global Index Report* tahun 1996 dinyatakan bahwa variabel penduduk Indonesia mempunyai peringkat daya saing sebagai berikut : kualitas tenaga kerja urutan ke-31, tingkat pengetahuan dasar urutan ke-45, tingkat upah tenaga kerja urutan ke-39, regulasi tenaga kerja urutan ke-39 dan hubungan kerja urutan ke-20. Sehingga kalau dirata-ratakan Indonesia berada dalam di ranking ke-34. Analisis daya saing ini digunakan untuk menjawab apakah ada *equal opportunity*, tidak ada diskriminasi, terjadi atau tidak *brain drain*, sistem pendidikan, tingkat buta huruf, *supply of skilled labor*, *value system* dan ada tidaknya *company training* untuk buruh (lihat di tabel 7).

Sumber daya modal dapat digambarkan oleh cadangan devisa yang menunjukkan dana pembiayaan impor hanya untuk 3,5 bulan sampai pada tahun 1998 dengan posisi cadangan devisa kita US$11,261 miliar yang berkurang dari tahun sebelumnya sebesar 16.316 miliar US dan hutang yang dimiliki sebesar 144 miliar USD[9].

Untuk tahun 1996, faktor finansial Indonesia di tingkat Asia menempati urutan daya saing ke-36 yang mengimplikasikan kondisi yang lebih buruk dari Malaysia (19) dan Thailand (26). Variabel-variabel yang mempengaruhi ranking faktor keuangan adalah variabel perkembangan pasar uang, efisiensi lembaga keuangan, resiko dan stabilitas

9 Walaupun indikator cadangan devisa tidak menentukan daya saing secara langsung, namun setidaknya mempengaruhi kepercayaan eksportir luar negeri untuk memenuhi permintaan industri dalam negeri.

keuangan, serta tabungan dan investasi. Analisis keuangan ini menjawab pertanyaan mengenai *cost of capital*, ada atau tidaknya *venture capital*, akses di pasar modal, kebijakan bank sentral, regulasi dan kebijakan moneter serta *banking system*.

Analisis infrastruktur juga diperlukan untuk mengetahui sampai seberapa jauh infrastruktur mampu menjadi penggerak perkembangan masa depan, kondisi transpor darat, laut dan udara, migrasi-urbanisasi. Hasil penelitian itu Indonesia memiliki urutan ke-42 untuk transportasi, telekomunikasi ke-43 dan energi serta lainnya ke-35. Sehingga kalau dirata-ratakan Indonesia dalam bidang infrastruktur mempunyai ranking ke-40 secara global. Untuk IPTEK peringkat penguasaan IPTEK tenaga kerja berada di urutan 44, kemampuan Litbang 48, serta tingkat komputerisasi dang tingkat penguasaan teknologi ke 33. Sehingga kalau dirata-ratakan Indonesia menduduki urutan ke-42.

Dengan demikian dapat kita simpulkan dari hasil pemeringkatan 46 negara tersebut, kondisi faktor Indonesia masih jauh untuk siap menghadapi persaingan (karena berada di rangking bawah). Sebab arus globalisasi yang menuntut persaingan maka "mau tidak mau" semua kekurangan tersebut harus diperbaiki *(improvement)*.

2. Kondisi Permintaan

Aspek permintaan dalam negeri, pada tahun 1998 proporsi konsumsi pemerintah Indonesia 8% GDP, konsumsi swasta 56% GDP, investasi domestik bruto 38% GDP, tabungan 36% GDP dan ekspor 25% GDP. Jika dibandingkan dengan negara Cina maka ekspor dan konsumsi swasta kita lebih besar namun konsumsi pemerintah, investasi domestik bruto dan tabungan per GDP lebih kecil[10].

Dengan konsumsi swasta yang besar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi swasta memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Karena itu industri yang mendukung pola konsumsi swasta harus tetap dikembangkan mengingat potensi pasar yang besar. Kondisi pasar ini dapat difungsikan guna mendukung daya saing industri kita. Berdasarkan teori bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat semakin kecil pula proporsi konsumsi makanan terhadap konsumsi rumah tangga, dan sebaliknya semakin rendah proprsi konsumsi makanan terhadap konsumsi rumah tangga. Di Indonesia ternyata proporsi *makanan* memiliki sumbangan terbesar terhadap total konsumsi, kedua *bahan bakar* dan ketiga pakaian dan *sepatu*.[11]

Trend permintaan internasional dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dunia selama semester pertama tahun 1998 secara umum mengalami perlambatan. Namun

---

10 Lebih jelasnya lihat, "Regional Performance Figures", *Economic Review Asia*, December 1998.
11 Lihat *World Development Report* 1989 & 1993

demikian, beberapa komoditi perdagangan internasional masih memiliki permintaan yang cukup signifikan walaupun pertumbuhannya tidak sebesar tahun sebelumnya. Menurut data UNIDO, diketahui permintaan internasional yang masih besar adalah mesin elektronik, *scientific goods* dan industri kimia. Sedangkan permintaan yang terendah adalah produk minyak dan tambang, alas kaki dan karet.[12]

3. Industri Pendukung dan Terkait

Untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan keunggulan daya saing, maka perlu selalu dijaga hubungan dan koordinasi dengan pemasok *(supplier)* terutama dalam menjaga dan memelihara *value chain*. Sebuah perusahaan bisa sukses jika mampu menjaga keuntungan melalui hubungan kerja yang dekat, hubungan dekat dengan pemasok dan ketepatan waktu produk serta arus informasi.

Kenyataannya, interaksi hubungan industri dengan pemasok di Indonesia tidak dekat. Hal ini disebabkan barang input produksi masih tergantung pada produsen luar negeri. Akibatnya sering kali terjadi keterlambatan pengiriman, biaya produksi rentan terhadap nilai tukar dan mahalnya transportasi. Semuanya ini akhirnya tidak mendukung daya saing industri Indonesia.

Berdasarkan data dari *Far Eastern Economic Review* (Desember 1998), diketahui impor utama kita pada tahun 1996 terdiri dari peralatan modal sebesar US$ 9,7 milyar, minyak dan olahan minyak (US$ 4,4 milyar), produk kimia (US$ 4,6 milyar), logam (US$ 4,1 milyar) dan barang konsumsi (US$ 2,3 milyar). Besarnya impor ini membuktikan Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap luar negeri sehingga industri kita tidak kokoh dalam menghadapi *external shock* dan produk yang dihasilkan menjadi kurang kompetitif. Ini disebabkan kita tidak mempunyai industri pendukung yang baik.

4. Strategi Perusahaan, Struktur dan Persaingan

Strategi perusahaan, struktur organisasi dam modal perusahaan sertra kondisi persaingan *(rivalry)* di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan. Analisis strategi perusahaan dimaksudkan untuk mengetahui *Total Quality Management (TQM)*. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit, kewirausahaan dan hubungan industri. Semuanya itu berpengaruh pada *going concern* persahaan dalam persaingan internasional. Dalam hal strategi perusahaan, Indonesia menempati urutan ke-39 dari 46 negara yang dibuat oleh *World Economic Forum*.

12 Untuk lebih jelasnya lihat United Nation Industrial Development, *Industri Global Report*, 1996, hal. 11

Analisis struktur industri untuk mengetahui jenis industri mana yang prospektif. Menurut data BPS, jumlah industri kecil dan sedang pada tahun 1993 adalah sekitar 99,76% dari seluruh unit usaha di sektor industri. Tetapi kedua golongan industri ini menghasilkan hanya sekitar 15,17% dari output sektor industri. Selain itu pada tahun 1995 jumlah usaha kecil dan menengah adalah 99,75% dari seluruh usaha di sektor industri tetapi hanya menghasilkan sekitar 17,23% dari output sektor industri.[13]

Di sisi lain, kalau pada tahun 1993 industri besar hanya menampung 36,67% pekerja, maka pada tahun 1995 dapat menampung hanya 36,89% pekerja sedang sisanya disumbangkan oleh industri kecil dan menengah. Dari jumlah maupun penyerapan tenaga kerja, kelompok usaha kecil dan menengah adalah lebih dominan dari industri skala besar. Dan kalau dilihat dari sifat, jenis dan sebarannya, kelompok industri kecil dan rumah tangga mempunyai potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.

Dari aspek kondisi persaingan, maka kita perlu mengidentifikasikan siapa saja yang menjadi pesaing kita. Para pesaing kita terutama dari beberapa negara yang tadinya memiliki ciri-ciri perekonomian yang tumbuh dengan cepat dan mantap selam tahun 1970-1995. Dalam hal ini Indonesia masuk ke negara "bintang-bintang yang sedang naik"[14] bersama "Empat Macan Asia" yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura setara tiga macan Asia lainnya seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia yang merupakan kelompok ekonomi yang sangat berbeda satu sama lain dalam hal sumber daya, alam, jumlah penduduk, kebudayaan dan kebijakan ekonomi. Tetapi memiliki persamaan seperti tingkat investasi yang tinggi dan perubahan *total factor productivity (TFP)*.

Kesimpulan analisis

Berdasarkan paparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia kurang memiliki daya saing dalam hal penguasaan IPTEK, manajemen-strategi industri dan kualitas penduduk. Dan dengan didukung struktur ekonomi Indonesia, yang masih agraris berat sebelah (dalam artian sektor primer masih dominan menjadi sumber penghidupan rakyat) ditambah kondisi permintaan yang berat pada makanan, industri yang tepat adalah :

1. Industri yang padat karya
2. Industri yang mengolah sumber daya alam
3. Gabungan industri yang padat karya dan yang mengolah sumber daya alam
4. Industri yang berteknologi tepat guna

---

13 Sumber data dari BPS, dikutip dari Jurnal Pasar Modal Indonesia, November 1998.

14 Philip Kotler, Sokid Jatusripitak dan Suvit Maesincee, *The Marketing of Nations*, New York : The Free Press, 1997

Kesimpulan itu juga didukung oleh Teori Bertil Ohlin yang mengemukakan bahwa barang-barang yang berbeda dan negara-negara yang berbeda memiliki kekayaan faktor produksi yang relatif berbeda. Negara-negara cenderung memiliki keuntungan komparatif dalam menghasilkan barang-barang yang menggunakan secara intensif faktor-faktor yang mereka miliki dalam jumlah yang lebih banyak. Karena alasan inilah setiap negara akhirnya mengekspor barang-barang produksinya lebih banyak dan mengimpor barang-barang yang menggunakan faktor yang relatif langka secara lebih intensif.

Kemudian produk ekspor yang dapat diharapkan untuk meningkatkan ekspor Indonesia saat ini adalah hasil produk pengolahan industri yang berbasis pertanian (agroindustri atau agribisnis), seperti :

1. Pengolahan Teh
2. Penambakan Udang
3. Karet dan olahannya
4. Perkebunan dan pengolahan kopi
5. Hsil Tambang
6. Industri Tekstil
7. Kerajinan Rakyat
8. Alas Kaki
9. Kertas

(Untuk lebih jelas melihat perkembangan beberapa produk industri di atas maka dirangkum pada lampiran 9 dan tabel 4)

Strategi Peningkatan Daya Saing dan Kinerja Ekspor Indonesia

Strategi Perdagangan yang digunakan adalah campuran antara strategi berorientasi ke dalam *(inward looking strategy)* dan strategi berorientasi ke luar *(outward looking strategy)*. Strategi berorientasi ke dalam adalah kebijakan diarahkan untuk substitusi impor, yang mencakup tarif impor yang tinggi dan banyak hambatan non tarif. Suku bunga yang rendah dan jaminan inflasi. Pajak langsung yang rendah dan banyak pembebasan pajak. Subsidi tinggi dan banyak pembelian oleh pemerintah.

Sedangkan strategi yang berorientasi ke luar adalah strategi yang lebih diarahkan untuk menggiatkan ekspor. Indonesia menganut strategi ini beberapa tahun setelah sebelumnya menganut pada strategi untuk subsitusi impor. Strategi yang berorientasi keluar (ekspor) memberikan dampak positif. *Pertama,* struktur ekonomi dan industri selaras dengan keunggulan komparatif. *Kedua,* skala ekonomis melalui ekspor. *Ketiga,* pendapatan ekspor dibuat stabil melalui diversifikasi barang manufaktur. *Keempat,* negara dengan mudah memperoleh inovasi teknologi dan keterampilan dari luar negeri.

Dengan kemampuan yang kita miliki dari hasil analisa di atas, maka strategi yang tepat adalah strategi aggresif atau penyerangan melalui peralihan kesempatan yang ada dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan. Maksudnya berusaha menembus pasar yang

belum digali dan melayani segmen pasar kecil terutama ke negara-negara yang belum menjadi mitra. Istilah manajemennya di kenal dengan melakukan *penetrasi pasar*. Tentunya dengan tetap menjaga kualitas dan harga yang mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Namun untuk memasuki pasar internasional yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah *strategic consideration*. Ini menyangkut masalah seperti layanan antar, kesesuaian dengan kebijaksanaan jangka panjang pemerintah ataupun masalah-masalah yang timbul dalam mengakses ke target konsumen. *Dari sisi mikro*, kualitas manajemen dari perusahaan Indonesia sangat menentukan dapat atau tidaknya perusahaan menembus pasar yang belum tergali. Manajemen perusahaan harus aktif sebab komitmen dan kedinamisan manajemen sangat penting dalam perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan penetrasi pasar menuntut aktivitas yang banyak dalam hal pembangunan pasar, sensitivitas terhadap lingkungan asing, penelitian dan inovasi.

Dari aspek makro, strategi peningkatan kinerja ekspor Indonesia dalam melakukan penetrasi pasar adalah usaha untuk meningkatan ekspor dengan penerobosan dan penggalian pasar yang luas guna menjamin berlanjutnya pertumbuhan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mendukung penetrasi. *Pertama,* dukungan *trade financing* yang bisa menopang aktivitas ekonomi dunia usaha. Selama krisis ekonomi pemerintah telah mengeluarkan berbagai skema pembiayaan baik yang berasal dari Bank Indonesia maupun bersumber dari negara lain. Fasilitas skim BI berupa rediskonto *pre-shipment* dan rediskonto *post-shipment*. Juga ada fasilitas penjaminan atau pembiayaan seperti skim penempatan dana BI di beberapa bank luar negeri seperti skim *JEXIM* Bank-Jepang, skim *Export Finance Insurance Corporation (EFIC)* dan terakhir skim *MOU* penggalakan sektor riil. Namun, fasilitas ini dianggap tidak optimal pemanfaatannya karena kurangnya sasaran dari masing-masing skim fasiitas dan berbelit-belitnya birokrasi[15]. Otoritas moneter sebaiknya perlu melakukan fokus kebijakan sehingga mengenai sasaran yang tepat khususnya dalam memfasilitasi ekspor. Kemudian aturan untuk mengrus dokumen dalam rangka pembiayaan perdagangan lebih dipermudah.

Kedua, kegiatan promosi ke mancanegara mengenai berbagai produk-produk ekspor unggulan. Kegiatan promosi produk ekspor Indonesia masih kurang terpadu dan belum optimal dalam mendukung *outward looking strategy*. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memanfaatkan *International Trade Promotion Center (ITPC)* dan berbagai jaringan perwakilan dagang nasional di mancanegara untuk mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia.

---

15 Toto Dirgantoro, "Peluang Ekspor di Masa Krsis dan Upaya Pemerintah sebagai Pendorong dalam Menghadapi Persaingan di Pasar Global", *Seminar Nasional "Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia di Masa Krisis dalam Menghadapi Persaingan Bebas" Management Student Society FEUI,* Auditorium FEUI, 9 Desemeber 1998

Ketiga, perlunya diversifikasi produk ekspor. Dengan beragamnya produk yang di ekspor, maka importir memiliki banyak pilihan produk untuk mengimpor dari Indonesia. Sehingga diharapkan ekspor produk Indonesia dapat meningkat. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi rapuhnya komposisi ekspor produk Indonesia yang selama ini hanya mengandalkan pada beberapa produk ekspor dan negara tujuan.

Keempat, optimalisasi penggunaan fasilitas ekspor yang diberikan oleh negara-negara importir. Pemberian fasilitas ekspor seperti fasilitas kuota untuk beberapa produk misalnya TPT, harus dapat dioptimalkan sehingga peluang tidak hilang begitu saja.

Kelima, perlu dirangsang iklim kondusif menunjang ekspor. Iklim dunia usaha yang lebih kondusif sangat diperlukan untuk menunjang ekspor. Pemerintah dapat berperan dlam menciptakan iklim tersebut dengan memberikan kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang menunjang kelancaran ekspor. Selain itu, pelebaran *spread* nilai ekspor melalui skema PEBT (pemberitahuan ekspor barang tertentu) yang lebih besar.

Keenam, kerja sama yang erat antara pemerintah dan dunia usaha. Mengingat peluang yang ada tersebut diperebutkan oleh Thailand, Malaysia dan juga negara-negara lainnya, maka harus ada kerja sama yang erat antara Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, BKPM dan Departement Keuangan atau Bank Indonesia dengan dunia usaha.

Ketujuh, deregulasi dalam bidang transportasi laut. Keterbatasan transportasi barang untuk ekspor juga menghambat kinerja ekspor karena produk tidak dapat langsung dikirimkan atau jika dapat dikirimkan tentu dengan tarif yang lebih mahal. Oleh karena itu perlu adanya pemodal yang menanamkan modalnya dalam sektor ini untuk mendukung pelayaran atau transportasi nasional.

Kedelapan, memperbaiki komposisi ekspor. Komposisi ekspor yang tidak seimbang dalam arti hanya mengandalkan pada beberapa produk ekspor saja sangat riskan. Hal ini dikarenakan apabila tidak berhasil dalam mengekspor beberapa produk, penerimaan ekspor dapat berkurang sangat besar. Sehingga perlu adanya usaha menciptakan produk unggulan atau diversifikasi ekspor sehingga dapat menambah pemasukan devisa.

Kesembilan, memperbaiki struktur industri. Struktur ekonomi atau industri Indonesia sangat terkonsentrasi dalam beberapa perusahaan saja. Konsentrasi ini terealisasi dalam bentuk monopoli, oligopoli dan karte. Sehingga perusahaan Indonesia kurang dapat bersaing terutama dalam pasar internasional karena kurang melakukan inovasi dan kreasi baru. Oleh sebab itu, struktur industri harus segera diperbaiki dengan cara mencegah pemberian fasilitas oleh pemerintah yang mengarah kepada monopoli agar para pelaku industri dapat bersaing dengan wajar.

Langkah Operasional

Peningkatan ekspor tidak hanya didukung dengan strategi yang bersifat general, tetapi juga aplikatif dalam pelaksanaannya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Langkah-langkah operasional yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi tersebut oleh *pihak pemerintah* adalah sebagai berikut. *Pertama,* penyiapan dukungan administratif. Pemerintah dalam hal ini Departement Perindustrian bekerja sama dengan Departemen Perdagangan dan Duta Besar dari negara-negara yang memiliki industri sejenis dengan Indonesia seperti Singapura. Dengan pemanfaatan GSP sampai dengan pelabuhan tujuan ekspor di Amerika Serikat. *Kedua,* memasyarakatkan kondisi administratif dari masing-masing negara. Departement Perdagangan diharapkan dapat mamasyarakatkan kondisi administratif dari masing-masing negara kepada aparat terkait dan dunia usaha.

Ketiga, penurunan suku bunga bank. Penurunan tingkat suku bunga bank sudah seharusnya diturunkan agar sektor riil dapat berjalan. Suku bunga yang tinggi tersebut selain membuat industri menjadi stagnasi juga menurunkan daya saing. Oleh sebab itu penurunan tingkat suku bunga harus segera dilakukan agar industri nasional dapat berjalan dan mengekspor produk dengan harga bersaing.

Keempat, mewirausahakan birokrasi pemerintah. Pemerintah sangat perlu menciptakan semangat kompetisi dalam pelayanannya dan melakukan transformasi *rule-driven* organisasi. Artinya unit-unit pemerintahan sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi pemerintahan haruslah diberi kebebasan berkreasi dibandingkan petunjuk teknis yang ketat dan kaku. Pemerintah juga perlu mengubah cara kerjanya dari hirarki kepada bentuk partisipasi agar dapat bekerja secara profesional. Penghapusan pungutan tidak resmi juga harus dilakukan dengan disertai peningkatan kesejahteraan pegawai. Deregulasi ketentuan ekspor yang tidak terlalu panjang perlu dilakukan agar penghapusan pungutan dan efisiensi kerja dapat tercapai. Sedangkan yang perlu dilakukan oleh *dunia usaha* ada beberapa hal. *Pertama,* memanfaatkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah. *Kedua,* mempercepat pelaksanaan peluang tersebut dengan melakukan kerja sama pemasaran yang disertai dengan pengembangan perusahaan, kerja sama langsung dengan pihak importir di Amerika Serikat dan patungan dengan pengusaha-pengusaha dari Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong. Kerja sama patungan terutama jika Indonesia belum memiliki industri tersebut.

Ketiga, adanya sistem bapak angkat dalam perusahaan. Untuk industri yang termasuk industri kecil akan di dorong kerja sama Bapak Angkat baik dengan sesama pengusaha Indonesia maupun dengan pengusaha-pengusaha dari Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong terutama untuk pelaksanaan ekspornya. Hal ini perlu dilakukan agar industri kecil dapat berkembang dan dapat langsung mengekspor produknya.

Keempat, menerapkan teknologi yang tepat guna. Pemerintah maupun dunia usaha diharapkan dapat menggunakan teknologi yang tepat guna dalam arti teknologi tersebut benar-benar dibutuhkan dan tidak merusak lingkungan. Penggunaan teknologi yang tepat guna ini penting karena tidak hanya untuk menjaga produk menjadi lebih kompetitif, juga dapat menghemat biaya dari biaya lingkungan dan pemborosan dana.

Kelima, meningkatkan kualitas dan senantiasa memperhatikan *quality control* yaitu menjaga agar mutu barang tidak berubah-ubah, inovasi produk dan bentuk kemasan serta sertifikasi internasional seperti ISO *(International Standard Organization).* Dengan adanya kontrol mutu dan sertifikasi internasional, produk ekspor Indonesia dapat maju ke pasar negara maju.

Keenam, peningkatan pengetahuan eksportir dan penyebaran informasi peluang ekspor. Salah satu penyebab masih belum besarnya ekspor ke pasar negara maju adalah kurangnya eksportir mengenai ketentuan atau tata cara dalam memasuki pasar suatu negara. Oleh karena itu, penyebaran informasi mengenai ekspor dapat dilakukan baik melalui media cetak (majalah, koran dan brosur), media elektronik (radio, televisi), program pendidikan dan pelatihan.

V. Kesimpulan dan Saran

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia jelas sangat memerlukan modal guna memulihkan perekonomian Indonesia. Ditengah-tengah sulitnya mencari arus devisa yang rnasuk terutama yang datangnya dari investasi langsung *(FDI)* maka surplus neraca perdagangan luar negeri merupakan satu-satunya sumber yang dapat diandalkan untuk mendapatkan devisa, disamping bantuan negara lain dan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Oleh karena itu salah satu yang penting untuk dikembangkan adalah penerimaan dari ekspor produk baik migas maupun non migas.

Strategi peningkatan kinerja dan daya saing ekspor nasional jelas membutuhkan perhatian dari berbagai pihak termasuk kalangan eksportir, pemerintah dan para akademisi. Kesinaimbungan dan kerja yang simultan dari pihak pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk mendongkrak ekspor produk Indonesia.

Untuk dapat meningkat kinerja ekspor nasional maka *pemerintah* perlu melakukan hal berikut:

1. Deregulasi sektor riil yang mempermudah dalam prosedur ekspor.
2. Membantu pembiayaan ekspor segera kepada perusahaan yang sangat membutuhkan terutama pengusaha kecil dan menengah.
3. Dukungan kepada swasta dalam bentuk informasi dan perizinan untuk menerobos pasar negara maju.

Bagi *perusahaan* harus lebih mengutamakan kemampuan memasarkan, bukan kemampuan membuat saja. Karena handal dalam teknologi tidak identik dengan unggul dalam pemasaran produk.

Daftar Pustaka

____________, "Regional Performance Figures", E*conomic Far Estern Review Asia*, December 1998.

___________, "Emil: Konsentrasi Industri Hambat Laju Ekspor dan Investasi, Bisnis Indonesia, 19 Januari 1996.

Bank Indonesia, Laporan Tahunan 1997/ 1998.

Biro Pusat Statistik, Buletin Ringkas, beberapa penerbitan.

Caropeboka, Laila Djanun N, "Masalah Jaringan Pasar Ekspor dan Trading Company," Strategi Pembiayaan Ekspor Nun Migus Pascu GATT, Jakarta: Info Bank, 1995.

Dirgantoro, Toto, "Peluang Ekspor di Masa Krisis dan Upaya Pemerinah sebagai Pendorong dalam Meiighadapi Pei'saingan di Pasai Global," Reinhun ' Nasioncll "Strategi Peningkolan Ekspor Indonesia di Masa Krisis dalam Menghadapi Persaingan Bebas " Management Student Society FEUI, Auditorium FEUI, 9 Desember 1998.

Djamin, Zulkarnain, Peranun Ekspor Non Migas dalam PJP II: Prospek dan Permasalahannya, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1993.

Hady, Harndy, Ekonomi Infernasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Indrawati, Sri Mulyani, "Memacu Ekspor Non Migas dalam PJPT II," Beberapa Pemikiran unluk Memacu Ekspor Non Migas, Jakarta: Departemen Perdagangan, 1993.

Kartadjornena, H.S., GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, Jakarta: Ul Press, 1996.

Kotler, Philip, Sokid Jatusripitak dan Suvit Maesincee, The Marketing of Nations, New York: The Free Press, 1997.

Lubis, Hamsar, "Sejumlah Sumber Kemandekan Ekspor Non Migas," Bisnis Indonesia, 1998.

Moeljono, Djoko, "Peluang dan Tantangan Ekspor Non Migas dalam Pelita VI dan Akses Pasar Dunia," Strategi Pemhiayaan Ekspor Nun Migas l'asca OATT, Jakarta: Info Bank, 1995.

Mulyono, "Pelablihan (Jan Daya Saiiig Ekspor Nasional," *Bisnis Indonesia,* 15 Juni 1995.

Porter, Michael, *The Competitive Advantage of Nation,* New York: The Free Press, 1990.

Rahardjo, M. Dawam, *Hahihienomics: Telaah Ekonomi Pemhangunan Indonesia,* Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997.

Rahayubudi, "Perdagangan Luar Negeri", *Tinjanan Perdagangan Indonesia,* No. 16, Tahun 1998.

Sagir, H. Soeharsono, "Antisipasi Perdagangan Bebas: Ekonomi Biaya Tinggi, Kehandalan dan Teknologi dan Daya Saing", *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia,* September 1997.

Silalahi, Pande Radja, "Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, *Jurnal Pasar Modal Indonesia,* November 1998.

Sudibyo, Aglis, "Strategi Peningkatan Ekspor Non Migas Indonesia, "*Buletin Ekonomi Bapindo,* Nomor I, Tahun XX, Januari/ Februari 1995.

Sukamdani, Hariyadi BS, "Meningkatkan Ekspor dalam Situasi Krisis Ekonomi," *Seminar Nasional "Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia di Masa Krisis dalam Menghadapi Persaingan Bebas " Management Student Society FEUI,* Auditorium FEUI, 9 Desember 1998.

Susanti, Hera, et.all, *Indikator-indikator Makroekonomi,* Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1995.

Tarmidi, Lepi, *Deberapa Pemikiran untuk Memacu Ekspor Non Migas,* Jakarta: Departemen Perdagangan, 1993. '

Thoha, Mahmud, "Kendala Ekspor Industri Kecil dan Alternatif Pemecahannya,"*Jurnal Keuangan dan Moneter,* Volume 4, Nomor 2, Desember 1997.

Todaro, Michael R., *Economic Development in the Thirld World, 4'*h edn, White Plains, NY: Longans, 1989.

United Nation Industrial Development. *Industrial Development Global Report,* 1996.

Lampiran 1

Tabel 1
Ikhtisar APBN (dalam miliar rupah)

URAIAN	APBN 1997/ 98	APBN 1998/ 99	RAPBN 1999/ 20	%
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	132.008,6	263.888,1	218.203,8	(17,3)
Penerimaan Dalam Negeri	108.183,8	149.302,5	140.803,8	(5,7)
Migas	35.357,0	49.711,4	20.065,0	(57,8)
Bukan Migas	72.826,8	99.951,1	119.838,8	20,3
Penerimaan Luar Negeri	23.817,0	114.585,6	77.400,0	(32,5)
TOTAL PENGELUARAN NEGARA	131.544,6	263.888,1	218.203,8	(26,0)
Pengeluaran Rutin	84.606,2	171.205,1	134.555,5	(24,4)
Belanja Pegawai	19.175,1	24.781,4	32.037,1	29,2
Belanja Barang	9.031,9	11.425,1	11.039,0	(3,38)
Belanja Rutin Daerah	9.872,2	13.289,7	18.429,6	38,7
Bunga dan Cicilan Utang	29.697,1	66.236,6	44.810,9	(32,3)
Pengeluaran Rutin Lainnya	16.830,0	55.472,5	28.238,9	(49,1)
Pengeluaran Pembangunan	48.938,3	92.638,0	83.648,3	(9,7)
SURPLUS (DEFISIT)	456,2	-	-	-

Sumber : *Nota Keuangan dan RAPBN 1999*
Dikutip dari Harian Kompas, 6 Januari 1999

Tabel 2
Indikator Utang Indonesia Tahun 1991-1998

Tahun	Pemerintah (US $ miliar)	Swasta (US $ miliar)	Jumlah (US $ miliar)	Debt/ GDP (%)	DSR* (%)
1991	49.084	23.900	72.984	62,5	45
1992	53.285	30.600	83.885	57,3	44
1993	57.521	32.000	89.521	61,9	44
1994	63.688	37.800	101.488	57,4	46
1995	64.410	43.390	107.800	53,6	43
1996	59.045	55.400	114.445	50,3	41
1997	63.462	73.962	137.424	63,9	46
1998 **	71.500	72.500	144.000	147,6	52

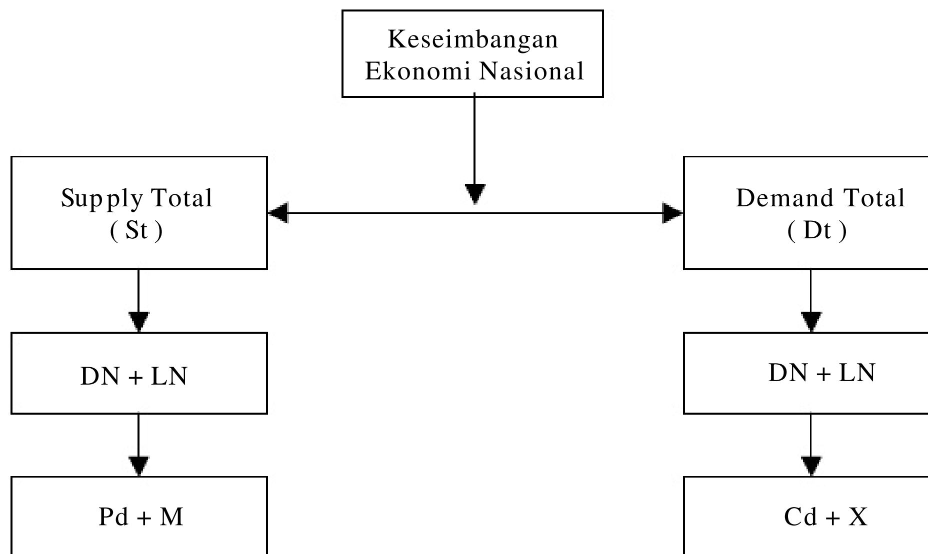
* Angka Konservatif
* Pre-eliminary
Sumber : *Econit Advisory Group*

Dikutip dari Harian Media Indonesia, 15 Februari 1999

Lampiran 2

Gambar 1

Keseimbangan Ekonomi Internasional

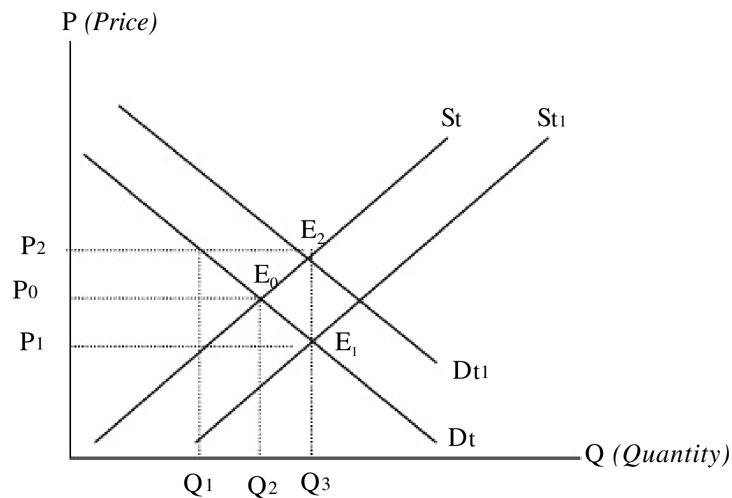


Keterangan :

DN = Dalam Negeri
LN = Luar negeri
Pd = Produk Domestik
M = Produk Impor
Cd = Konsumsi Domestik
X = Produk Ekspor

Lampiran 3

Gambar 2
Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian



Keterangan :

- Bila demand luar negeri atau ekspor (X) naik, maka kurva permintaan akan bergeser kanan atas (Dt1). Dalam hal ini, bila penewaran tetap maka harga akan naik menjadi P2 dan produksi dalam negeri akan naik menjadi Q2, sedangkan titik keseimbangan bergaser dari E0 ke E2.
- Sebaliknya, bila impor (M) naik, maka *supply* total dalam negeri akan bertambah, sehingga kurva *supply* total akan bergeser ke kanan bawah (St1). Dalam hal ini, bila *demand* tetap, maka harga akan turun menjadi Q1, sedangkan titik keseimbangan bergeser dari E0 ke E1.
- Dengan demikian, terbukti bahwa kegiatan ekonomi perdagangan internasional (Xdan M) akan mempengaruhi ekonomi nasional melalui harga dan produksi dalam negeri.

Lampiran 4

Tabel 3

Perkembangan Neraca Perdagangan

			Perub.	Januari s/d Juni		Perub.
	1996	1997	(%)	1997	1998	(%)
Neraca Perdagangan	6.886,2	11.763,8	70,8	4.111,3	11.281,9	174,4
Migas	8.126,3	7.924,1	-5,3	3.974,2	2.501,7	-37
Non Migas	-1.240,1	4.065,4	127,8	137,2	8.780,2	6.299,6
Ekspor	49.814,7	53.443,6	7,3	25.510,0	24.554,4	-3,7
Migas	11.721,8	11.622,5	-0,8	5.997,8	3.952,6	-34,1
Non Migas	38.092,9	41.821,1	9,7	19.512,3	20.601,8	5,6
Impor	42.928,5	41.697,8	-2,9	21.398,7	13.272,5	-38,0
Migas	3.595,5	3.924,1	9,1	2.023,6	1.450,9	-28,3
Non Migas	39.333,0	37.755,7	-4,0	19.375,1	11.821,6	-39,0

Sumber : *B P S*

Lampiran 5

Tabel 4
Nilai Ekspor (juta US$)

Rincian	1994/95r	1995/96r	1996/97	1997/98r
Non Migas	31.716	37.138	39.267	45.828
Kayu dan Produk Kayu	5.171	5.226	5.561	5.443
Kayu Lapis	3.359	3.390	3.606	3.211
Kayu Gergajian	168	154	134	99
Lainnya	1.644	1.682	1.821	2.133
Karet Alam	1.511	2.011	1.789	1.392
Kopi	747	650	602	615
Minyak Sawit	965	988	1.001	1.525
Hewan dan Lainnya	1.636	1.694	1.640	1.922
Udang	980	1.020	996	1.087
Lainnya	656	674	645	836
Teh	102	94	115	174
Bahan Makanan	698	757	883	961
Tapioka	47	80	45	19
Bungkil Kopra	71	75	106	82
Lainnya	580	602	733	860
Lada	86	161	91	175
Tembakau	71	79	80	152
Kulit Kering	49	44	37	57
Coklat	233	241	268	284
Rotan dan Produk Rotan	356	378	291	147
Tekstil dan Produk Tekstil	5.716	6.145	6.022	7.911
Kerajinan Tangan	991	568	584	1.788
Alat-alat Listrik	2.038	2.779	3.716	3.293
Pupuk	192	281	302	304
Semen	30	13	12	54
Besi Baja	767	583	542	817
Kertas	1.002	1.467	1.356	2.393
Gelas/ Kaca	166	215	218	279
Alas Kaki	1.936	2.085	2.070	2.170
Hasil Tambang	2.725	3.912	3.746	4.613
Timah	145	278	287	272
Tembaga	903	1.574	1.506	1.461
Aluminium	251	341	317	266
Nikel	368	397	327	238
Emas	75	61	83	387
Batu Bara	862	1.078	1.043	1.820
Pasir Alam	21	43	31	30
Lainnya	100	140	153	139
Lainnya	4.528	6.766	8.339	9.361
Minyak Bumi	6.312	6.529	7.513	5.854
Gas	4.133	4.087	5.258	4.423
LNG	3.746	3.603	4.686	4.016
LPG	387	484	572	407
Total Ekspor	42.161	47.754	52.038	56.105

Sumber : *Laporan Tahunan BI 1997/98*

Lampiran 6

Tabel 5
Nilai Ekspor Non Migas menurut Negara Tujuan (juta $)

Benua/Negara	1995/96		1996/97		1997/98	
	Nilai	Pangsa	Nilai	Pangsa	Nilai	Pangsa
Afrika	693,6	1,9	630,9	1,6	819,7	1,8
Amerika	6.983	18,8	7.928,5	20,2	8.143,5	17,8
Amerika Serikat	5.837,2	15,7	6.400,8	16,3	6.844,1	14,9
Kanada	366,4	1,0	795,2	2,0	397,2	0,9
Lainnya	779,4	2,1	732,6	1,9	89,9	0,2
Asia	21.241,7	57,2	22.039,4	56,1	26.172,9	57,1
ASEAN	5.743,1	15,5	5.987,8	15,2	8.756,9	19,1
Brunei Darussalam	26,3	0,1	29,8	0,1	58,3	0,1
Malaysia	1.069,0	2,9	1.082,0	2,8	1.336,4	2,9
Philipina	623,80	1,7	548,2	1,4	747,2	1,6
Singapura	3.412,0	9,2	3.678,4	9,4	5.911,8	12,9
Thailand	612,0	1,6	649,3	1,7	703,2	1.5
Hong Kong	1.575,4	4,2	1.576,2	4,0	2.406,0	5,3
Korea Selatan	1.437,5	3,9	1.299,7	3,3	1.321,7	2,9
Taiwan	1.048,3	2,9	1.097,2	2,8	1.396,1	3,0
RRC	1943,8	2,5	953,3	2,4	1.560,3	3,4
India	378,9	1,0	402,7	1,0	626,8	1,4
Pakistan	115,4	0,3	122,0	0,3	187,3	0,4
Jepang	7.000,1	18,8	7,198,3	18,3	6.827,8	14,9
Timur Tengah	1.420,6	3,8	1.393,3	3,5	1.665,3	3,6
Irak	5,9	0,0	1,1	0,0	22,8	0,0
Iran	141,7	0,4	113,6	0,3	64,7	0,1
Saudi Arabia	481,8	1,3	519,9	1,3	612,7	1,3
Kuwait	64,4	0,2	73,4	0,2	61,3	0,1
Yordania	66,0	0,2	47,0	0,1	61,7	0,1
Emirat Arab	594,3	1,5	526,0	1,3	656,7	1,4
Lainnya	106,5	0,3	111,3	0,3	175,3	0,4
Lainnya	1.546,2	4,2	2.009,0	5,1	1.434,6	3,1
Eropa	7.620,4	20,5	8.056,9	20,5	9.874,4	21,5
Masyarakat Eropa	6.747,4	18,2	7.016,2	17,9	9.152,2	20,0
Belanda	1,497,3	4,0	1.577,1	4,0	1.832,	4,0
Belgia dan Luxemburg	542,9	1,5	667,1	1,7	828,7	1,8
Inggris	1.159	3,1	1.170,9	3,0	1.244,7	2,7
Italia	676,9	1,8	562,0	1,4	641,3	1,4
Jerman	1.453,6	3,9	1.419,9	3,6	1.512,2	3,3
Prancis	533,3	1,4	550,5	1,4	538,5	1,2
Lainnya	884,7	2,4	1.068,7	2,7	2.554,1	5,6
Bekas Uni Soviet	140,9	0,4	127,7	0,3	110,7	0,2
Eropa Timur Lainnya	241,6	0,7	213,6	0,5	207,9	0,5
Lainnya	490,2	1,3	699,5	1,8	403,6	0,9
Australia dan Oceania	599,4	1,6	611,2	1,6	817,5	1,8
Total	37.138,0	100	39.267,0	100	45.828	100

Sumber : *Laporan Tahunan BI 1997/98*

Lampiran 7

Tabel 6
Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 dan 1998

(dalam miliar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	1997 *		1998 *	
		Harga Berlaku	Harga Konstan 1993	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	100,150.3	64,289.5	186,482.8	64,433.5
2.	Pertambagnan dan Penggalian	54,509.9	38,385.9	127,216.7	36,787.5
3.	Industri Pengolahan	159,747.7	108,828.6	259,563.9	94,808.3
4.	Listrik, Gas dan Air minum	7,939.3	5,498.6	11,530.7	5,702.1
5.	Bangunan	46,181.1	35,040.6	53,841.4	21,116.4
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	103,762.8	73,503.6	147,477.6	59,572.2
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	42,231.8	32,169.4	53,693.3	28,051.4
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	58,691.2	38,730.1	81,469.5	28,372.4
9.	Jasa-jasa	52,291.6	37,649.1	68,351.2	35,874.9
	PDB	625,505.9	434,095.5	989,573.1	374,718.8
	PDB Tanpa Migas	576,088.6	399,525.4	875,130.5	340,459.4

* Angka Sementara
Sumber : *Kompas, 5 Januari 1999*

Lampiran 8

Tabel 7
Peringkat Daya Saing Indonesia dalam Pasar Global Tahun 1996

Faktor		Variabel	Ranking
1	Keterbukaan *Internationalization*	• Nilai Tukar	46
		• Perdagangan Internasional	41
		• Keterbukaan terhadap PMA	27
		• Keterbukaan Pasar Uang	23
2	Pemerintah *Government*	• Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB Peran Pemerintah/ Pangsa	7
		• Kebijakan Fiskal dan Tabungan	5
		• Pajak	5
		• Intervensi Ekonomi	38
		• Birokrasi Pemerintah	41
3	Keuangan *Finance*	• Perkembangan Pasar Uang	11
		• Efisiensi Lembaga Keuangan	24
		• Risiko dan Stabilisasi Keuangan	35
		• Tabungan dan Inventasi	7
4	Infrastruktur *Infrastructure*	• Transportasi	42
		• Telekomunikasi	43
		• Energi dan Infrastruktur lainnya	35
5	IPTEK *Science and Tecnology*	• Penguasaan IPTEK Tenaga Kerja	44
		• Kemampuan Litbang	48
		• Tingkat Komputerisasi	46
		• Tingkat Penguasaan Teknologi	33
6	Manajemen *Management*	• Kewiraswastaan	43
		• Strategi	39
		• Orientasi Pembeli Konsumen	38
		• Kontrol Kualitas	35
		• Sumber Daya Managerial	43
7	Penduduk *People*	• Kualitas Tenaga Kerja/ Buruh	31
		• Tingkat Pengetahuan Dasar	45
		• TingkatUpah Tenaga Kerja	39
		• Regulasi Pasar Tenaga Kerja	39
		• Hubungan Kerja-Industri/ Relation	20
8	Kelembagaan *Rules and Law*	• Undang-undang/ Peraturan Hukum (Law Enforcement)	42
		• Hak Cipta-Perlindungan Hak Cipta Intelektual	49

Sumber : *World Economic Forum, Global Index Report, 1996*

Lampiran 9

Penjelasan Kondisi Beberapa Sektor Andalan

Karet

Pengolahan karet termasuk sepuluh besar penghasil devisa Indonesia. Sampai pertengahan bulan Mei 1997, ekspor bernilai US$ 846 ribu. Karet merupakan komoditas yang paling diandalkan di sektor agribisnis. Meskipun demikian, nilai ekspornya cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu *harga karet dunia yang terus merosot* dan *melemahnya kegiatan ekonomi di negara importir* seperti Jepang, Amerika, Korea dan Eropa. Selain itu Indonesia bersaing dengan Thailand dan Malaysia sebagai penghasil karet terbesar dunia yang turut menurunkan harga. Diperkirakan bisnis karet akan membaik pada saat ekonomi dunia sudah pulih yaitu sekitar tahun 2003. Sebab saa itu nanti permintaan ban dan sepatu akan tinggi. Walaupun demikian dalam masa krisis komoditi karet masih memperoleh margin laba sekitar I % dan tidak sebesar dulu.

Udang

Udang merupakan industri non-migas yang sekarang menghadapi permasalahan Penyebabnya antara lain: *pertama,* alam yang tak bersahabat. Contohnya efek La Nina Dengan adanya musibah alam ini membuat sejumlah tambak tidak dapat difungsikan. *Kedua,* polusi yang berlebihan yang berskala dari pabrik-pabrik di sepanjang pantai.

Narnun disisi lain, menguatnya dolar merupakan manfaat bagi pengekspor udang karena dulu yang per dolarnya Rp2.300,00 kini menjadi sekitar Rp8000,00. Begitu pula dengan hasil laut lainnya, seperti ikan kerapu, cakalalang dan tuna otomatis terangkat pula. Diperkirakan komoditi ini akan menjadi komoditi andalan untuk ekspor sebagai penghasil devisa pemerintah untuk beberapa tahun ke depan.

Kopi

Krisis moneter telah menguntungkan pengusaha kopi. Alasannya harga kopi yang tetap tinggi dengan menguatnya dolar. Sedangkan pesaing kopi lainnya seperti Brasil dan Kolombia menghadapi musim El Nino yang membuat produksi mereka menurun. Ekspor menjadi tumpuan petani kopi di masa krisis. Sebab dengan menurunnya daya beli domestik menyebabkan konsurnsi perkapita juga menurun. Sehingga terbuka peluang bagi kopi untuk diekspor ke luar negeri.

Teh

Harga teh akhir-akhir ini terus anjlok. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kelebihan pasokan the dunia. Tahun 1998 diperkirakan pasar dunia enalami kelebihan

pasokan sebanyak 20% karena hampir semua negara produsen enagalami kenaikan produksi yangberarti. Pesaing the ini adalah India, Cina, dan Srilangka.

Dengan terdepresiasinya rupiah, diharapkan ekspor dapat meningkatkan pendapatan. Tetapi dengan syarat teh tersebut harus diolah terlebih dahulu menjadi produk teh. Dukungan pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan.

Tekstil

Industri ini sangat mengandalkan faktortenaga kerja yang tersedia dalam jumlah besar dan murah sebagai kelinggulan kompai-atifnya. Struktur industri ini belum mendapat mengintegrasi secara vertikal mengingal bahan mentah dan mesin-mesin masih impor sehingga sumber daya domestik yang dipakai hanyalah sumber daya manusia. Hingga awal 1980-an, pasar utama tekstil ialah pasar domestik. Ketika harga minyak dan gas menurun drastis pada pertengahan 1980-an, pemerintah mendorong besar-bsaran ekspor dari industri ini. Program yang sukses ini menjadikan industri non migas terbesar dalam hal kontribusi pendapatan devisa sampai sekarang.

Dalam tahun 1990-an industri kita menghadapi tantangan yaitu pesaing dari Vietnam dan Cina serta kebijakan quota di pasar tujuan ekspor di negara maju. Untuk menghadapi tantangan pertama Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya karena depresiasi nilai mata uang rupiah. Selain itu pemerintah dan swasta harus bekerja sama untuk mentransformasikan industri tesktil supaya memiliki keunggulan komparatif. Dalam menghadapi tantangan kedua dapat dengan mendiversifikasi pasar lain, terutama Timur Tengah, Asia Barat dan Jepang.

